

BUKU INFORMASI MUSEUM

PERANAN MUSEUM

DALAM PENDIDIKAN SEJARAH



Direktorat
Budayaan

KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
DEPUTI BIDANG SEJARAH DAN PURBAKALA

MUSEUM BENTENG VREDEBURG YOGYAKARTA

Jl. Jend. A. Yani No. 6 Yogyakarta Telp. (0274) 586934, 510996
2004

INFORMASI CERAMAH / DISKUSI MUSEUM

PERANAN MUSEUM DALAM PENDIDIKAN SEJARAH



**KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
DEPUTI BIDANG SEJARAH DAN PURBAKALA
MUSEUM BENTENG VREDEBURG YOGYAKARTA
Jl. Jend. A. Yani No. 6 Yogyakarta**

Tim Penyusun :

Drs. Gunawan Haji
Muri Kurniawati, SIP
Haris Budiharto, SS
Winarni, SS

Tim Editing :

Drs. Wahyu Indrasana
Drs. Rudi Bambang
Budi Sanyata, S.Pd

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan segala karunia-Nya kepada kami sehingga penyusunan buku Informasi Ceramah/Diskusi Museum dengan Judul **“Peranan Museum Dalam Pendidikan Sejarah”** ini dapat selesai dengan lancar.

Buku ini berisi tentang rangkuman informasi Ceramah/Diskusi Museum yang pernah dipresentasikan oleh sejarawan dihadapan para peserta umum di Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta maupun di tempat lain.

Harapan kami buku yang sangat sederhana ini dapat menambah informasi khasanah ilmu pengetahuan sejarah dan sarana penyebaran informasi kepada masyarakat dan generasi muda pada umumnya.

Apapun bentuknya kami tetap menyadari bahwa buku ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu kami sangat mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak demi baiknya dalam penyusunan-penyusunan mendatang. Pada kesempatan ini pula kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam bentuk apapun demi terselesainya buku ini. Atas segala kekurangannya kami mohon maaf. Terima kasih.

Penyusun

SAMBUTAN PEMIMPIN BAGIAN PROYEK MUSEUM BENTENG VREDEURG YOGYAKARTA

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta sebagai kota perjuangan sarat dengan peristiwa-peristiwa perjuangan baik yang bersifat lokal maupun nasional yang berpengaruh terhadap sejarah perjuangan bangsa Indonesia.

Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta melalui Bagian Proyek Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta tahun anggaran 2004 ini menerbitkan kembali buku Informasi Ceramah/ Diskusi Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta Dengan judul **"Peranan Museum Dalam Pendidikan Sejarah"**

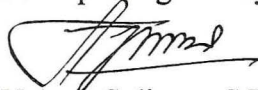
Buku tersebut merupakan kumpulan bahan-bahan Ceramah dan Diskusi yang diselenggarakan oleh unit Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta baik yang dilaksanakan secara terpadu dengan instansi terkait maupun mandiri. Makalah ini terkait dengan Fungsi analisis museum dan pengembangannya mencakup bidang sejarah pendidikan maupun pendidikan politik.

Tujuan penerbitan buku ini sebagai media penyebarluasan informasi kepada masyarakat dan generasi muda khususnya agar mampu meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap museum dan sejarah perjuangan bangsa Indonesia.

Kami mengucapkan terima kasih kepada para penulis naskah dan semua pihak yang telah membantu terbitnya buku ini.

Wassalamu'alaikum Wr. WB.

Yogyakarta, Juli 2004
Peminpin Bagian Proyek



V. Agus Sulistya . S.Pd
NIP.132002323

**SAMBUTAN
KEPALA MUSEUM BENTENG VREDEBURG
YOGYAKARTA**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

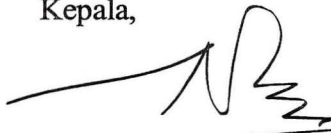
Berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa pada kesempatan yang baik ini Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta melalui Bagian Proyek Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta Tahun Anggaran 2004 untuk yang kesekian kalinya dapat menyusun buku Informasi Ceramah/ Diskusi Museum dengan judul **"Peranan Museum Dalam Pendidikan Sejarah"**. Buku ini berisi tentang rangkuman makalah yang pernah dipresentasikan sejarawan dihadapan para peserta umum di Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta maupun ditempat lain. Kegiatan tersebut diikuti oleh berbagai kalangan baik dari para guru, sejarawan, tokoh masyarakat, pelaku sejarah dan mahasiswa maupun pelajar.

Semoga buku sederhana ini dapat menambah informasi khasanah sejarah perjuangan bangsa Indonesia bagi masyarakat umumnya. Kami percaya masih terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penyusunan buku ini. Oleh karena itu kami tak lupa mohon saran dan masukan yang positif dari para pembaca untuk peningkatan penyusunan mendatang.

Kepada semua pihak yang telah membantu proses pembuatan buku ini kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaiku Wr.Wb.

Yogyakarta, Juli 2004
Kepala,



Drs. WAHYU INDRASANA
NIP. 130924348

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Sambutan Pemimpin Bagian Proyek Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta	iv
Sambutan Kepala Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta	v
Daftar Isi	vi
 BAB I PENDAHULUAN	 1
BAB II TUGAS DAN FUNGSI MUSEUM	3
BAB III A. FUNGSIONALISASI MUSEUM BAGI PENGEM- BANGAN DAN PELESTARIAN NILAI-NILAI . PENDIDIKAN SEJARAH	5
1. Nilai-Nilai Kejuangan Bangsa dan Pelestariannya Oleh : Sardiman AM	5
2. Peranan sejarah dalam Pendidikan	14
Oleh : Drs. H. Sugito	14
3. Peranan Pejuang dulu , sekarang dan esok	19
Oleh : Koesnadi Harjosoemantri	19
4. Peranan Laskar-Laskar Perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan	32
Oleh : Prof. DR. PJ. Suwarno	32
5. Tentara Pelajar dan partisipasinya Nasionalis kontektual Oleh : Suhartono W. Pranoto	42
6. Pelajar Perananmu Kini Oleh : Nur Fadliasari ...	50
7. Relevansi Semangat SO 1 Maret dengan upaya menggugah persatuan dan kesatuan	52
Oleh : Markhaban Fakih	52
8. Otonomi daerah dalam perspektif sejarah	55
Oleh : Drs. Sudomo Sunaryo	55
9. Perempuan masa kini antara idialitas dan hedonitas Oleh : Tri Insani	63

10.	Kepemimpinan Nasional Indonesia sekarang ini Oleh : Prof. DR. Ki Supriyoko , M. Pd	68
11.	Konsep kekuasaan dulu dan sekarang..... Oleh : G Moedjanto	73
12.	Pendidikan di Indonesia dalam perspektif Sejarah Oleh : Prof.DR.Joko Suryo	78
13.	Koleksi Museum Media Belajar Siswa	
	Oleh : V. Agus Sulistya, S.Pd	91
14.	Museum Benteng Yogyakarta media penunjang kurikulum Berbasis kompetensi	
	Oleh : Drs. Suharja	102
BAB IV B.	PENDIDIKAN POLITIK	106
1.	Peranan Hukum Dalam menanggulangi Disentrali- sasi Bangsa	
	Oleh : Prof. DR. Muchan , SH	106
2.	Kemajemukan Masyarakat dan Pendidikan Politik Oleh : Arie Sujito	112
3.	Pasang Surut Parpol (Sebuah catatan dalam pelak- sanaan Demokrasi)	118
	Oleh : H. Markhaban Fakhri	
4.	Pokok-pokok gagasan Pendidikan Politik, Pemilu dan demokrasi.	
	Oleh : Dadang Juliantara	122
5.	Integrasi Nasional dalam perspektif Politik	
	Oleh : G Moedjanto	133
6.	Di Atas Dasar yang Goyah	
	Oleh : KH. Muhaimin	139
7.	Potensi Perempuan dalam pemilu 2004	
	Oleh : Nur Aziza	142
BAB V.	PENUTUP	149
	<i>Lampiran-Lampiran.</i>	<i>150</i>

BAB I

PENDAHULUAN

Ada suatu pelajaran yang dapat kita petik dan kita ambil hikmahnya dari sebuah ungkapan yang dikemukakan oleh Cicero bahwa *“ Sejarah adalah saksi dari sang waktu, obor dari kebenaran, nyawa dari ingatan, guru dari penghidupan, dan pembawa warta dari masa ke masa ”*. Sejarah merupakan peristiwa yang benar-benar terjadi di masa lalu yang berkaitan dengan seluruh aspek kehidupan dari suatu masyarakat. Hal itu tidak dapat kita pungkiri. Akan tetapi kita juga tidak dapat mengelak bahwa proses perjalanan sejarah suatu bangsa tidak datang begitu saja. Kondisi yang ada pada masa sekarang ini merupakan kelanjutan dari masa lalu. Sedang masa yang akan datang adalah hasil dari proses pembentukan yang terjadi di masa kini.

Dengan demikian antara masa lalu, masa kini dan masa akan datang memiliki hubungan yang erat sekali. Sehingga walaupun masa lalu itu sudah terjadi, tidak berarti masa lalu itu sudah tidak berguna bagi masa sekarang. Peristiwa di masa lalu tentu memberikan pengalaman bagi kita untuk menilai apa yang harus tetap kita pertahankan dan apa yang perlu kita tinggalkan. Karena dimensi masa lalu itu memiliki sisi baik dan sisi buruk. Begitu pula dimensi kekinian merupakan pondasi dan akan tercatat pada lembaran sejarah di masa yang akan datang.

Adalah merupakan suatu hal yang naïf bagi suatu bangsa apabila bangsa itu membuat suatu kesalahan yang sama seperti yang telah dilakukan di masa lalu. Ini berarti bahwa bangsa itu tidak bisa menghargai sejarah dan tidak dapat belajar dari sejarah bangsanya. Namun juga merupakan suatu kesalahan besar apabila kita terlalu terlena dengan kebesaran-kebesaran dan kejayaan-kejayaan masa lampau tanpa mau berbuat apa-apa.

Untuk itulah perlu adanya keseimbangan antara yang sudah kita peroleh dan yang akan kita capai di masa yang akan datang. Keseimbangan dalam identitas dan jati diri bangsa yang selalu berkesinambungan dari masa lalu, sekarang dan yang akan datang dapat terlaksana apabila ada sarana untuk mengkaji dan menilai kejadian-kejadian dari sejarah di masa lalu. Hal itu akan bermanfaat untuk mengotrol hal yang perlu dan tidak perlu kita lakukan. Juga bermanfaat untuk menggali nilai-nilai positif dan negatif dari kejadian yang telah berlalu.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas maka buku ini dimaksudkan untuk memperkenalkan keberadaan Museum Benteng Vredenburg Yogyakarta kepada masyarakat sekaligus untuk menjebatani agar tidak ada mata rantai yang terputus dalam proses penanaman dan pembentukan serta pelestarian jati diri dan identitas bangsa Indonesia dari generasi pendahulu kepada generasi sekarang dan generasi selanjutnya.

Buku ini memuat informasi mengenai makalah ceramah/diskusi yang pernah dilakukan oleh Museum Benteng Vredenburg Yogyakarta baik diadakan sendiri maupun bekerja sama dengan instansi dan organisasi kemasyarakatan/profesi. Dari isi ceramah itu kemudian kita kelompokkan ke dalam beberapa bab. Pertama Bab I merupakan Pendahuluan. Sebelum membicarakan isi ceramah terlebih dulu diawali dengan satu bab yang memaparkan tugas dan fungsi museum Benteng Vredenburg Yogyakarta merupakan Bab II, Bab III tentang makalah pelestarian nilai sejarah, kemudian dilanjutkan dengan Bab IV, berisi tentang makalah pendidikan politik di Indonesia dan Bab V merupakan bab penutup yang merupakan kesimpulan dari keseluruhan materi ceramah.

BAB II

TUGAS DAN FUNGSI MUSEUM

Sesuai dengan Kamus umum Bahasa Indonesia kata Museum berarti Gedung yang dipergunakan sebagai tempat untuk pameran tetap benda-benda yang patut mendapat perhatian umum, seperti peninggalan sejarah, seni dan ilmu pengetahuan : tempat menyimpan barang-barang kuno. Akan tetapi barang kuno yang dimaksud adalah bukan sekedar barang kuno saja tetapi yang memiliki nilai khas, spesifik, unik dan mewakili zamannya. Museum lain dengan ruang kolektor barang kuno, namun lebih memiliki nilai pengetahuan yang menggambarkan proses sejarah suatu bangsa. Museum Benteng Vredenburg Yogyakarta merupakan museum khusus perjuangan sehingga barang-barang yang dipamerkan adalah benda-benda yang bernilai sejarah, terutama sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam merintis , merebut , mempertahankan dan mengisi kemerdekaan.

Museum Benteng Vredenburg Yogyakarta sesuai dengan SK Menbudpar No. 48/OT.001/MKP/2003 tertanggal 5 Desember 2003 maka tugas dan fungsi yang diemban adalah sebagai berikut :

1. Tugas :

Museum Benteng Vredenburg Yogyakarta mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, perawatan, pengawetan, penelitian, penyajian, penerbitan hasil penelitian, dan memberikan bimbingan edukatif cultural mengenai benda sejarah perjuangan bangsa Indonesia di wilayah Yogyakarta.

2. Fungsi :

Pelaksanaan pengumpulan, perawatan dan pengawetan, benda yang bernilai sejarah, budaya dan ilmiah yang berhubungan dengan peristiwa sejarah perjuangan bangsa Indonesia di wilayah Yogyakarta;

- a. Pelaksanaan penelitian, penyajian, penerbitan hasil penelitian dan bimbingan edukatif tentang benda yang bernilai sejarah, budaya dan ilmiah, yang berhubungan dengan peristiwa sejarah perjuangan bangsa Indonesia di wilayah Yogyakarta;
- b. Pelaksanaan urusan perpustakaan dokumentasi dan pengkajian ilmiah;
- c. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta.

3. Visi :

Mewujudkan peran Museum sebagai medium yang multifungsional bagi pelestarian, penyajian, pemanfaatan, pengembangan, sejarah dan budaya yang mengakar kepada jadi diri serta membangun karakter generasi muda yang cerdas, beradab, berlian, menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan.

4. Misi :

- a. Melestarikan benda-benda peninggalan sejarah dan budaya untuk kepentingan studi, ilmu dan rekreasi.
- b. Menyajikan tata pameran benda-benda peninggalan sejarah dan budaya dengan nuansa edutainment.
- c. Mengembangkan pembelajaran ilmu sejarah secara informative, kreatif, inovatif, dan atraktif.
- d. Menyediakan sarana dan prasarana bagi pengembangan pembelajaran ilmu sejarah dan kebudayaan pada umumnya.
- e. Menjadikan museum sebagai media untuk mengetahui , mengenal, memahami dan menghayati sejarah dan jati diri bangsa.

BAB III

A. FUNGSIONALISASI MUSEUM BAGI PENGEMBANGAN DAN PELESTARIAN NILAI-NILAI PENDIDIKAN SEJARAH

NILAI-NILAI KEJUANGAN BANGSA DAN PELESTARIANNYA

Oleh : Sardiman AM

Pengantar

Indonesia dikenal sebagai negara yang begitu korup di dunia. Bahkan budaya korup ini menjadi salah satu penyebab terjadinya krisis yang berkepanjangan. Mengapa bangsa ini menjadi korup, mengapa krisis ini berlangsung dan berkepanjangan. Pertanyaan ini dapat diberikan jawaban antara lain orang-orang Indonesia itu gagal dalam memahami sejarah perjuangan bangsa. Mereka tidak memahami dan melestarikan nilai-nilai perjuangan para pendahulunya. Jawaban-jawaban ini tidak dibuat-buat atau dipaksakan agar materi dengan topik dan paparan ini . sekali lagi tidak!

Marilah kita renungkan secara mendalam. Kalau seseorang itu memiliki kesadaran sejarah, paham dan melestarikan nilai-nilai perjuangan dengan ceceran darah para pahlawan, linangan air mata manusia, pengorbanan harta benda bahkan rakyat banyak, serta kerja keras bahu membahu diantara komponen bangsa. Apabila seseorang ingat dan menghayati akan hal itu, sebagai manusia normal tentu akan melakukan korupsi, tidak akan melakukan kerusakan di bumi Indonesia yang elok dan merdeka sebagai karya besar seluruh bangsa dan para pendahulu kita. Dengan ilustrasi ini yang hendak saya tegaskan adalah bahwa nilai-nilai perjuangan itu memiliki makna yang penting dalam upaya melestarikan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Nilai-nilai perjuangan adalah suatu yang kompleks yang bisa menyangkut baik dari yang spiritual sampai ke yang fisik-ketrampilan, dari yang ideal-filosofis sampai ke yang teknik operasional sebagai produk dari aktivitas perjuangan bangsa Indonesia. Perjuangan bangsa itu terus berlangsung dari hari ke hari, dari tahun ke tahun bahkan dari periode ke periode, sejak dari dulu sampai sekarang bahkan untuk masa-masa mendatang. Setiap periode bisa saja melahirkan nilai-nilai yang berbeda seiring dengan tuntutan dan tantangan zaman. Dengan demikian nilai-nilai perjuangan itu merupakan formulasi pengalaman yang cukup lama bagi bangsa Indonesia dalam menjalani suatu kehidupan, sehingga dapat dijadikan sebagai kerangka acuan dalam pembinaan masyarakat. Oleh karena itu nilai-nilai perjuangan penting untuk terus dilestarikan.

Sehubungan dengan hal tersebut maka pada tulisan singkat ini akan dikaji topik tentang “Nilai-nilai Perjuangan Bangsa dan Pelestariannya”. Setelah pengantar berturut-turut akan di paparkan : Sekilas tentang Nilai-nilai perjuangan, upaya pelestarian dan terakhir penutup.

Sekilas Tentang Nilai-Nilai Perjuangan

Nilai dalam bahasa latin Valere dapat diartikan : harga, hal-hal yang penting atau berguna bagi manusia. Nilai adalah pengertian dan pensifatan yang digunakan untuk memberikan penghargaan suatu barang, keadaan atau obyek tertentu. Fraenkel menjelaskan bahwa nilai sebagai standar penuntun perilaku seseorang dalam menentukan sesuatu itu apa baik, indah, efisien dan seterusnya. Dalam kontek ini ada dua pandangan mengenai nilai.

- Pertama** : Nilai adalah suatu yang secara instrinsik melekat pada obyek itu sendiri tanpa memperhatikan perasaan, penafsiran dan penghargaan seseorang. Jadi sifatnya obyektif.
- Kedua** : Pandangan yang mengatakan bahwa nilai itu tergantung pada seseorang yang menangkap, merasakan dan mensifatinya. Sifatnya subyektif.

Namun harus diingat sekalipun ada nilai obyektif apalagi yang obyektif, tetap ada nilai-nilai umum yang diinginkan atau dituju oleh semua manusia. Inilah yang dikatakan sebagai nilai dasar yang timbul berdasarkan kodarat manusia.

Dari uraian tersebut dapat ditegaskan bahwa nilai adalah suatu yang berharga, sesuatu yang bermakna, sesuatu yang dapat menimbulkan kepuasan bagi kehidupan manusia. Dari nilai-nilai yang sekian banyak itu ada nilai-nilai yang bersifat universal.

Kemudian apa yang dimaksud dengan nilai-nilai perjuangan ? Perjuangan dapat diartikan perihal juang, hal ihwal perjuangan. Perjuangan adalah aktifitas manusia untuk menghadapi berbagai tantangan yang mengandung resiko dan bahaya dengan harapan dapat mengatasi berbagai tantangan dan bahaya itu sehingga survive dan mendapatkan kemenangan.

Dalam perspektif kesejarahan, perjuangan sudah dimulai sejak kurun yang lama. Dari pemahaman masyarakat secara umum, perjuangan itu dilakukan dalam angka melawan penindasan dan pemaksaan kehendak dari kekuatan asing, dari kekuatan penjajah. Misalnya perjuangan melawan portugis, dominasi VOC, penindasan kolonial Belanda, kesewenang-wenangan tentara Jepang. Semua komponen bangsa dipimpin oleh para tokohnya terus berjuang dengan penuh semangat. Dengan segala kekuatan daya dan dana, saling bahu membahu, mengorbankan jiwa raga untuk mengusir kaum penjajah. Semua berjuang tanpa pamrih, kecuali untuk sebuah kemerdekaan. namun begitu harus diingat bahwa perjuangan itu tidak hanya sampai mencapai kemerdekaan tetapi terus berlangsung dalam rangka mengisi kemerdekaan agar tercapai masyarakat yang adil dan makmur, sejahtera, aman dan sentosa di bawah lindungan Tuhan Yang Esa. Untuk memahami karakteristik perjuangan bangsa Indonesia dalam kurun waktu yang panjang itu dapat dibagi kedalam periode. Misalnya periode sebelum tahun 1908, tahun 1908-1945, tahun 1945-1950, 1950- 1959, 1959-1965 , 1966-1998 dan begitu seterusnya. Pada periode sebelum tahun 1908 menonjolkan heroisme, patriotisme, semangat jihad dan mengorbankan jiwa raga. Pada periode 1908-1945 merupakan masa

pergerakan nasional, sebagai “ *Atc of changing position* “, menekankan pada semangat nasionalisme, berjuang dengan organisasi yang mengedepankan persatuan dan kesatuan, dan kebersamaan. Pada periode 1945 –1950 mengumandangkan pada semangat kemerdekaan, menegakkan disiplin dan rela berkorban demi kesatuan bangsa. Pada periode tampil tokoh seperti Ir. Soekarno yang kemudian menjadi presiden RI pertama, Drs,. Moh. Hatta, Kolonel Sudirman. Sukarno sebagai tokoh revolusioner dan mendambakan persatuan bangsa. Moh.Hatta mengedepankan kehidupan yang demokratis. Sementara Sudirman adalah tokoh yang mumpuni dan komprehensif. Ia dibentuk dan dibesarkan dari kalangan sipil. Pangalaman di lingkungan sipil dan ketokohnya dilingkungan militer telah bersama-sama mengalir pada diri Sudirman. Ia tampil sebagai tokoh sederhana, penuh disiplin, sangat religius, santun dan istiqomah serta rela berkorban, juga mengajarkan landasan dan filosofi perjuangan yakni percaya pada diri sendiri, ikhlas mempertahankan tanah air dan pantang menyerah. Pada periode 1950-1959 menonjolkan semangat kebebasan dan demokratisasi. Pada periode 1959 –1965 mengedepankan semangat anti kolonialisme (barat), dan periode 1966-1998 menitik beratkan pada aspek stabilitas dan pembangunan ekonomi.

Dengan mencermati uraian diatas dapatlah kiranya dirumuskan nilai-nilai kejuangan bangsa Indonesia . Nilai-nilai itu misalnya :

- Disiplin , rela berkorban dan tanpa pamrih
- Semangat jihad dan heroisme
- Nasionalisme dan patriotisme
- Persatuan-kesatuan dan kebersamaan
- Demokrasi
- Konsisten/istiqomah dan pantang menyerah
- Percaya pada diri sendiri
- Anti kolonialisme/ Neokolonialisme
- Semangat membangun

Perlu kiranya dicatat bahwa nilai-nilai kejuangan yang mencirikan suatu periode perjuangan tertentu itu bersifat statis dalam arti hanya menjadi

ciri periode tertentu saja, tetapi bisa berlanjut dan berkembang menjadi ciri pada periode-periode berikutnya. Kalau begitu nilai-nilai kejuangan itu merupakan pengalaman yang cukup matang bagi bangsa Indonesia, karena sudah ada dan berlangsung dalam kurun waktu yang lama. Tentunya hal ini menjadi modal yang berharga dalam mengarungi kehidupan sebagai bangsa kalau bangsa ini mau belajar sejarah sendiri.

Upaya Pelestarian

Nilai-nilai perjuangan bangsa seperti rela berkorban dan tanpa pamrih, semangat nasionalisme, patriotisme dan semangat pantang menyerah dan percaya diri sendiri, serta semangat membangun, adalah nilai-nilai luhur bangsa yang pantas untuk selalu kita ingat. Nilai-nilai kejuangan itu sudah menyatu dan tidak dapat dipisahkan dari sejarah bangsa. Karena itu wajar kalau-kalau nilai-nilai kejuangan itu dijadikan fondasi bagi tegaknya bangsa dan negara. Nilai-nilai kejuangan memiliki makna penting bagi terwujudnya cita-cita kemerdekaan, sehingga tidak terlalu muluk kalau nilai-nilai kejuangan ini menjadi pelajaran dan bagian penting dari kerangka acuan pembinaan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Mengingat yang sangat penting itu maka nilai-nilai kejuangan harus dilestarikan dan ditanamkan kepada generasi penerus. Bagaimana upaya melestarikan nilai-nilai kejuangan tersebut. Tentunya banyak cara. Berikut diberikan dua contoh.

1. Melalui Pembelajaran Sejarah

Sejarah adalah persoalan manusia dan kemanusiaan. Dikatakan oleh Soedjatmoko bahwa sejarah merupakan ilmu kemanusiaan yang sangat berperan penting dalam penyusunan kerangka moral dan imajinasi suatu action. Sejarah berperan dalam membina empati dan toleransi, serta suatu kemampuan untuk mengidentifikasi diri sebagai suatu bangsa. Jadi belajar sejarah adalah sebuah proses untuk memahami keberadaan

dirinya. Kalau demikian sejarah itu dikenal dengan persoalan-persoalan moral dan kemanusiaan. Wang Gungwu Bahwa sejarah itu peristiwa masa lalu yang banyak mengandung dimensi moral. Dalam sejarah itu penuh dengan peristiwa sebagai konsekwensi dari aktivitas manusia yang bersifat multidimensional sehingga menjadi cermin, contoh dan teladan, peringatan dan pelajaran bagi manusia dalam menjalani hidup dan kehidupan.

Pembelajaran sejarah adalah suatu proses penyampaian informasi kepada subyek belajar tentang berbagai peristiwa yang didalamnya menyangkut hidup dan kehidupan manusia. Setiap orang dapat belajar tentang persoalan baik buruk, halal dan haram, kemerdekaan dan penindasan, demokrasi –otoriter, nasionalis dan komunis, tradisional dan modern, barat –timur pesisir dan pedalaman maritim dan agraris dan para pemimpin dan rakyat banyak serta seterusnya. Dari berbagai pelajaran itu seseorang akan mengenali dan menghayati nilai-nilai kejuangan seperti telah dijelaskan di depan, dapat selalu dikenal dan bahkan bisa dicontoh. dengan demikian nilai-nilai kejuangan itu akan terus teraktualisasikan lewat pembelajaran sejarah. Untuk ini memang diperlukan suatu proses pembelajaran yang sungguh-sungguh.

2. *Peran Museum*

Museum memiliki peran penting dalam upaya pelestarian nilai-nilai kejuangan bangsa. Sebab museum dapat diartikan sebagai lembaga atau bangunan histories cultural yang didalamnya penuh dengan informasi dan pengetahuan yang sangat penting artinya bagi perkembangan masyarakat. Ini mengandung arti bahwa museum menjadi wahana dari suatu proses pendidikan. Terjadilah proses interaksi anatara benda-benda koleksi dengan subyek didik (para pengunjung). dengan melihat dan menghayati hakikat dan keberadaan benda-benda koleksi dan jejak-jejak sejarah itu dapat memberikan pelajaran, motivasi dan

inspirasi untuk bersikap atau bertindak bagi pengunjung . Berkunjung ke museum juga dapat menumbuhkan persona pelawatan.

Dari sekian koleksi dan jejak-jejak sejarah itu banyak berkaitan dengan sejarah perjuangan bangsa. Bagi para pengunjung yang melakukan interaksi dengan koleksi yang berkaitan dengan sejarah perjuangan bangsa diharapkan dapat mengenal, dan berdialog dengan berbagai koleksi dan jejak-jejak sejarah, sehingga mereka benar-benar menghayati nilai-nilai kejuangan yang terkandung di dalam suatu peristiwa sejarah perjuangan bangsa.

Sebagai contoh, seorang berkunjung ke museum kemudian menyaksikan diorama yang berisi tiruan Pangeran Diponegoro sedang berunding dengan Belanda. Setelah mencermati dan menghayati diorama tersebut , seseorang tadi akan mengingat sejarah perjuangan Pangeran Diponegoro yang sangat heroik, sampai Belanda bingung. Akhirnya Belanda menggunakan tipu muslihat dengan mengajak berunding Pangeran Diponegoro bertempat di Magelang. Saat sedang berunding itulah Pangeran Diponegoro ditangkap dan diasingkan ke Manado. Demikian Pangeran Diponegoro rela berkorban, tetap konsisten berjuang demi bangsa dan tanah air melawan kezaliman dan kemunafikan kaum penjajah.

Misalnya, seseorang yang sedang berkunjung ke museum kemudian melihat kursi alat dan tempat menandu saat Sudirman memimpin perang gerilya. Pengunjung itu mulai mengenali dan berdialog dengan kursi tersebut. Dengan berdialog itu seseorang tadi akan mengingat sejarah perjuangan Sudirman dengan nilai-nilai kejuangannya seperti keuletan, kedisiplinan, semangat jihad dan rela berkorban, istiqomah dan pantang menyerah, percaya pada diri sendiri, tanpa pamrih semata-mata demi bangsa dan negara, dengan tetap tawakal kepada Tuhan Yang Esa.

Berikutnya seorang pengunjung menyaksikan peralatan pengeras suara yang dulu digunakan oleh Bung Karno dalam pidato. Dengan berdialog dengan peralatan itu pengunjung menjadi ingat

bagaimana ketokohan dan sejarah perjuangan Bung Karno. Bung Karno adalah Orator ulung, seorang nasionalis tulen dan presiden RI pertama., dengan nilai-nilai kejuangan seperti : pengorbanan semangat nasionalisme, patriotisme dan heroisme, persatuan dan kesatuan, anti kolonialisme/neokolonialisme.

Dari penjelasan itu menunjukan bahwa museum menjadi wahana pelestarian nilai-nilai kejuangan bangsa. Di museum itulah terekam dan tersimpan nilai-nilai kejuangan yang sewaktu-waktu dapat diaktualisasikan dan disosialisasikan lewat layanan kepada para pengunjung, sehingga para pengunjung dapat mengenali dan mengambil pelajaran dari berbagai nilai kejuangan tersebut. Tentunya untuk mencapai makna, museum dapat menjadi wahana pelestarian nilai-nilai kejuangan seperti diilustrasikan di atas, tidaklah mudah. Perlu ada kreativitas pelayanan dan penataan yang menarik.. Misalnya pada yang sudah ada deskripsinya, perlu ada pertanyaan atau ajakan kepada para pengunjung untuk berdialog, contoh : bagaimana sikap anda pada tindakan Belanda terhadap Pangeran Diponegoro, nilai-nilai apa yang anda peroleh dengan memahami perjuangan Sudirman saat memimpin perang gerilya?. Dan seterusnya, atau ilustrasi rekaman , atau oleh pemandu.

Disamping dengan model tersebut, untuk melestarikan nilai-nilai kejuangan bangsa, museum secara aktif dapat menyelenggarakan program-program tertentu. Misalnya mengadakan seminar khusus bertema “Nilai-nilai kejuangan”. Sebelum atau sesudah seminar peserta dapat mengunjungi koleksi-koleksi pada museum tersebut. Museum juga dapat menyelenggarakan pameran koleksi yang terkait dengan sejarah perjuangan bangsa. Museum juga bisa menerbitkan episode-episode singkat tentang koleksi-koleksi yang berhubungan dengan tokoh-tokoh pejuang dengan nilai-nilai kejuangannya

Penutup

Nilai-nilai perjuangan adalah dari aktivitas perjuangan bangsa. Nilai-nilai perjuangan merupakan suatu pengalaman kolektif bangsa dalam kurun waktu yang lama. Karena itu secara historis cultural nilai-nilai perjuangan itu menjadi nilai luhur bangsa yang sangat bermakna bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu perlu terus diaktualisasikan dan dilestarikan.

Berbagai cara dapat dilakukan pelestarian nilai-nilai perjuangan. Melalui pembelajaran sejarah dan kunjungan ke museum merupakan dua cara yang cukup efektif. Melalui pembelajaran sejarah, para subyek belajar diajak untuk memahami dan mengkritisi berbagai peristiwa sejarah sehingga dapat menghayati makna dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Dengan kunjungan ke museum para pengunjung dapat berdialog dengan berbagai koleksi dan jejak-jejak yang terkait dengan sejarah perjuangan bangsa. Melalui proses dialog itu akan timbul pemahaman dan penghayatan terhadap berbagai peristiwa sejarah dan nilai-nilai perjuangan yang ada dibalik koleksi tersebut. Hal ini semua sangat tergantung pada format, desain dalam koleksi dan kreatifitas layanan yang diberikan oleh museum.

Daftar Bacaan

- Ahmad Syafii Maarif, (2001), Soekarno (1901-1970) : Antara Kebesaran dan Kekurangannya, Makalah, Jakarta.
- Sardiman AM, (1984). "Piranti sejarah Pergerakan Nasional", Makalah Yogyakarta
- _____, (1993) " Sejarah dan Tantangan Masa Depan " Yogyakarta.
- _____, (2000), Panglima besar Sudirman : Kader Muhammadiyah, Yogyakarta, Adi Cita.
- Sodiq A Kuntoro (1995), Kepahlawanan, Warta IKIP. No. 11 vol. XXIX
- Soejatmoko (1986). Dimensi Manusia Dalam Pembangunan, Jakarta : LP3ES.
- Soenarjati & Cholisin (1989, Konsep dasar Pendidikan Moral Pancasila, Yogyakarta : Lab. PMPKn, FPIPS IKIP Yogyakarta- Tiara Wacana.
- Soeprapto (1994), " Nilai-Nilai Pancasila Dalam Pembangunan Budaya, Makalah, Yogyakarta.

PERANAN SEJARAH DALAM PENDIDIKAN

Oleh : Drs. H. Sugito, M. Si

A. PENDAHULUAN

Dalam Suatu kisah, sekelompok serdadu Jepang yang terperosok ke dalam hutan tidak tahu kalau Perang Dunia II telah berakhir. Mereka masih dalam keadaan siap siaga dalam kondisi perang. Usaha untuk mereka selalu gagal, karena mereka selalu menghindar dan siap menembak siapa saja yang mendekat. Problem ini akhirnya sampai kepada seorang pakar sosiologi, yang mengetahui bahwa ketaatan warga Jepang terhadap bendera dan lagu kebangsaan sangat tinggi. Maka usaha untuk menangkap dilakukan tidak dengan perang, tetapi dengan memasang bendera Jepang dan menyanyikan lagu kebangsaan Jepang. Begitu mereka mendengar lagu tersebut dan mengetahui ada bendera Jepang dikibarkan, maka seketika mereka mendekat dan menghormat bendera itu. Akhirnya terjadi dialog dan serdadu itu dapat diajak berkomunikasi, dan mau diajak masuk ke kota dan mendapat informasi bahwa perang telah selesai.

Dilain pihak setelah Jepang kalah perang dengan Sekutu pada perang Dunia II, dalam salah satu rapat evaluasi perang, Kaisar Hirohito menanyakan kepada para anggota kabinet apakah masih ada guru yang hidup. Pada Jenderal dan petinggi tentara agak tersinggung dengan pertanyaan itu, mengapa kaisar tidak bertanya masih berapa jenderal yang masih hidup. Di jawab oleh kaisar bahwa saat ini kita sudah kalah perang, Jepang sudah terpuruk, ekonomi hancur, rasa kebangsaan luntur. Satu-satunya cara untuk meningkatkan citra Jepang dimata dunia, baik dari segi ekonomi, politik dan kebangsaan menjadi bangsa Jepang hanya melalui pendidikan. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah Jepang dengan cara dengan meningkatkan kualitas pendidikan. Kebijakan antara lain anggaran pendidikan ditingkatkan, guru-guru kwalitasnya ditingkatkan dengan studi lanjut bahkan ke luar negeri, gaji guru ditingkatkan sehingga

orang-orang cerdas berniat menjadi guru, dan fasilitas pendidikan dicukupi. Selain mengajar mata pelajaran sesuai dengan bidangnya, guru diberi tugas untuk mengembalikan kebanggaan warga Jepang terhadap negaranya. Apa yang terjadi, ternyata dalam kurun waktu 20 tahun, kualitas pendidikan di Jepang meningkat, sumber daya manusia menjadi bagus, dan akhirnya ekonomi Jepang meningkat demikian pesatnya, bahwa pada tahun 1969 kita telah mulai “dijajah” dengan teknologi Jepang. Mulai dari sepeda motor, radio, televisi, kamera, mobil, dan produk Jepang menguasai pasaran di Indonesia, bahkan menguasai pasaran dunia.

Dua kutipan peristiwa sejarah tersebut menunjukkan bahwa peranan guru dan proses pengajaran dapat mempengaruhi karakter bangsa dan mampu meningkatkan loncatan ekonomi yang spektakuler, dari negara yang terpuruk menjadi negara yang maju dan produknya menguasai pasaran dunia, kecintaan warga Jepang terhadap negaranya sangat tinggi.

B. SEJARAH SEBAGAI CERMIN

Setiap individu, kelompok dan institusi senantiasa memiliki sejarah dirinya. Sejarah merupakan catatan peristiwa dalam hidupnya. Kita mengenali biografi maupun autobiografi, pada dasarnya adalah suatu sejarah perjalanan hidup seseorang. Setiap lembaga atau institusi selalu mencatat dan menulis tentang riwayat institusi tersebut, inipun sebenarnya merupakan sejarah organisasi itu. Penulis biografi atau autobiografi tentu tidak mampu mengungkapkan peristiwa pelaku secara sepenuhnya, subyektivitas penulis tentu akan muncul.

Di era globalisasi ini, seseorang mampu mengetahui peristiwa yang terjadi di negara lain dalam tempo singkat, bahkan bersamaan. Kejadian yang terjadi di negara lain dapat berpengaruh sangat cepat terhadap peristiwa di dalam negeri. Kita mengetahui bahwa dari kejadian itu, kita dapat mengambil suri teladan pada diri kita maupun institusi kita. Kalau kita melihat dan membaca sejarah diri kita, sejarah institusi kita, sejarah perjalanan negara kita, dan kita mampu merenungkan peristiwa-peristiwa

itu, maka pada dasarnya kita bercermin terhadap peristiwa yang telah kita lakukan. Tentu kita akan melihat dan sering bertanya, mengapa sesuatu hal tersebut terjadi pada diri kita, terjadi pada lembaga kita, dan terjadi pada negara kita. Sayangnya peristiwa yang sudah terjadi tidak dapat dianulir atau dihindari lagi, yang dapat kita lakukan menganalisis peristiwa sejarah itu, sehingga kalau terjadi gejala atau kasus yang sama, kita akan mampu belajar dari peristiwa sejarah itu. Jangan sampai kita terantuk batu yang kedua kali.

C. PENDIDIKAN DI SEKOLAH

Pada era kurikulum 1974, pelajaran Sejarah merupakan pelajaran yang penting dan merupakan pelajaran yang diminati. Pelajaran sejarah dijadikan alat untuk memberikan informasi kepada para siswa dan dijadikan alat untuk menanamkan cinta tanah air. Pada waktu itu dibedakan pelajaran sejarah Indonesia dan sejarah Dunia (Sejarah Umum). Manakala guru yang mengajarkan pintar, maka akan mampu menjadikan siswa menjadi siswa yang kritis dan mampu menumbuhkan cinta tanah air. Pada waktu itu semangat nasionalisme dan semangat membangun sangat tinggi, begitu pula kebanggaan terhadap Republik Indonesia sangat kuat. Di era tahun delapan puluhan, di era Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dijabat oleh Prof. Dr. Nugroho Notosusanto, bahkan muncul mata pelajaran baru yang diberi nama Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa di luar mata pelajaran sejarah Indonesia dan sejarah Umum. Setiap siswa menerima mata Pelajaran tersebut, baik di SD, SLTP, SMU IPS, SMK. Cinta tanah air diajarkan lewat Sejarah Nasional Indonesia dan Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa. Memang ada kritik dari berbagai pihak, karena menterinya orang sejarah maka pelajaran sejarah mendapat porsi yang besar.

Saat ini berlaku kurikulum 1994 dengan beberapa suplemennya. Mata pelajaran sejarah mendapat porsi yang cukup lumayan, namun Pelajaran Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa dihilangkan, dan setiap kelas di SMU baik jurusan IPA maupun IPS mendapat pelajaran sejarah dua jam

setiap minggu, yang disebut Sejarah Nasional dan Sejarah Dunia. Namun rasanya pelajaran sejarah kurang begitu diminati oleh siswa, mungkin karena pengaruh perkembangan teknologi, sehingga kita berada dalam hidup serba materi dan hedonisme. Bagaimana dengan kurikulum 2004 nanti, sampai saat ini belum final, namun ada gejala mata pelajaran sejarah akan dikurangi. Merupakan perjuangan kita semua untuk senantiasa memantau dan mengusulkan dengan alasan yang “maton” supaya mata pelajaran sejarah tetap eksis dan mampu mendidik anak kita menjadi generasi yang mencintai tanah air dan generasi yang kritis.

D. MANFAAT SEJARAH

Dengan mengerti dan membawa peristiwa sejarah, maka seseorang akan mengerti mengapa peristiwa itu terjadi, sehingga dalam diri seseorang yang membaca sejarah akan mampu merekonstruksi kejadian itu dalam pikirannya. Untuk menanamkan hal seperti itu diperlukan guru sejarah yang memiliki cukup dan jiwa nasionalisme yang tinggi sehingga akan mampu menanamkan cinta tanah air. Disamping itu sejarah harus jujur dan objektif.

Secara lebih detail peranan sejarah dalam pendidikan adalah:

1. Sejarah, mampu menjelaskan mengapa peristiwa terjadi, sehingga dapat dijadikan pelajaran untuk masa-masa yang akan datang. Hal-hal yang sukses kita teladani, sedangkan kegagalan hendaknya menjadi cambuk yang tidak terulang lagi. Hendaknya kita tidak terantuk batu yang kedua kali.
2. Pendidikan sejarah mankala diajarkan dengan jujur dan objektif, akan mampu untuk mendidik anak untuk mencintai tanah air. Tentu hal ini tentu saja diperlukan guru sejarah yang profesional. Sementara ini sering terjadi guru-guru sejarah diambilkan sembarang guru yang tidak memiliki bekal yang cukup baik sejarah maupun metode mengajarkan sejarah.

3. Dalam kehidupan para tokoh, banyak sekali mengandung pelajaran sejarah. Bagi tokoh yang berhasil dijadikan idola bagi para pelajar, sedapat mungkin meneladani. Sebaiknya bagi tokoh yang gagal atau berlaku diluar norma yang benar , hendaknya dapat dijadikan contoh yang tidak baik, sehingga anak dan para siswa tidak menirunya.

E. PENUTUP

Hadirin para peserta sarasehan yang kami hormati. Demikian sekelimit masukan dari kami semoga mampu membangkitkan diri kita untuk senantiasa belajar dari sejarah dan mampu mendidik kita untuk berfikir kritis dan mampu menjadi warga negara yang mencintai tanah air.

PERANAN PEJUANG DULU, SEKARANG DAN ESOK

Oleh : Koesnadi Harjosoemantri

A. PENDAHULUAN

1. Corak perjuangan masing-masing pelajar pejuang sebagai generasi muda ditentukan oleh tantangan yang dihadapi di dalam zamannya. Generasi muda 1908 menghadapi tantangan untuk menggalang persatuan bangsa melalui didirikannya Boedi Oetomo, karena perjuangan yang dilakukan di masing-masing daerah ternyata tidak membawa hasil yang memuaskan.
2. Generasi muda 1928 memberi jiwa kepada perjuangan dengan mencetuskan sumpah pemuda yang menyatakan tekad bulat generasi muda mengenai satunya tanah air, bangsa dan bahasa, Indonesia.

Sumpah Pemuda ini merupakan perwujudan dari manifesto politik yang dicetuskan oleh PPI Nederland di Leiden pada tahun 1925 yang merupakan komitmen pemuda Indonesia terhadap perjuangan nasionalisme Indonesia.

3. Generasi muda tahun 1945 memberi dorongan kepada dicetuskannya Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Generasi muda mempertahankan kemerdekaan yang di Proklamasikan itu dalam kesatuan-kesatuan bersenjata, yaitu tentara pelajar (TP) dengan berbagai kesatuannya dan Cor Mahasiswa (CM). Dalam mengisi Kemerdekaan , generasi muda 1945 telah membentuk pemerataan pendidikan menengah di luar jawa melalui pengerahan tenaga mahasiswa (PTN) dalam kurun waktu 1951-1962 yang pada gilirannya telah mempengaruhi pula pemerataan pendidikan tinggi diluar jawa.

4. Generasi muda 1966 turut mematahkan dominasi PKI dan melahirkan Orba yang bertekad melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 dengan konsisten.
5. Generasi muda 1998 melancarkan gerakan reformasi yang merombak Orba yang ternyata bersifat sentralistik, kurang membuka partisipasi, koruptif dan kurang demokratis.
6. Generasi muda kini menghadapi tantangan yang jauh lebih rumit dibanding generasi-generasi muda sebelumnya. Tantangan yang dihadapi bangsa dan negara yang sedang ditengah-tengah arus globalisasi, sungguh tidaklah mudah. Dalam pada itu, pelaksanaan otonomi daerah belau dapat berjalan sebagai mana mestinya. Tantangan tersebut harus dihadapi dengan kemampuan profesional yang tinggi, dilandasi cinta tanah air yang mendalam serta iman dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Generasi muda yang akan mengemban tugas kepemimpinan, perlu memahami sikap keterbukaan, kebersamaan dan kemitraan.

B. PERJUANGAN PELAJAR DULU

1. Perjuangan Pemuda Pelajar generasi 1945 dalam rangka merebut dan mempertahankan Kemerdekaan merupakan saham yang sangat berarti bagi perjuangan bangsa Indonesia secara keseluruhan.
2. Kegiatan merebut Kemerdekaan yang dilaksanakan oleh pemuda pelajar sesungguhnya telah dimulai pada zaman Jepang dengan bentuk perjuangan yang terselubung (di bawah tanah). Pada waktu itu mahasiswa Jakarta IKA Daigaku (Fakultas Kedokteran di Jakarta) yang bermarkas di asrama Mahasiswa 10, telah menetapkan Idiologi yang disebut dengan Reine Juge Idiologie, cita-cita pemuda murni, suatu idiologi tanpa pamrih. Idiologi ini telah meresap ke dalam kalbu masing-masing anggota masyarakat prapatan 10, suatu kelompok pemuda yang sangat unik sifatnya,

mereka adalah bagian yang murni dari rakyat yang sepi ingin pamrih dan rela berkorban untuk rakyat. Mereka lebih mengutamakan kepentingan dan kebahagiaan rakyat dari pada kepentingan pribadi atau golongan. Dengan dimilikinya disiplin yang tinggi serta *Reine Jugend Ideologie*, mereka menjelma menjadi kelompok mahasiswa sebagai kesatuan ampuh yang memiliki kepercayaan teguh atas kemampuan diri sendiri untuk turut menggerakkan roda revolusi memelopori dan membakar semangat rakyat untuk berjuang. Kelompok inilah pula yang sibuk dan ikut serta menyusun dan membina kelompok-kelompok pemuda diseluruh kota Jakarta segera setelah kemerdekaan diproklamasikan, mengambil alih gedung-gedung penting beserta peralatannya dan alat angkutan, melaksanakan aksi tulisan/ coret-coret di jalanan, tembok-tembok, angkutan umum dan lain sebagainya, ikut serta dalam penyusunan aparatur negara seperti Komite Nasional Indonesia Pusat dan Badan Keamanan Negara (Cikal-bakal Tentara Nasional Indonesia) dan sebagainya.

3. Setelah kemerdekaan Republik Indonesia di proklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, para pelajar sepakat untuk mengadakan Konggres Pelajar Indonesia yang diadakan pada tanggal 25 sampai dengan tanggal 28 September 1945 di Yogyakarta. Konggres Pelajar I dibuka pada tanggal 25 September 1945 dengan rapat raksasa ditanah lapang Kridosono, yang dihadiri oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX, Paku Alam VIII, Pemimpin-pemimpin Komite Nasional daerah dan 8000 pemuda-pemuda pelajar sekolah Menengah Yogyakarta serta para utusan dari kota-kota seluruh Jawa dan Madura. Pada tanggal 28 September 1945 Kongres Pelajar I di tutup, dilanjutkan dengan rapat raksasa di stadion Kridosono, dimana dibacakan mosi dan keputusan kongres. Mosi yang dibacakan berbunyi sebagai berikut:

MENGINGAT:

- a. Kedudukan Negara Indonesia pada masa sekarang;
- b. Bahwa kemerdekaan Indonesia harus dipertahankan oleh segala lapisan masyarakat Indonesia
- c. Bahwa Pelajar-pelajar sekolah lanjutan merupakan satu lapisan besar dalam masyarakat Indonesia;

MENIMBANG:

Bahwa Pelajar Sekolah-sekolah Lanjutan sebagai Pemuda Indonesia berkewajiban berjuang bersama-sama dengan segala lapisan masyarakat untuk mempertahankan kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia.

MEMUTUSKAN

1. Kami adalah pelajar negara Republik Indonesia;
2. Menolak menjadi pelajar pemerintah lain dari pada Pemerintah Republik Indonesia;
3. Menyediakan tenaga; jiwa dan raga untuk kepentingan kemerdekaan Bangsa dan Negara Indonesia. Keputusan ini kemudian diangkat sebagai “Ikrar Pelajar Republik Indonesia”.
4. Kongres Pelajar I telah membentuk pula Ikatan Pelajar Indonesia (IPI) sebagai wadah perjuangan Pelajar Indonesia. Meskipun baru saja terwujud adanya IPI, namun dalam waktu sangat singkat masyarakat bangsa Indonesia sudah mengenal IPI sebagai Organisasi Perjuangan Pelajar. Mulai dalam urusan sosial yang bekerja dibelakang garis peperangan sampai ke medan pertempuran, ditengah-tengah kancah letusan mortir dan meriam, disitu terdapat anggota IPI yang sanggup mempertaruhkan jiwa dan raganya untuk mempertahankan kemerdekaan Tanah Air tercinta.

5. Kongres pelajar ke II diadakan pada tanggal 1 sampai 5 Januari 1946 di Madiun. Sebagai hasil dari Kongres ke II ini diadakan Bagian Pertahanan dalam Pengurusan Besar IPI, sebagai realisasi Ikrar Pelajar tanggal 28 September 1945. Dalam pada itu pasukan Pelajar seperti TP dan TRIP timbul mula-mula secara lokal dan baru kemudian dihimpun oleh bagian pertahanan PB IPI. Dalam perkembangan lebih lanjut, hubungan dengan IPI “lepas” secara organisatoris dan selanjutnya dipimpin oleh Markas Pertahanan Pelajar Pusat/ Markas Besar TP Pusat di Yogyakarta dalam kurun waktu 1 juli 1946 sampai dengan 28 Februari 1948.
6. Pasukan-pasukan pelajar meliputi Bat. 200 di Solo, Bat. 300 di Yogyakarta, Bat. 5000 (TRIP) di Jawa Timur, Bat. 400 (Corps Pelajar Siliwangi) di Jawa Barat, dan kemudian menyusul Bat. 500 di Banyumas dan Pekalongan, yang merupakan peningkatan dari TP Rogojembangan. Dalam kurun waktu 1 Maret 1948 sampai dengan 31 Oktober 1948, pasukan-pasukan pelajar dijadikan Corps Reserve Umum Brigade “W” (KRUW). Dalam kurun waktu 1 November 1948 sampai dengan 31 Maret 1951 Pasukan Pelajar menjadi Tentara Nasional Indonesia Brigade XVII, yang terdiri atas Detasemen I, Jawa Timur, Detasemen II, Surakarta; Detasemen III DIY, Kedu, Magelang, Banyumas, dan detasemen IV ; Jawa Barat.
7. Pada tanggal 1 April 1951 dilaksanakan Demobilisasi Anggota Brigade XVII yang diatur oleh Kantor Urusan Demobilisasi Pelajar (KUDP). Para anggota Brigade XVII dapat memilih antara (1) tetap dikalangan Angkatan Bersenjata atau (2) melanjutkan sekolah. Bagi mereka yang akan melanjutkan sekolah disediakan ikatan Dinas berdasarkan peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1949.
8. Pada tanggal 2 Februari 1948 diadakan fusi antara IPI yang beranggotakan pelajar dan sarekat Mahasiswa Indonesia (SMI)

yang beranggotakan mahasiswa menjadi Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia (IPPI). Didalam perkembangan IPPI di tahun-tahun berikutnya telah terjadi pertarungan yang sengit antara pihak yang tetap mempertahankan kemurnian organisasi pemuda pelajar dan pihak yang ingin membawa IPPI ke kubu Komunis. Akhirnya perpecahan dalam tubuh IPPI tidak dapat dielakkan lagi, sehingga timbullah IPPI Pancasila dan IPPI yang dipengaruhi PKI, yaitu IPPI kiri. Dengan adanya peristiwa G 30 S, IPPI kiri sudah tidak lagi berfungsi.

9. IPPI bersama-sama dengan Perserikatan Perhimpunan-Perhimpunan Mahasiswa Indonesia (PPMI) dan Corps Mahasiswa (CM) mengajukan surat bersama kepada Menteri PP dan K pada tanggal 30 Januari 1950, agar para mahasiswa dikerahkan untuk menjadi pengajar agar menampung kebutuhan masyarakat akan pendidikan dan pengajaran setelah periode perjuangan fisik 1945 – 1949. Setelah diadakan pembicaraan dengan Kementerian PP dan K tentang saran ketiga organisasi mahasiswa tersebut di atas maka pada tanggal 14 Agustus 1950 dengan SK Menteri PP dan K ditetapkan Peraturan dasar Proyek Pengerahan Tenaga Mahasiswa (PTM). Angkatan pertama PTM berangkat untuk tahun ajaran 1951-1952 keluar Jawa dengan 8 mahasiswa UGM sebagai pesertanya. Dalam kurun waktu 1951 sampai dengan 1962 telah dikerahkan 1359 mahasiswa yang mengajar di 161 SLTA tersebar di 97 tempat di luar Jawa. Apabila diamati bahwa pada tahun 1951 hanya ada k.1.25 SLTA di luar Jawa, maka pada tahun 1962 yaitu tahun berakhirnya Proyek PTM, di luar Jawa telah ada 161 SLTA yang berarti bahwa 136 SLTA telah dibuka oleh para mahasiswa peserta PTM. Proyek PT Mini merupakan saham luar biasa dari para mahasiswa untuk kepentingan mencerdaskan bangsa melalui pemerataan pendidikan menengah di luar Jawa. Dengan dibukanya sekian banyak SLTA

di luar Jawa berarti pula perolehannya lulusan SLTA yang kemudian melanjutkan ke perguruan tinggi di luar Jawa, sehingga Proyek PTM ini secara tidak langsung telah pula memberikan sumbangannya kepada pemerataan pendidikan tinggi bagi generasi muda di luar Jawa.

C. PELAJAR PEJUANG SEKARANG

1. Sebagai batasan menyatakan pelajar pejuang sekarang diambil generasi reformasi, yang dimulai dengan gerakan reformasi nasional (GRN) pada bulan Mei 1998 yang telah melibatkan para pelajar dan mahasiswa di seluruh Tanah Air.
2. GRM timbul sebagai reaksi terhadap cara pemerintahan yang dilaksanakan oleh Orba dengan sifat-sifat sentralisme, kurang melibatkan partisipasi masyarakat, kurang demokratis dan pemerintahan yang kooperatif.
3. Perubahan pemerintahan yang sentralis ke desentralistis terjadi dalam waktu yang sangat cepat, sedangkan infrastruktur, baik yang bersifat perangkat lunak maupun perangkat lunaknya tidak siap untuk menampung perubahan yang mendadak tersebut.
4. Perjuangan yang dilakukan oleh para pelajar/ mahasiswa melalui berbagai organisasinya ditujukan kepada berbagai dampak negatif yang timbul sebagai akibat dari kurang berbagai aparat pemerintah maupun kemampuan masyarakat untuk melaksanakan reformasi yang diinginkan.
5. Perjuangan ditujukan terutama kepada masalah korupsi dalam berbagai bentuk yang menghambat pelaksanaan pemerintahan yang demokratis dan desentralistis.
6. Berbagai kepentingan partai politik telah pula mempengaruhi gerakan pelajar/ mahasiswa, sehingga telah terjadi polarisasi dikalangan pelajar/ mahasiswa.

7. Berbagai keadaan internal dan eksternal organisasi pelajar mahasiswa kurang kondusif untuk menjadikannya potensi guna menyelesaikan gerakan reformasi yang telah dimulai pada bulan Mei 2003.

D. PELAJAR PEJUANG ESOK

1. Keadaan ini memerlukan instruksi dikalangan pelajar/ mahasiswa, apabila akan tetap mempertahankan fungsinya sebagai potensi bangsa untuk mengadakan perubahan dan pembangunan.
2. Masalah yang sangat mendasar yang dihadapi bangsa adalah pelaksanaan otonomi daerah dan menghadapi konsekuensi globalisasi dalam rangka melangkah sebagai bangsa yang memperjuangkan negara Kesatuan Indonesia demokratis, adil dan makmur.
3. Dalam menghadapi kedua masalah besar tersebut, prioritas diberikan kepada pengembangan sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan profesional yang tinggi, mencintai tanah air, serta beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

E. KEMAMPUAN PROFESIONAL YANG TINGGI

1. Sifat tantangan yang dihadapi generasi muda sekarang mengharuskan adanya profesionalisme dimasing-masing bidang untuk menangannya.
Dengan adanya globalisasi yang membawa keterbukaan dibidang ekonomi dengan segala implikasi persaingannya, penanganan masalah tidak dapat dilakukan secara amatir dan bersifat coba-coba. Apabila kemampuan profesional ini tidak diperhatikan yang mengakibatkan kita tidak dapat bersaing dengan perubahan asing yang terbuka masuk ke dunia usaha Indonesia dengan segala kecanggihannya, kita akan tertinggal dan menjadi penonton di tanah air sendiri.

2. Profesionalisme di tingkat menengah diperoleh melalui pendidikan kejuruan tingkat menengah seperti SMK dan pendidikan tinggi melalui program diploma. Profesionalisme di tingkat tinggi diperoleh melalui pendidikan bergelar (S1, S2, S3) maupun pendidikan non gelar yang memberikan ketrampilan yang diperlukan (spesialisasi)
3. Pendidikan yang diberikan untuk meningkatkan profesionalisme ditingkat menengah dan tingkat tinggi ini harus mampu mengantisipasi kebutuhan akan keahlian dan ketrampilan tertentu yang diperlukan dalam menghadapi persaingan bebas tersebut diatas, sehingga tidak boleh terpaku pada pendekatan konvensional di bidang pendidikan dengan hanya melihat kepada kebutuhan nasional dalam arti sempit.

F. CINTA TANAH AIR

1. Sebagaimana generasi-generasi terdahulu berperan dalam menghadapi tantangan zamannya didasarkan atas cinta tanah air yang mendalam yang memberikan motivasi kuat untuk berjuang, maka rasa cinta tanah air yang mendalam ini perlu menjadi pula motivasi generasi muda sekarang dalam berjuang menghadapi tantangan zaman yang rumit ini.
2. Terutama generasi muda 1945 dengan semangat juangnya yang tidak kunjung padam telah menghadapi tantangan dimasa revolusi fisik dengan pengorbanan jiwa dan raga dalam skala besar. Maka para pemuda 1945 yang tersebar diseluruh tanah air baik yang ada dimakam tanah pahlawan maupun di tempat-tempat lain merupakan bukti keiklasan berbakti kepada tanah air yang tiada ternilai harganya.
3. Semangat juang 1945 ini pula yang menjiwai generasi 1945 untuk mengisi Kemerdekaan setelah revolusi fisik selesai. Salah satu bukti keiklasan generasi muda untuk berbakti kepada tanah air

adalah upayanya untuk turut serta meratakan pendidikan di seluruh tanah air, sebagai mana telah diutarakan diatas.

4. Semangat juang 1945 yang didasarkan atas cinta tanah air yang mendalam, telah memberikan motifasi untuk merebut dan mengisi kemerdekaan dengan perjuangan penuh keiklasan, memberikan motivasi kepada generasi penerus untuk dengan cinta Tanah Air yang mendalam pula, meneruskan perjuangan yang mewujudkan ditentukan oleh tantangan zaman.

G. IMAN DAN TAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

1. Sesuai dengan filsafat bangsa dan negara, Pancasila, iman, dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa senantiasa perlu dilaksanakan oleh setiap insan Indonesia.
2. Pendidikan Nasional di Indonesia memberikan landasan kepada pengembangan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai mana tercantum dalam pasal 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional, yaitu bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga yang demokratis serta bertanggungjawab. Iman dan Taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa membawa kepada pelaksanaan ajaranNya, mematuhi petunjukNya dan menjauhi laranganNya. Dalam mengembangkan iptek, cendekiawan Indonesia dalam melaksanakan penelitiannya tidak dapat menganut "the sky is the limit" sebagai mana berlaku bagi cendekiawan di barat, yaitu berarti tidak ada batas bagi penelitian dan penerapannya. Yang berarti apapun dapat di teliti dan diterapkan. Batas bagi cendekiawan

Indonesia adalah sebagai mana tercantum dalam ajaran Tuhan Yang Maha Esa melalui agama masing-masing, yang diperkuat oleh sila pertama Pancasila. Dengan demikian iptek di Indonesia disertai iman dan taqwa (Imtaq). Dari sudut inilah pendidikan agama di sekolah amat penting fungsinya, yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan persepsi anak didik sekolah dasar SD sampai dengan perguruan tinggi.

H. SIKAP KETERBUKAAAN, KEBERSAMAAN DAN KEMITRAAN

1. Dari pengalaman yang amat banyak dan beragam dari generasi muda sebelumnya, telah berkembang keyakinan akan perlunya dikembangkannya sikap keterbukaan , kebersamaan dan kemitraan (3K)
2. Sikap keterbukaan adalah sikap mental (a state of mind), yang berkembang secara bertahap, tidak datang dengan tiba-tiba. Sikap keterbukaan adalah sikap membuka diri pada orang lain dalam interaksi personal. Sikap membuka diri ini berarti adanya kesediaan untuk mendengarkan orang lain atau pendapat orang lain.

Kewajiban mendengar bagi pemimpin perlu dibudayakan di masyarakat kita, berkenan dengan pengakuan adanya hak berbicara bagii masyarakat yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945, sehingga aspirasi masyarakat benar-benar dapat dipahami oleh pemimpin dan ini sangat penting dalam proses pengambilan keputusan.

Keputusan yang diambil oleh pemimpin dengan masyarakat akan meningkatkan kesedian masyarakat untuk menerima dan melaksanakan keputusan itu merefleksikan keinginan masyarakat.

3. Sikap kebersamaan didasarkan atas keyakinan bahwa pemecahan masalah secara bersama selalu lebih baik dari pada dipecahkan

sendiri. Masalah pada dirinya bersifat kompleks yang tidak mungkin dipecahkan oleh satu disiplin ilmu, lebih-lebih masalah pembangunan yang multi-komplek yang harus didekati dengan cara inter dan multidisipliner serta lintas sektoral. Masalah tidak pernah sama sepanjang masa, karena kendala-kendala yang dihadapi berbeda-beda sesuai dengan perbedaan waktu dan tempat. Dengan demikian pemecahannya pun tidak sama. Oleh karena itu senantiasa harus diupayakan adanya berbagai alternatif pemecahan, sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi. Ini adalah tugas-tugas seorang cendekiawan, karena cendekiawan adalah seorang yang mampu menginternalisasi cara berfikir alternatif, termasuk para mahasiswa sebagai cendekiawan muda, bukan calon cendekiawan.

Kebersamaan membawa kepada partisipasi pemikiran berbagai pihak yang menguntungkan bagi pengambilan keputusan yang bijaksana. Kebersamaan antara generasi muda dan tua dengan dasar saling menghargai dan saling mempercayai. Dalam keadaan bagaimana pun, selalu terdapat keterkaitan antar generasi, karena tidak ada tiba-tiba timbul suatu generasi tanpa adanya generasi terdahulu. Generasi tua mempunyai pengalaman yang perlu dimanfaatkan sepenuhnya, sehingga generasi muda dapat melahirkan konsep-konsep yang cemerlang. Perlu dipahami kearifan tidak dimonopoli oleh siapapun juga, terdapat pada generasi tua maupun generasi muda, terdapat baik dikota maupun di pedesaan.

4. Sikap kemitraan memandang orang lain sebagai mitra, sebagai sahabat. Perbedaan pendapat yang datang dari mitra diterima untuk memperluas wawasan dan oleh karenanya perbedaan pendapat merupakan hikmah. Perbedaan pendapat dalam konfrontasi mengeskalasikan konflik karena adanya keinginan untuk mempertahankan pendapat meski sebenarnya diakui meskipun

pendapat orang lain itu lebih baik dari pendapatnya sendiri . Akan tetapi karena datangnya dari lawan , pendapat tersebut harus terus ditentang dengan segala cara.

5. Jawaban atas pertanyaan apakah seseorang mempunyai K3 sebagaimana diuraikan diatas hanyalah dapat dijawab oleh orang itu sendiri. Ini adalah pertanggungjawaban moral terhadap diri sendiri dan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Orang lain dapat dibohongi, akan tetapi diri sendiri dan Tuhan tidak dapat dibohongi. Orang lain hanya dapat menilai dari sudut lahiriyahnya saja.

I. PENUTUP

1. Dalam menghadapi tantangan di era globalisasi perlu ditingkatkan hubungan antara generasi muda dan tua atas dasar saling harga-mengahargai.
2. Cinta Tanah Air yang perwujudannya ditentukan oleh tantangan yang dihadapi oleh setiap angkatan muda, harus senantiasa dipupuk untuk tetap mempertahankan keberlangsungan bangsa dan negara sepanjang masa.

PERANAN LASKAR-LASKAR PERJUANGAN DALAM MEMPERTAHANKAN KEMERDEKAAN

Oleh : Prof. DR. PJ. Suwarno. SH

Pada awal kemerdekaan negara Republik Indonesia (RI) tidak memiliki tentara untuk membela kemerdekaannya. PETA yang dilatih Jepang yang dapat menggunakan senjata dibubarkan oleh Jepang, dan senjatanya dilucuti. Dalam situasi demikian para pemuda atas inisiatifnya sendiri turun tangan membentuk organisasi-organisasi perjuangan yang dikenal dengan nama Lasykar, tetapi mereka tidak mempunyai senjata, tidak terlatih, tidak berdisiplin dan tidak memiliki pimpinan yang berpengalaman. Mereka berselisih dengan pemerintah Soekarno yang tidak tegas menentang pendaratan Sekutu. Kecuali mereka itu bentrok dengan sesama laskar, karena perbedaan ideologi dan saling berebut senjata. Menanggapi seperti itu rakyat kadang-kadang takut.

Mengenai keadaan demikian pemerintah mulai berfikir tentang kekuatan yang digunakan untuk menentramkan keadaan. Maka pada tanggal 22 Agustus pemerintah mengumumkan pembentukan sebuah badan penolong keluarga korban perang yang secara organisatoris mencakup sebuah badan Keamanan Rakyat, yang didalam undang-undang pembentukannya disebut sebagai “memelihara keamanan bersama-sama dengan rakyat dan badan-badan negara yang bersangkutan”. (ULF Sundhaussen, 1986 Halm 10-11).

BKR ditempatkan ditempat dibawah Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dan KNID, serta pemuda-pemuda dianjurkan mendaftarkan diri. Namun Laskar-laskar itu tetap tidak taat kepada pemerintah. Hal ini terbukti ketika Belanda mendaratkan pasukannya di Surabaya, Lasykar menentang, meskipun BKR tunduk pemerintah tidak mengadakan perlawanan. (ULF Sundhassen, 1986 : Hlm 12). Sehingga terjadi pertempuran Subaya yang heroik, meskipun persenjataan tak seimbang tetapi pemuda-pemuda Supaya memberikan perlawanan mati-matian. Para

pemuda Yogyakarta kongres pemuda untuk seluruh Jawa mendengar di Surabaya terjadi pertempuran besar meskipun kongres belum selesai sebagian besar ke Surabaya untuk ikut bertempur. Oleh Karena Sri Sultan HB IX bersama tiga orang lainnya naik mobil pergi ke Surabaya. Hari sudah malam mereka baru saja melewati kota Madiun ketika tiba-tiba dihentikan oleh sekompok orang muda. Orang-orang tersebut tampak sangat beringas dan berteriak stop! stop! Allahu Akbar- Allahu Akbar Dorojatun mana? Mereka menjawab : “ Dia di Kraton Jogya ! Kami baru saja dari sana.! Mereka bertanya kepada Hamengku Buwono IX namamu siapa? “ Saya Suyono”. Kata Hamengku Buwono ke IX, mereka akhirnya diizinkan melanjutkan perjalanan. Mereka melanjutkan perjalanann ke Mojokerto dan disana sudah ditunggu oleh Gubernur Jawa Timur Suryo. Pada waktu itu Surabaya baru genting sehingga Sultan tidak boleh masuk kota, tetapi dengan beberapa cara Sultan dapat menemui para pemuda Jogya yang sedang aktif di front Surabaya.

Kemudian Sultan pulang ke Jogya, di Solo Sultan ke temu pratoli polisi yang merasa lega melihat rombongan Sultan komandan polisi bertanya : Apakah Bapak bertemu dengan rombongan warok waktu berangkat kesana? Ya kamu bertemu untung kami bisa lolos. Komandan polisi itu bercerita bahwa mereka itu adalah anak buah Van der Plas yang ditugaskan menangkap Dorojatun untuk dibunuh di kaki Gunung Wilis. (Atmakusumah, 1982 : 94-95).

Memang sejak Proklamasi Kemerdekaan dikumandangkan para pemuda bersemangat untuk segera merebut kekuasaan dari tangan musuh, baik Jepang maupun Belanda di Jakarta dengan dimotori oleh penghuni asrama Menteng No. 31 dibentuklah Organisasi Komite Van Aksi yang dipimpin oleh secara bersama-sama oleh Sukarni, Wikana, Adam Malik, M. Nitimiharjo, Chaerul Saleh, Johar Nur, Pandu Wiguna, Kusnaeni, Hanavi, Darwis, dan Armunanto. Programnya merebut kekuasaan yang ditangan bangsa asing harus diambil alih oleh rakyat Indonesia. Dalam situasi revolusioner itu dalam waktu singkat sudah dibentuk organisasi yang secara hirarkis berada dibawah komete Van Aksi yaitu angkatan pemuda Indonesia

(API), barisan Rakyat Indonesia (BARA) dan Barisan Buruh Indonesia (BBI).

Pada tanggal 3 September 1945 para pemuda yang tergabung dalam API berhasil merebut Jawatan Kereta Api khususnya di stasiun Jakarta Kota, Bengkel Manggarai, Depot Jatinegara, dan merebut ke seluruh kota Jakarta. Diantara pemimpin pengambil alihan ini tercatat nama-nama Johar Nur, Legiman, Haryono, Armansyah, Kusnandar, dll. Yang tercatat dalam peristiwa heroik semacam ini kemudian para pemuda terutama para pelajar di daerah-daerah lain juga membentuk tentara pelajar yang ikut memindahkan kekuasaan dari pihak Jepang dan kemudian mempertahankannya terhadap pendudukan Belanda.

Di Jawa tengah muncul Lasykar-Lasykar yang embrionya muncul pada zaman Jepang seperti barisan anak-anak sekolah (Gakotai), khususnya di Solo tokoh yang sudah aktif pada zaman Jepang, kemudian membentuk lasykar-lasykar seperti Lasykar Garuda (SGM) yang dipimpin oleh Mutari, Lasykar Satria (SMP) yang di pimpin oleh Tobiat, Lasykar Kere (SMT) yang dipimpin oleh Achmadi, dll. Mereka itu bersatu dengan kelompok pemuda membentuk lasykar-lasykar rakyat seperti Lasykar Hisbullah, Lasykar Rakyat, Lasykar Banteng, Laskar Gajah Mada. Laskar-laskar pelajar itu terlibat dalam berbagai pertempuran.

Atas prakarsa markas pertahanan pelajar (MPP) pusat Yogyakarta dibentuk batalyon-batalyon tentara pelajar Jawa Tengah. Sampai Akhir tahun 1946 tentara pelajar Jawa Tengah yang merupakan bagian tantara pelajar pusat di Yogyakarta tersusun dalam batalyon-batalyon sbb:

1. Batalyon 100 Solo dibawah Komandan Prakosa
2. Batalyon 200 Semarang dibawah Komandan Marwoto
3. Batalyon 300 Yogyakarta dibawah Komandan Martono
4. Batalyon 400 Cirebon dibawah Komandan Salamun AT.

Tenatara Pelajar Yogyakarta diawali dengan terbentuknya Ikatan Pelajar Indonesia (IPI), pencetusan terbentuknya IPI pertahanan di Yogyakarta

digagas oleh Martono dan dibantu oleh dua orang pelajar dari SMT Kota Baru yaitu Titi Dewi dan Atmono Suryo (MBKD POS X -2 1948 – 1949, Hal 37-39).

Seperti juga perkembangan tentara pelajar di Solo, tentara pelajar di Yogyakarta juga berkembang ke luar kota dan kemudian terbentuk tentara-tentara pelajar di kota-kota kecil yang berada di sekitar Yogyakarta seperti Magelang, Temanggung, Muntilan, Purwokerto, dll. Beberapa pertempuran yang dialami oleh para tentara pelajar adalah pertempuran Rejodani, pertempuran Sidobunder dan Grantung, dimana puluhan pelajar gugur sebagai kusuma bangsa.

Setelah Proklamasi Kemerdekaan para pemuda di Jawa Barat memasuki perkumpulan pemuda Republik Indonesia (PRI) yang terdiri atas para siswa SMP, SMT dan Mahasiswa teknik Tinggi (STT sekarang ITB). Diantara tokoh penting dari PRI ini ialah Soedjono (Guru SMP, Ahadi Mangunkarto (SMT), Suroso Hurip (SMT) dan Sambik (SMT) semboyan mereka terkenal “ Dari Bangku Sekolah ke Medan Perang “. Dari kelompok-kelompok ini akhirnya menyatu dalam TRIP (Tentara Republik Indonesia Pelajar) Jawa Barat. Dalam pelaksanaan lapangan direncanakan dibagi dalam empat Batalyon yaitu :

1. Batalyon 1 meliputi daerah Serang, Jakarta dan sekitarnya
2. Batalyon 2 meliputi daerah Bogor, Sukabumi dan sekitarnya
3. Batalyon 3 meliputi daerah Priangan
4. Batalyon 4 meliputi daerah Cirebon dan sekitarnya

Akan tetapi rencana ke empat batalyon itu tidak berkembang seperti apa yang terjadi di lapangan. Hanya satu batalyon yang tidak berkembang pada TRIP Jawa Barat ini yaitu batalyon 3 yang meliputi daerah Priangan Timur dan Selatan dengan pusatnya di Tasik Malaya. Batalyon ini terbentuk pada pertengahan tahun 1946 dengan wilayah meliputi daerah Garut, Tasik Malaya, Ciamuis, Sumedang, Kertasari. Tiap kota menjadi tanggung jawab kompi sehingga terdapat empat kompi dan satu detasemen. Detasemen

Kartasori di pimpin oleh Supiandi dan Sugandhi, tiap-tiap kompi dibagi lagi menjadi seksi-seksi yang sama dengan pleton.

Dengan organisasi seperti itu TRIP Jawa Barat mengambil bagian dalam berbagai bentrok fisik dengan lawan. Sementara itu, diberbagai daerah lainnya, para pemuda dan pelajar sama-sama tidak ketinggalan seperti di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali dan sebagainya. Mereka segera membentuk barisan pemuda dan pelajar yang segera mengambil posisi perlawanan terhadap pihak luar yang ingin merongrong Proklamasi Kemerdekaan RI. Hal ini menunjukkan bahwa para pemuda dan pelajar Indonesia ikut andil yang tidak kecil dalam perjuangan bangsa baik sebelum kemerdekaan, terutama setelah Proklamasi di kumandangkan. Setelah pengakuan kedaulatan RI dari tangan Belanda 27 Desember 1949, dan kemudian terjadi demobilisasi, dan sejak itu semua angkatan atau lasykar yang berada diluar angkatan bersenjata RI (ABRI) ditiadakan. Pemuda dan pelajar yang terus masuk ABRI akan berkarier sebagai anggota ABRI dan mereka yang keluar, berkarier di luar ABRI.

Sementara itu Belanda tetap menduduki dan menjajah Indonesia lagi maka akhirnya diputuskan pada tanggal 5 Oktober 1945 BKR diubah menjadi TKR (Tantara Keamanan Rakyat). Dengan demikian sebagai negara RI memiliki tentara, meskipun baru untuk kepentingan dalam negeri. Para mantan KNIL diberi tugas membangun organisasi militer. Di Indonesia terdapat lima belas mantan KNIL yang berpangkat Letnan Muda keatas, setelah dibubarkan tahun 1942 tiga belas dari mereka memutuskan mendukung RI (UIF Sundhaussen 1983 : 114).

Ketika pembentukan TKR diumumkan, pada hari itu juga mantan mayor KNIL Oerip Somoharjo yang telah pensiun tahun 1938 diangkat sebagai Kepala Markas Besar Umum TKR. Dia tidak diangkat menjadi panglima tentara karena mantan KNIL dan kalangan Peta di Jawa Timur dan Jawa Tengah terdapat rasa tak senang. Maka untuk mengisi kekosongan itu diangkat Supriyadi pemimpin pemberontak Peta di Blitar diangkat sebagai panglima tentara. akan tetapi ditunggu sampai lama tak pernah

muncul maka dia ditinggalkan. Oleh Karena itu ditingkat menteri diangkat seorang menteri ad interim untuk keamanan nasioanal pada tanggal 20 Oktober (UIF Sundhaussen , 1983 : 114).

Di lapangan dibentuk empat komandemen di Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kepada mereka diberikan Komando taktis baik atas kesatuan-kesatuan TKR yang reguler maupun atas sekian banyak badan perjuangan, yakni nama baru yang berikan kepada berbagai organisasi kelasykaran. Batalyon-batalyon TKR dikelompokkan menjadi resemen dan divisi. Enam divisi terbentuk di Sumatera , tiga di Jawa Barat, empat di Jawa Tengah dan tiga di Jawa Timur. Namum hanya di Jawa Barat lah komandemen yang berfungsi cukup baik yang dipimpin oleh mantan KNIL Didi Kartasasmita dengan Kadet Bandung AH Nasution sebagai kepala staf.

Semula seperti telah diuraikan di muka lasykar-lasykar rakyat itu tetap berjuang di samping TKR yang nanti menjadi TRI dengan pimpinan yang tunduk kepada pemerintah. Akan tetapi badan-badan perjuangan itu, yang kebanyakan mempunyai afiliasi dengan partai politik tetap berjuang sesuai dengan komando pimpinannya yang belum tentu taat kepada TNI. Ketika Belanda mulai masuk ke Indonesia dengan membonceng Inggris dan mulai menyerang Semarang, Ambarawa, Magelang dan Yogyakarta pemuda-pemuda itu melibatkan diri dalam kesatuan tentara untuk melawan Belanda. Mereka menyusun badan-badan perjuangan (lasykar-lasykar) yang ikut berjuang angkat senjata, tentu saja tetap memegang idiologi yang dimilikinya. Namun khusus di Yogyakarta Sultan mengakomodasikan mereka itu dengan mengeluarkan maklumat No. 5/ 1945 pada tanggal 26 Oktober 1945 dan dibentuklah lasykar Rakyat di Kabupaten, Kapanewon, dan Desa-Desa. Sultan sendiri mendorong abdi dalem dan para saudaranya yaitu para bangsawan masuk Lasykar Rakyat. (Wawancara dengan M.Jumali, mantan Kepala Lasykar Rakyat Yogyakarta, 8-8-1998 di Jl. Taman Siswa 72 Yogyakarta).

Kelompok-kelompok pemuda lain tidak ketinggalan, mereka juga membentuk lasykar dan barisan yang siap menjaga keamanan kota serta desa masing-masing, dan siap mengirimkan pasukannya kalau terjadi pertempuran di luar Yogyakarta. Mereka mengorganisasi lasykar itu secara rapi, sebagian menggabungkan diri dengan partai politik yang sudah ada di Yogyakarta seperti Barisan Sabilillah, dan Hisbullah, Barisan Peindo, Lasykar Buruh, Barisan Banteng, sebagian didirikan sebagai cabang dari barisan yang berada di luar Yogyakarta seperti barisan Pemberontak Republik Indonesia Mataram yang dipimpin oleh Bung Tarjo dkk (KR, 29 -10-1945).

Mereka bersatu siap membantu TKR yang pada saat itu sedang disusun organisasinya di Yogyakarta oleh Oerip Soemoharjo. Untuk menjaga kesatuan yang ada antara tentara lasykar dan barisan dibentuk Dewan Perjangan Rakyat Daerah (DPRD) yang diketuai oleh Dhaim (Hisbullah) dan wakilnya Moh. Jumali (Lasykar Rakyat). Dalam DPRD ini mereka tukar menukar informasi, merundingkan siasat, dan mengkoordinasikan lasykar dan barisan yang akan berangkat ke Medan pertempuran. Untuk pejuang-pejuang mereka, masyarakat membentuk kelompok-kelompok sosial seperti Persatuan Wanita Indonesia dengan ketuanya Damiati Adi Prabowo, Fonds perang dengan ketuanya Mr. Djody Gondokusuma, panitia Pembantu Garis depan dengan pimpinan Ibu Joyodiguno. Di luar Yogyakarta terutama di Jawa Tengah hubungan Lasykar dan TKR belum tentu baik, bahkan antara sesama lasykar sendiri terjadi bentrokan. (PJ. Soewarno, 1994:206).

Sementara itu ketika Hatta menggantikan kedudukan Amir Syarifuddin sebagai perdana menteri dia melanjutkan kebijaksanaan yang sudah diambil yaitu mengadakan rasionalisasi dalam bidang militer yaitu dengan cara membubarkan kesatuan-kesatuan yang tidak terlatih baik dan tidak mempunyai persenjataan yang memadai, konsep ini kemudian di dukung oleh Nasution dan dilaksanakan, ketika terjadi gencatan senjata dengan Belanda dan sementara tentara RI sedang dipindahkan ke daerah

RI. Menurut keterangan pada waktu itu di Jawa saja terdapat sekitar 350.000 orang anggota tentara reguler ditambah dengan 470.000 orang anggota lasykar. Jumlah itu harus dikurangi sampai 160.000 orang, dengan tujuan akhir untuk membentuk sebuah tentara tetap yang terlatih baik dan bersenjata lengkap dengan jumlah 57.000 orang prajurit. Walaupun terdapat tantangan yang kuat, terutama dari pasukan yang sudah termasuk daftar kesatuan-kesatuan yang akan dimobilisasikan, pengurangan tetap dilaksanakan. Di Sumatera keenam divisinya diciutkan menjadi tiga divisi. Ketujuh divisi tentara di Jawa dikelompokkan kembali menjadi empat divisi.

Ketika Belanda berhasil menduduki Yogyakarta sebagai Ibu kota RI, maka Sultan mengatur perlawanan dengan menggunakan strategi perlawanan gerilya sebagai berikut: Rakyat harus menolak kerjasama dengan Belanda, dan menolak uang federal yang dikeluarkan oleh Belanda. Demikian juga tindakan tegas harus dilakukan terhadap penjahat, kalau perlu ditembak di tempat. Kecuali itu Sultan juga mengatur mekanisme hubungan desa dan kota dalam penyaluran bahan makanan, sehingga memungkinkan gerilyawan dikota dapat terus mengadakan perlawanan terhadap Belanda.

Ketika Belanda menduduki kota Yogyakarta tanggal 19 desember 1948 Sultan menutup semua kantor pemerintahannya mulai dari ibukota yang berkantor di Kepatihan, Kabupaten, kapanewon, dan MPP. Meskipun Belanda menyebabkan tutupnya semua kantor pemerintahan itu, tetapi tidak dapat menghapus RK, RT di dalam kota dan kalurahan kalurahan di desa-desa. Mereka itu tetap aktif dan merupakan sarana yang jitu untuk menjalin hubungan yang ada di dalam kota dengan rakyat di desa dan para gerilyawan yang berada di sekitar kota Yogyakarta. Desa-desa itu mempunyai otonomi yang kuat, sehingga dapat menghidupi gerilyawan yang mangkal di desa-desa dan mengatur serangan ke markas Belanda pada waktu malam dengan bantuan rakyat.

Ketua RK dan RT di dalam kota setia sekali kepada Sultan. Oleh karena Sultan tetap tinggal di Kraton, maka mereka juga tidak mengungsi ke desa, tetap di dalam kota. Mereka itulah yang menampung para gerilyawan yang sedang mengadakan serangan ke dalam kota. Tidak jarang

mereka melindungi para gerilyawan yang sedang berada di dalam kota, kalau kebetulan Belanda mengadakan patroli di sekitar perkampungan kota. Tidak jarang orang kampung itu dihukum oleh Belanda karena melindungi para gerilyawan. Kecuali itu warga kampung itu membuka dapur umum untuk para gerilya. Untuk itu Ketua RK Gamelan membuka koperasi dan membuka warung “Puas” yang biasa untuk mangkal para gerilyawan itu. Ternyata memang Kraton memerintahkan para ketua RK membentuk dapur umum untuk menjamin para gerilyawan yang menyerang ke dalam kota. Bahan-bahannya dikumpulkan dari orang-orang yang kaya. Demikianlah rakyat Yogyakarta baik di kota maupun di desa selalu berusaha membantu para gerilyawan dan tentara yang menyerang Belanda sesuai dengan sikap Sultan Hamengku Buwono IX yang menolak Belanda menduduki Indonesia. (PJ Suwarno, 1994: 241-251).

Ternyata perjuangan rakyat melawan Jepang dan Belanda yang hendak menjajah Indonesia lagi itu tidak hanya terjadi di Yogyakarta sebagai Ibukota RI pada waktu itu, tetapi juga terjadi di Aceh, ujung utara Indonesia seperti yang diberitakan oleh Haji Amran Zamami, SE sebagai berikut; Pada bulan Desember 1945 Amran bersama rombongan sebanyak 60 orang mengayuh sepeda dari Blang Pidie ke pinggiran kota Meulaboh. Perjalanan selama delapan jam dengan sepeda ban mati yang tidak elastik, tak terasa berat, karena tekatnya merampas senapan, amunisi, dan kalau bisa senjata otomatis Jepang. Sesampai di sana ribuan penduduk sudah siap membantu. Namun Jepang telah mengetahui rencana itu, mereka membentengi diri dengan kawat berduri kerangka kayu. Pagar-pagar itu memang dapat diangkat, tetapi beberapa meter dari pagar tersebut terdapat panser-panser yang telah siap dengan pelurunya. Bila ada rakyat yang memberanikan diri maju ke pagar kawat, tentara Jepang segera menembakkan senapannya.

Besarnya masa yang dilindungi TKR dan Lasykar Rakyat ternyata menggetarkan hati Jepang yang berjumlah 200 orang itu. Sambil mengulur waktu menunggu Sekutu menjemput mereka, Jepang mengibarkan bendera

putih untuk mengajak berunding. Kesimpulan dari perundingan tersebut TKR bisa mengambil senjata dan pasukan Jepang dibiarkan pergi lewat laut tempat Sekutu menjemput. Perebutan senjata yang berlangsung empat hari tersebut, berhasil merebut senjata ringan, senapan, granat dan peluru digudang. Upaya ketika sedang berlangsung tembak menembak anatara Jepang di panser dan TKR, kesempatan itu digunakan musuh untuk mengangkut senjata berat mereka. (MBKD POS X-2 1948-1949 : hlm 141).

Demikianlah peranan lasykar rakyat yang muncul spontan dari kalangan rakyat Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan RI yang sudah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, meskipun tidak seteratur TRI/TNI, tetapi mengambil inisiatif dalam mengadakan perlawanan terhadap Belanda, sampai akhirnya Belanda meninggalkan Indonesia pada tahun 1949 dan bangsa Indonesia merdeka sampai sekarang. Tugas lasykar itu sudah selesai dan berhasil mengantarkan Indonesia ke gerbang kemerdekaan ini. Sekarang tugas kita untuk menghiasi pintu gerbang kemerdekaan ini dengan semua yang diharapkan oleh bangsa yang sungguh-sungguh merdeka.

TENTARA PELAJAR DAN PARTISIPASINYA: NASIONALISME KONTEKTUAL

Oleh : Suhartono W. Pranoto

Pengantar

Negara-negara maju dan modern di dunia tidak dapat dilepaskan dari kehidupan pelajar dan mahasiswa. Mereka menduduki posisi penting bukan hanya dalam situasi yang menginginkan perubahan (*Changes*), tetapi juga kelangsungan (*Continuities*), sebab mereka adalah agen perubahan (*agent of change*) yang hampir terjadi di seluruh pelosok dunia. Mereka sebelumnya telah berjuang dengan menekuni teori dan buku-buku sebagai acuannya yang pada kesempatan lain ilmu yang diperolehnya itu diterapkan di masyarakat. Terapan ilmu inilah yang disumbangkan kepada nusa dan bagsa sebagai dharma bhaktinya kepada tanah air tercinta. Itulah kekuatan pelajar dan mahasiswa dalam proses kebangsaan dan kenegaraan RI.

Pertanyaan kemudian: Seberapa jauh partisipasi pelajar dan mahasiswa dalam mengisi kemerdekaan yang secara kontekstual dapat dikaitkan dengan sumbangan yang diberikan kepada nusa dan bangsa. Dalam arti luas seberapa jauh nasionalisme pelajar dan mahasiswa dalam membangun anak bangsa sampai pada sasaran. Apakah nasionalisme mereka sudah tereduksi dan mengalami erosi karena perubahan zaman dan bagaimana revivalisme nasionalisme itu sehingga menghasilkan kekuatan pembangunan bangsa yang berwujud nilai yang sangat besar bagi *nation building* dan *character building*, yang pasti pelajar harus melakukan *renewal movements* di segala bidang kehidupan.

Tak salah kiranya jika dibicarakan kembali agen-agensya, khususnya pada periode perang kemerdekaan dan konteksnya dengan kehidupan pelajar dan mahasiswa pada masa mutakhir ini. Harap diperhatikan bahwa setiap perjuangan ada dalam konteks *Weltbilt*, suatu produk dari dialektika jaman dari alam kemerdekaan. Selanjutnya di alam kemerdekaan itu pelajar harus kiprah dengan kreasi barunya dalam menuntun bangsa. Para pelajar dan

mahasiswa adalah produk *Zeigeist* atau jiwa jaman yang harus memberikan jawaban sesuai dengan tantangannya. Konteks partisipasi dalam perang, lain dengan partisipasi pasca perang. Itulah sebabnya pelajar dan mahasiswa harus mencari jawaban terhadap tantangan jaman dengan berbagai solusi untuk kesejahteraan masyarakat. Nilai mereka akan mencuat tinggi kalau berhasil menyejahterakan masyarakat, bangsa, dan tanah air.

Perkembangan Organisasi Pemuda

Meskipun organisasi pertama secara modern yang ditelorkan oleh anak bangsa ini, yaitu Budi Utomo (1908) masih lokal sentris, dan priyayi sentris, tetapi toh sebagai organisasi mempunyai garda penerus, yaitu Trikaradarma (1915). Ia adalah organisasi pemuda yang menjadi bagian dari BU diikuti organisasi lain dalam arti menempatkan pelajar dan mahasiswa sebagai penerus bangsa.

Dalam setiap organisasi, kepemimpinan (*leadership*) sangat diperlukan dalam kelangsungan organisasi itu agar tidak lepas dari rambu-rambu ideologi organisasi itu. Memang ada revisionis atau sempalan yang membentuk sektor-sektor baru, tetapi tentu saja hal ini tidak diinginkan oleh organisasi pemuda.

Organisasi pemuda dan pelajar kemudian berkembang dan mengisi setiap aliran politik dan sosial di persada nusantara tercinta ini. Sebagaimana tersebut dimuka bahwa pelajar dan mahasiswa adalah agen pembaharuan. Merekalah yang digodog untuk memahami sejarah bangsa, artinya merekalah yang memahami telaah tiga dimensi sejarah, yaitu masa lalu, sekarang dan masa depan. Merekalah yang mampu memprediksikan untuk menjadikan bangsa Indonesia itu di kelak kemudian hari. Merekalah yang mampu manage bangsa ini, karena mereka faham terhadap sejarah bangsa. Mereka sebagai generasi baru lebih faham membawa bangsanya ke dunia baru yang sejahtera. Kalau hal ini dicita-citakan, maka katakan sampai sekarang belum berhasil mensejahterakan rakyat yang berarti aplikasi cita-cita mereka belum berhasil sepenuhnya.

Terealisasinya sumpah pemuda (1928) merupakan manifestasi simbolisasi persatuan bangsa dengan mengedepankan unsur pemersatu bangsa yaitu nusa, bangsa dan bahasa Indonesia. Sumpah Pemuda yang disampaikan pada waktu itu memang dalam pengertian membangun masyarakat yang dibayangkan (*imagined nation*). Akan tetapi dari sedikit apa yang dibayangkan itu menjadi suatu kenyataan dan terealisasi pada pembentukan nation Indonesia (*realized nation*) yang dicanangkan pada tanggal 17 Agustus 1945.

Pemuda dan pelajar, serta mahasiswa masih terkait dengan nasionalisme yang menempelnya. Sebagai agen perubahan dan sebagai kekuatan politik besar yang tidak diragukan lagi keberadaannya. Kalau diperhatikan dua kali pemerintahan telah dilengserkan oleh kekuatan pelajar dan mahasiswa maka pertanyaan selanjutnya adalah dapatkah pelajar dan mahasiswa bukan hanya pandai menjatuhkan pemerintahan, tetapi juga harus pandai membangun pemerintahan baru yang demokratis dan berpihak pada kepentingan bersama.

Berbicara kepentingan bersama memang mudah, tetapi sukar dilaksanakan. Meski para pemimpin selalu mengutip pengertian nasionalisme dari E. Renan mengenai bangsa yang diartikan sebagai kepentingan bersama (*Le Desir de Vivre/entre ensemble*) ternyata belum dapat menemukan solusinya demi kepentingan bersama. Sampai sekarang yang ada masih di sekitar kepentingan primordial yang berkuat pada kelompok sendiri, partai sentris, golongan sendiri. Kapan Primordialisme itu tereduksi?. Hal ini tentunya menjadi tanggung jawab pelajar dan mahasiswa. Karena Primordialisme adalah biangnya kendala menuju ke arah demokrasi dalam arti yang sesungguhnya.

Mengapa Berjuang

Kalau boleh dikatakan pelajar pada masa perang kemerdekaan kedua masih dalam usia muda, tetapi penuh vitalitas. Sehingga mereka dengan mudah berpartisipasi dan bergabung dalam gerakan menentang datangnya kolonialisme Belanda.

Mula-mula semangat atau spirit mereka dimaksudkan untuk ikut dalam medan juang bersama kelompok bersenjata yang lebih senior. Meskipun demikian, akhirnya mereka ditugasi sama dengan para senior itu. Dari mereka terbangun sense of solidarity, yaitu rasa kebersamaan untuk bersama-sama membela negara dari serangan musuh. Bukan hanya harus bekerja sama dengan sesama mereka lasykar dan militer, tetapi juga dengan masyarakat dimana saja mereka berada.

Mempertahankan negara dan bangsa dengan darah dan keringat adalah bagian dari pengorbanan dengan pamrih bersama, yaitu mengusir penjajah dari bumi Indonesia. Sebagai warga negara, para pelajar merasa memiliki *Sense of belonging Republik Indonesia* sehingga mereka bersama-sama berjuang menghadapi musuh bersama.

Pada dasarnya kebersamaan (*togetherness*) adalah kunci utama tercapainya nasionalisme dalam suka dan duka. Dapat dimengerti bahwa pelajar pada waktu itu belum secara jelas mempunyai *grand design* mengenai *renewal movements* pasca proklamasi. Pengalaman yang mereka peroleh itu dikembangkan pada masa-masa kemudian setelah mereka mendapat pendidikan lebih tinggi. Sebagai golongan intelengensia baik sipil maupun militer, mereka kemudian menduduki posisi menentukan dalam republik ini

Persepsi nasionalisme

Nasionalisme harus diberi makna dalam arti bahwa nasionalisme harus dijabarkan secara gamblang. Apa nasionalisme itu sendiri dan bagaimana sangkanparannya serta bagaimana konteksnya dengan nasionalisme Indonesia. Ini yang sangat penting. Nasionalisme harus diberi penjelasan yang luas dan dalam mengenai hakekat dan makrifatnya. Nasionalisme harus diberi penjelasan mengenai untung dan ruginya. Sampai sekarang itu belum pernah dijelaskan apa untung ruginya nasionalisme dikembangkan terus.

Kita terlalu banyak mengumpat kegagalan nasionalisme, karena kita tidak dapat memahaminya secara mendalam. Sebab selama ini bangsa Indonesia umumnya atau pelajar dan mahasiswa masih tertutup oleh tabir feodalisme. Kalau nasionalisme dapat dijabarkan secara luas dan dihubungkan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara serta bermasyarakat sebenarnya persoalan nasionalisme sudah inherent pada kita melekat pada diri kita. Mengapa sesuatu yang sudah melekat ini bisa lepas dan mungkin hilang ini zondig, artinya dosa besar kalau nasionalisme kita lepas menjadi regionalisme dan separatisme.

Nasionalisme bisa lepas karena kita sendiri tidak dapat mengelola nasionalisme dengan baik. Contohnya sentralisasi kekuasaan memang agak paralel dengan pengukuhan nasionalisme, tetapi kesejahteraan sosial sudah semestinya diselenggarakan secara merata. Ini adalah kaitan nasionalisme politik dan nasionalisme sosial ekonomi. Kalau kedua unsur nasionalisme ini terpadu diperkirakan nasionalisme akan berkembang, karena kepentingan negara dan warga terjamin, terpelihara, dan tidak terganggu.

Dalam hal ini nasionalisme yang diinginkan mengandung arti nasionalisme terpadu (integrated nationalism). Nasionalisme sendiri saja lebih banyak menghadapi kendala di lapangan, tetapi hal ini perlu memadukan unsur lain sehingga menjadi kuat dan sedikit banyak menolak kendala pereduksian nasionalisme.

Tentara Pelajar : Aktualisasi dan Kontekstualisasi

Jaman selalu berubah, tetapi semangat pelajar dan dedikasinya harus tetap mengacu pada kepentingan bersama, negara dan masyarakat. Lain undang lain ikannya, lain kail lain jalanya. Demikian sebuah peribahasa yang harus dimaknai bahwa pelajar harus merespon sesuai dengan jamaniahnya. Kalau dulu pelajar bergabung dan berpartisipasi aktif dalam perjuangan, maka pada pasca kemerdekaan ini pelajar harus tetap mempunyai semangat juang untuk membangun nusa dan bangsa Indonesia lewat kreasi-kreasi barunya.

Pelajar sekarang harus mewarisi api perjuangannya. Mencari dan menemukan solusi bagi pembangunan bangsa, baik rohaniyah maupun jasmaniah adalah partisipasi zaman sekarang. Pelajar adalah generasi muda harapan bangsa yang diharapkan mengganti generasi sebelumnya. Oleh karena itu, dengan daya kreasinya pelajar selalu menjadi agen perubahan demi perbaikan kesempurnaan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kerja sama antar pelajar baik dari dalam maupun luar negeri harus dilakukan sebaik mungkin. Mereka akan membentuk jaringan baru yang mengikat kebersamaan dan kejujuran menghadapi masa depan. Kerjasama memudahkan menyelesaikan kesulitan bersama, bak “Ringan sama dijinjing berat sama dipikul”.

Sebagai generasi baru yang rasional tentu mengedepankan cara-cara untuk menghilangkan konflik antara mereka. Konflik berarti menghabiskan tenaga pembangunan. Disamping kehilangan waktu, bangsa kita mengalami set back puluhan atau ratusan tahun ke belakang.

Sebagai kaum intelegensia, pelajar bertanggung jawab nasib bangsa. Pelajar menjadi harapan dan tumpuan bangsa. Akan dibawa kemana bangsa ini tergantung dari para nahkoda pelajar yang membawa dan mengarungi samudra kebahagiaan.

Mereka adalah pilar dan penguat bangsa. Kalau pelajarnya rapuh tentu tidak diharapkan dan sebaiknya pelajarnya harus kuat dengan berbagai prediksi untuk sampai ke tempat tujuan, yaitu mengantar ke gerbang kesejahteraan bersama. Oleh karena itu tidak dapat dipungkiri bahwa pendidikan menjadi garda depan kelangsungan pelajar khususnya dan bangsa Indonesia umumnya. Kemajuan terletak dari bagaimana negara dan bangsa ini mengelola pendidikan anak bangsa.

Catatan Kesimpulan.

Berbagai pendapat yang bernada pesimistis memberi komentar bahwa nasionalisme Indonesia sedang sakit yang dengan kata lain sedang tereduksi, sehingga kurang dari volume sebelumnya. Secara kuantitatif, kalau pengertian nasionalisme disamakan dengan ketika menghadapi Agresi

Belanda maka sebenarnya lain dengan persoalan pelajar sekarang. Dulu perjuangan pelajar terpusatkan secara fisik menghadapi musuh yang dapat dikatakan monolitik, tetapi sekarang musuhnya panca muka dan bervariasi yang politik.

Medan perjuangan pasca kemerdekaan yang bersegi banyak harus dihadapi dengan kemampuan dan keahlian yang beranekawarna pula. Lebih-lebih dengan perubahan sosial dan politik yang serba kompleks itu mengundang penyelesaian secara multikomplek pula. Pelajar sudah pada waktunya meluaskan pandangan ke depan untuk reorientasi.

Globalisasi memaksa pelajar menyiapkan diri dalam berbagai segi agar tidak ditunjang pasar global yang secara langsung mematikan kreasi bangsa dan di sisi lain menjadikan bangsa Indonesia dijadikan pasar bagi produksi negara maju. Apa artinya penguasaan pasca di negara kita. Ini merupakan tantangan bagi pelajar untuk mencari solusi agar bangsa ini tidak terjajah oleh penguasa pasar dan memaksa bangsa ini menjadi konsumen berkelanjutan.

Sekali lagi *renewal moments* harus dilakukan pelajar sesuai dengan tempat dan waktunya. Pelajar harus mengambil prakarsa untuk ikut menuntaskan keruwetan bangsa. Tantangan yang timbul harus mendapat jawaban yang sesuai dengan nasionalisme terpadu (*integrated nasionalism*), bukan etnonasionalisme yang membawa terpisah-pisah Negara Kesatuan sebagaimana yang diperjuangkan pelajar pada masa-masa awal.

Rujukan

- Amrin Imran dan Ariwadi (eds). Peranan Pelajar dalam perang Kemerdekaan. Jakarta: Pusat Sejarah dan Tradisi ABRI, 1985.
- Budiharja dan Suharja, (eds) Buku Informasi Museum: Profil Pelajar Pejuang. Yogyakarta,: Museum Benteng Yogyakarta, 2002.

- Paguyuban tiga tujuh belas. Tentara pelajar dalam perang kemerdekaan dan pembangunan. Yogyakarta: yayasan Pengabdian III-17, 1945.
- Sejarah perjuangan tentara pelajar. Kie III det be 17. Jakarta: Yayasan Bhakti TP Kedu, 1987.
- Smith, Anthony D. Theories of nationalism. New York: Holmes & Meiers, 1983.
- _____, Nationalism and modernism. New York: Routledge, 2001
- Subagijo IN (ed). Perjuangan pelajar IPI-IPPI. Jakarta: Balai pustaka, 1987.
- Suhartono, sejarah pergerakan Nasional, dari Budi Utomo sampai Proklamasi 17 agustus 1945. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994.
- _____, revolusi Agustus: Nasionalisme terpasung dan diplomasi Internasional. Yogyakarta: Laper 2001
- _____, Dkk. Yogyakarta Ibukota RI., 1946-1949. Yogyakarta: Kanisius 2002.

PELAJAR PERANANMU KINI

Oleh : Nur Fadlia Sari

Pelajar dalam usianya yang masih muda, memiliki peran penting dalam kehidupan. Usia muda adalah usia yang dinamis, penuh gejolak dan sangat labil. Manusia yang memasuki usia ini akan dengan mudah mengikuti arus yang begitu kuat disekitarnya, baik arus kebaikan maupun arus keburukan. Dipihak lain pelajar/pemuda adalah motor penggerak bagi perkembangan sebuah peradaban.

DEKONSTRUKSI PERANAN PELAJAR

Dahulu, para pelajar di berbagai sekolah memiliki jaringan, masing-masing mempunyai idiologi yang beralinan. Lihat saja contohnya PII (Pelajar Islam Indonesia) atau GSNI (Gerakan Siswa Nasionalis Indonesia) Kondisi yang memanas pra dan pasca G 30 S PKI membuat warna idiologi yang dimiliki pergerakan pelajar pada saat itu semakin mengental di sekolah-sekolah, bahkan cenderung mengkotak-kotak. Lalu pemerintah membentuk OSIS sebagai satu satunya organisasi pelajar di setiap sekolah, dengan memaksa organisasi lain gulung tikar.

Pada perkembangannya OSIS cenderung menjadi “alat Kontrol” atau bahkan “Mesin Pasung” bagi para pelajar. Selain OSIS, berbagai model depolitisasi dan pemandulan kepedulian pelajar terhadap masyarakat juga digalakkan. Bahkan, politik diharamkan masuk dalam wilayah wiyata mandala.

Hal ini diakui atau tidak, membuat pelajar selama bertahun-tahun menjadi komunitas yang sama sekali “cuek” dalam dunia mereka sendiri, tenggelam dalam “tipu daya” yang luar biasa. Banyak organisasi pelajar yang semakin kehilangan orientasi, bahkan eksistensinya. Sementara itu, bermunculan organisasi-organisasi yang searah dengan kebijakan pemerintah di sekolah, dengan program yang harus sama dengan program pembangunan.

Aliensi pelajar diperparah dengan kondisi masyarakat yang sangat kondusif untuk menciptakan “generasi sampah” “robot robot” dan penghamba kurikulum. Para pelajar di desain untuk menjadi orang-orang yang buta pada kondisi masyarakatnya. Budaya premitif merasuki generasi muda, termasuk pelajar yang telah memandulkan *sense of community-nya*, menggasak dan meruntuhkan karekter mereka menjadi puing-puing yang tidak jelas lagi bentuknya.

ANTARA REFORMASI DAN REVITALISASI PERAN PELAJAR

Reformasi membuka pintu yang selama ini tertutup untu kembalinya pelajar berperan dalam masyarakat. Sayangnya, pintu yang terbuka itu tidak serta merta disambut oleh para pelajar. Banyak yang masih gagap menyikapi perubahan itu, meski ada sedikit yang kemudian berbuat.

Di alam reformasi ini, merupakan kesempatan pelajar untuk membebaskan diri dari doktrinasi perilaku. Saatnya kita untuk revitalisasi peran pelajar. Pelajar adalah himpunan kekuatan besar untuk melakukan transformasi sosial.

Pelajar kini hidup di alam kapitalistik, akibatnya para pelajar sekarang bergaya hidup kapitalis. Ini penyebab berkembangnya westernisme yang berinti amoralisme. Oleh karena itu, kini diperlukan kebangkitan, untuk menuju kearah perbaikan, khususnya dari kaum pemuda atau pelajar. Maka dari itulah diperlukan pula generasi pelajar/pemuda yang berkualitas, baik pintar dalam mata pelajaran dan tanggap terhadap lingkungan. Diharapkan dengan kekuatan pelajar dapat mengubah keadaan Indonesia saat ini menjadi kearah yang lebih baik.

RELEVANSI SEMANGAT SO 1 MARET DENGAN UPAYA MENGGUGAH PERSATUAN DAN KESATUAN

Oleh : H. Markhaban Fakih

1. Perjalanan bangsa Indonesia dalam mencapai cita-citanya, mengalami pasang surut, sejak berupaya memperoleh Kemerdekaan, mempertahankan Kemerdekaan dan mengisi Kemerdekaan. Diantara pasang surut tersebut dalam mempertahankan Kemerdekaan terdapat banyak peristiwa-peristiwa heroik, seperti halnya serangan umum 1949 yang terjadi di kota Yogyakarta.
2. Peristiwa SO 1 Maret senantiasa menjadi bahan pembicaraan dan diskusi yang terus berkembang karena merupakan potongan sejarah yang memiliki dimensi. Baik yang terkait dengan perang militer, politik dan diplomasi, hukum dan peradilan, ekonomi maupun sosial budaya. Secara keseluruhan peristiwa tersebut merupakan puncak kebersamaan dan tingkah laku kolektif sebagai satu kesatuan yang lintas etnis, agama, maupun kelompok-kelompok. Muncul tingkah laku kolektif tersebut, lebih banyak didasarkan pada motivasi tertentu didorong kondisi lingkungan dan akhirnya terwujud dalam tingkah laku setelah dipicu oleh satu insiden atau peristiwa. Dengan demikian teori tingkah laku kolektif seperti yang disampaikan oleh Neil J. Smelser, telah terpenuhi dan terbukti.
3. Perwujudan kesatuan persatuan dalam SO 1 Maret secara fisik terlihat dalam proses persiapan sampai dengan pelaksanaan yang melibatkan semua potensi disertai dengan tekad bersama. Pada waktu itu rencana SO 1 Maret belum terlintas untuk dilaksanakan secara terpadu, namun masih sporadis sebagai wujud rasa dendam atas agresi Belanda terhadap Ibukota RI. Akibat serangan-serangan sporadis, memang belum ada dampak positif karena hasil-hasil yang diperoleh belum menjadi bagi Belanda maupun dunia Internasional. Baru setelah ada

gagasan melaksanakan serangan umum secara serentak pada siang hari di peroleh kesepakatan bahwa dengan serangan umum akan membawa hasil berupa kerugian moril bagi Belanda, adanya dukungan diplomatik terhadap RI pada sidang Dewan keamanan PBB serta secara psikologis meningkatkan moril para pejuang diluar DIY.

4. Secara tehnik militer perang konvensional dalam SO 1 Maret , telah membuktikan tehnik-tehnik perang konvensional secara benar disertai dengan pengalaman gerilya sebelumnya. Bahkan dalam pengaturan pasukan benar-benar menggunakan tehnik yang sangat jitu dengan mengepung kota Yogyakarta secara dari segala penjuru serta mengutamakan optimalisasi daya gerak, daya tembak dan daya gempur. Kesemuanya dapat terlaksana setelah mengetahui semua kemampuan maupun kelemahan dari pihak Belanda.
5. Penyusunan satuan-satuan kepung juga dilaksanakan bersama-sama tanpa membedakan aspek etnis, agama maupun kelompok. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya komandan-komandan satuan dari luar Yogyakarta (suku diluar Yogyakarta) yang beragama berbeda-beda pula. Sebagai contoh penanggung jawab untuk sektor barat dipercayakan kepada Vince Samual.
6. Pada saat ini ditengah-tengah krisis bangsa Indonesia munculah kekhawatiran terjadinya disintegrasi bangsa. Apabila daerah-daerah termotivasi untuk berdiri sendiri dengan lingkungan yang kondusif maka tinggal menunggu adanya faktor pemicu, maka ancaman disintegrasi bangsa akan menjadi kenyataan. Berkaitan dengan hal tersebut semangat juang SO 1 Maret dapat menjadi motivator yang mampu mengalahkan adanya ancaman disintegrasi. Motivasi-motivasi daerah akan dapat dicegah dengan selalu mengutamakan kepentingan bangsa diatas kepentingan kelompok daerah. Tinggal bagaimana para elite politik mampu menjebatani dan mengatur melalui piranti-piranti lunak berupa peraturan-peraturan dan perundangan. Sesungguhnya

akar rumput bangsa tentu menghendaki kedamaian, kesejahteraan dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia.

7. Konflik ataupun perbedaan antar elite politik, belum tentu berakar secara keseluruhan yang menyebabkan perpecahan bangsa. Kemungkinan yang terjadi kepentingan pribadi ataupun kelompok mengabaikan kepentingan bangsa dan kepentingan yang lebih luas lainnya. Yang terakhir harus dipahami jangan sampai muncul pemicu terjadinya disintegrasi bangsa, dengan upaya menciptakan situasi keamanan dan ketertiban secara maksimal. Hal ini bukan berarti memunculkan kembali pendekatan keamanan, tetapi lebih mengedepankan betapa pentingnya terwujudnya rasa aman untuk mencegah timbulnya konflik fisik yang memicu meletusnya disintegrasi bangsa.
8. Upaya yang dapat ditempuh adalah dengan menanamkan semangat perjuangan kepada generasi penerus disertai dengan analisis tentang kerugian yang ditimbulkan apabila tidak terwujud persatuan dan kesatuan. Bentuk penanaman tersebut tentunya sangat banyak, bukan hanya sekedar ceramah-ceramah tetapi bisa melihat secara visual bukti-bukti perjuangan, diberikannya contoh-contoh keteladanan serta bersatunya para elite politik.

OTONOMI DAERAH DALAM PERSPEKTIF SEJARAH

Oleh : Drs. Sudomo Sunaryo

Untuk masyarakat bangsa Indonesia dalam pengalaman sejarah bernegara, telah sedemikian lama terpolakan dalam bentuk-bentuk kerajaan (*monarchi*). Adanya pengaruh dari luar, terutama melalui penyebaran agama, semuanya juga memberikan gambaran tentang kehidupan negara kerajaan. Di Jawa dengan cerita wayang, juga memberikan gambaran yang sedemikian kuat dalam pola-pola negara kerajaan itu.

Dalam praktek pemerintahan kerajaan, kekuasaan mutlak pada Raja. Perdana Menteri (*Rijksbesturende*) dalam kerajaan-kerajaan di Timur, berbeda dengan kerajaan-kerajaan di Barat. Papatih dalem itu hanyalah warangka Dalem. Raja adalah gung binathara, Sabda pandhita Ratu. Oleh karena itu dalam satu negara, tidak ada praktek desentralisasi kekuasaan. Kalau ada berarti separatisme.

Dari revolusi tahun 1945, bangsa Indonesia benar-benar memasuki zaman baru, dengan mendirikan negara kesatuan berbentuk republik. Sedemikian luasnya wilayah negara kita ini, sehingga UUD 45 pun sudah mengisyaratkan adanya pembagian daerah, atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya masing-masing, diantaranya telah pula disebut adanya daerah-daerah yang bersifat otonom.

Sudah ada Semenjak Awal

Daerah-daerah otonom segera terbentuk semenjak awal berdirinya Negara Kesatuan RI. Setelah Kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, maka Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia segera mengesahkan UUD 45 memilih presiden dan wakil presiden dan mengumumkan bahwa wilayah kekuasaan negara meliputi seluruh daerah bekas Hindia Belanda.

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia itu sendiri kemudian menamakan dirinya sebagai Komite Nasional Indonesia yang berfungsi sebagai DPR.

Presiden segera menyusun Kabinet dan terwujud pula pemerintah Pusat. Pemerintah pusat itu kemudian mengutus sejumlah komisaris tinggi RI untuk ke daerah-daerah, dengan tugas menyusun pemerintahan di daerah-daerah, terutama dengan membentuk KNI di daerah dengan menjalankan fungsinya sebagai DPRD. Walaupun awalnya segala sesuatunya belum jelas, belum diatur dengan UU dan belum pula ada pola struktur mekanisme kerjanya, tetapi *de Facto* daerah-daerah otonom itu sudah ada. Khusus tentang pembentukan komite nasional daerah, sudah sempat dibuatkan Undang-undang No. 1 tahun 1945, diumumkan pada 23 November 1945. Undang-undang ini yang dianggap sebagai yang pertama mengatur pemerintahan di daerah, walaupun sifatnya sangat sumir dan tidak disertai penjelasan. Penjelasannya itu menyusul dikemudian hari, diedarkan oleh Kementrian Dalam Negeri.

Tumbuh dan Berkembang

Penyelenggaraan Pemerintahan daerah otonom, ternyata terus tumbuh dan berkembang karena tuntutan dari pertumbuhan dan perkembangan kehidupan negara. Perkembangan itu tidak lepas dari "*Trial and Error*" sejalan dengan praktek demokrasi dalam pemerintahan menurut orde silih berganti.

Ketika pusat pemerintahan Negara berada di Yogyakarta dimasa perjuangan kemerdekaan, terbitlah Undang- undang no. 22 tahun 1948 tentang pemerintahan daerah. Nampaknya ada upaya untuk membagi habis wilayah negara kesatuan RI ini menjadi daerah-daerah otonom yang bertingkat. Adapun titik berat otonomi itu diletakkan di tingkat desa. UUD 45 menyebutnya pemerintahan desa itu memiliki sifat istimewa dengan susunan asli berdasarkan asal usulnya.

Selama 7 bulan negara RI pernah menjadi negara Federasi (Republik Indonesia Serikat) dengan konstitusinya yang baru. Tetapi ternyata hal tersebut tidak membawa perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah-daerah. Bentuk negara Federasi itu memang semata-mata merupakan siasat politik dalam memperjuangkan kemerdekaan terkait dengan diperolehnya pengakuan kedaulatan oleh Belanda.

Sejak 17 Agustus 1950 berlaku UUD sementara (UUDS) yang sempat menerbitkan UUD no. 1 tahun 1957 tentang pokok pemerintahan daerah, didahului dengan UU no 32 tahun 1956 tentang perimbangan keuangan antara negara dengan daerah yang dimaksudkan untuk menumbuhkan otonomi daerah. Sampai di situ ternyata daerah otonom yang dapat dibentuk, hanyalah daerah tingkat I dan daerah tingkat II. Daerah otonom tingkat III belum pernah dapat di bentuk. Sedangkan pemerintahan desa sama sekali belum tergarap. Pemerintahan Desa, Negeri, Marga, Banjar dan sebagainya menjalankan pemerintahannya secara tradisonal di tingkat desa itu, dengan adat yang berbeda-beda pula.

Pada akhir kekuasaan orde lama keluarlah UU no 18 tahun 1965 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah. Prinsipnya wilayah negara akan terbagi habis ke dalam tiga tingkatan daerah otonom, yaitu daerah tingkat I di Propinsi atau Kotaraya, daerah tingkat II di Kabupaten atau kotamadya dan daerah tingkat III di Kecamatan atau Kotapraja. Diluar itu, atau di bawah kecamatan tidak boleh ada lagi daerah otonom. Maka untuk memacu pemerintahan desa yang sudah terlanjur mempraktekkan otonomi desanya diberlakukan aturan peralihan dengan UU no. 19 tahun 1965 tentang Dasapraja. Dari penggabungan desa-desa akhirnya diarahkan untuk menjadikan kecamatan/kotapraja sebagai daerah otonom tingkat III.

Desentralisasi Pemerintahan

Di zaman orde baru nampaknya ada kesempatan untuk mengkaji lebih mendalam tentang penyelenggaraan pemerintahan negara dan pemerintahan di daerah, tidak lagi sekedar jalan. Dari pasal 18 UUD 45

disadari bahwa daerah-daerah besar dan kecil itu tidak harus seluruhnya mempunyai pemerintahan otonom, akan tetapi bisa juga diselenggarakan pemerintahan daerah yang bersifat administratif belaka. Dalam penjelasan pasal 18 itu bahkan ditekan : karena negara Indonesia merupakan negara kesatuan, maka tidak boleh ada daerah yang seolah-olah serupa dengan negara, sehingga ada “Negara di dalam Negara”.

Dengan UU no. 5 tahun 1974 tentang pemerintahan di daerah ditunjukkan ada tiga azas penyelenggaraan pemerintahan di desa, yaitu azas desentralisasi, azas dekonsentrasi, dan azas pembantuan. Pada hakekat ketiga azas ini dilaksanakan secara berbarengan di daerah-daerah, termasuk di daerah otonom. Disatu sisi UU ini tetap memperhatikan pentingnya otonomi daerah yang oleh ketetapan MPRS tahun 1966 mengamanatkan adanya pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah-daerah. Di sisi lain UU juga berkewajiban untuk menjaga kelestarian negara kesatuan yang diamanatkan oleh pasal 18 UUD 45.

Dari berbagai hasil kajian, maka agar sesuatu daerah mempunyai otonomi yang berarti, daerah itu harus mempunyai urusan-urusan yang memang dialokasikan sehingga sanggup melaksanakan tugas mengatur, melayani, dan membangun. Daerah harus diberi kekuasaan dalam hal pengambilan keputusan atas alokasi sumber-sumber daya serta memiliki badan perwakilan yang dalam hal pengambilan keputusannya betul-betul dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.

Dalam suatu kajian untuk menentukan kelayakan dari sesuatu daerah otonom, perlu diperhitungkan adanya variabel pokok tentang : kemampuan keuangan, (pendapatan asli daerah, kemampuan aparaturnya, sejauh mana partisipasi masyarakatnya, adakah pertumbuhan ekonomi daerah yang mampu memberikan dukungan). Demikian pula faktor demografi dan faktor kelembagaan serta administrasi yang kondusif. Sedangkan variabel penunjang adalah : Faktor geografi (iklim, kesuburan, luas daerah) serta faktor sosial-budaya (adat, kelembagaan dan stuktur masyarakat). Disamping itu masih harus diperhitungkan pula variabel khusus, seperti

agama, masalah perbedaan suku agama, ras dan antar golongan serta masalah politik dan keamanan.

Dengan studi kelayakan ini maka sesungguhnya sudah ada pemmikiran apakah daerah otonom itu sebaiknya bertingkat-tingkat atau hanya satu tingkat saja di dalam negara kesatuan RI ini. Dalam paraktek penyelenggaraannya daerah otonom tingkat yang lebih tinggi akan menguasai daerah otonom yang lebih rendah, setidak-tidaknya yang lebih rendah itu menjadi lemah dan cenderung menjadi bergantung pada daerah otonom tingkat atasnya. Karena daerah otonom harus memiliki kemampuan mandiri dalam mengurus serta mengatur rumah tangganya sendiri maka dari studi kelayakan itu menyimpulkan bahwa sesungguhnya daerah seluas kabupaten di nilai terlalu kecil untuk menjadi otonom. Rata-rata kabupaten yang ada, kurang memiliki sumber daya yang memadai. Sebaliknya daerah otonom di propinsi, banyak yang terlampau besar. Di satu sisi timbul kekawatiran kalau propinsi menjadi daerah otonomi suatu ketika akan timbul keinginan memisahkan diri dari negara kesatuan RI, karena merasa dirinya kuat. Oleh karena direkomendasikan sebaiknya otonom itu satu tingkat saja, sedangkan letaknya ada di daerah bekas karisidenan di zaman dahulu. Jikalau demikian maka pemerintahan Propinsi, pemerintah Kabupaten, sifatnya hanya administratif. Gubernur diberi kedudukan setara dengan menteri dalam kabinet negara, ada menteri-menteri sektoral dan ada menteri-menteri regional.

Dalam penyusunan UU yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah, dapat dimaklumi kalau rancangannya sampai berjumlah 8 draft. Dimasa orde baru itu pula ada kecenderungan kuat untuk mengutamakan jaminan stabilitas dalam kehidupan negara yang sedang membangun dan diupayakan agar penyelenggaraan pemerintahan daerah seluruh Indonesia terdapat penyeragaman.

Demikianlah UU No. 5 tahun 1974 tentang pemerintahan di daerah untuk pertama kalinya mencantumkan kata “di” daerah, karena penyelenggaraan pemerintahan di daerah-daerah itu bukan monopolinya otonomi tetapi dilaksanakan bersama-sama dengan azas dekonsentrasi dan

pembantuan. Sesudah itu timbul pula pemerintahan daerah administratif, bahkan di kemudian hari banyak model-model daerah khusus atau daerah otoritan yang di kuasai oleh pemerintah pusat secara langsung.

Daerah otonom memang ada dua tingkat, tetapi titik berat akan diletakan di kabupaten (daerah tingkat II). Pemerintahan desa tetap dihidupkan dengan otonomi desa yang mempunyai ciri tersendiri, berbeda dengan otonomi daerah.

Otonomi itu pada hakekatnya berwujud penyerahan urusan dari pemerintah pusat (Devolusi) pada daerah. Tetapi di samping itu pemerintah pusat masih menempatkan perangkat pusat di daerah-daerah yang diberi pelimpahan wewenang (dekonsentrasi). Maka di daerah-daerah terdapat intansi-intansi yang seolah-olah kembar : ada Dinas Kesehatan (perangkat otonom) dan ada Kanwil Kesehatan (Perangkat dekonsentrasi), demikian juga di tingkat Kabupaten.

Undang undang yang ditetapkan tahun 1974 itu, ternyata tidak segera ditindaklanjuti. Banyak PP yang tidak di buat sampai berlama-lama sedangkan pelaksanaan UU itu secara situasional dikendalikan secara langsung dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan pusat. Maka pada hakekatnya pemerintah pusat nampak semakin berkuasa. Belakangan di ketahui memang ternyata banyak kebijaksanaan pusat yang diwarnai oleh KKN. Banyak “rekayasa” melalui berbagai kebijaksanaan itu yang menjadikan pemerintah daerah tidak dapat berbuat apa-apa.

Efektif, Efisien dan Demokratis

Zaman reformasi menuntut adanya demokratisasi dalam penyelegaraan pemerintahan. Bahwa otonomi daerah tidak hanya diperlukan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien saja, akan tetapi juga terkandung nilai-nilai demokratisasi dalam negara republik ini.

Pada tahun 1999 telah terbit tiga UU baru : yaitu UU No. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, UU No. 25 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, dan UU No. 28 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN.

Pemerintahan pasca orde baru memang tidak dapat terhindar dari banyak gejolak justru lahir di tengah masa kritis di mulai dari krisis moneter kemudian merambat ke krisis ekonomi sampai ke krisis kewibawaan dan krisis hukum, sehingga kita namakan sebagai krisis multidimensional. Tiga buah UU baru yang diterbitkan tahun 1999 itupun terasa disusun tergesa-gesa. Akan tetapi sesungguhnya bukan karena tergesa-gesa, melainkan karena emosional. Apa yang terasa tertekan, terpasung, dibatasinya ruang gerak dan kemerdekaan demokrasi terutama oleh daerah-daerah selama masa kekuasaan orde baru yang menggunakan kekuasaan secara sentralistik bahkan arogan, maka tiba saatnya “dibalas secara setimpal”.

Dendam seperti itulah rasanya mewarnai pelaksanaan otonomi daerah pasca orde baru, dengan memanfaatkan setiap celah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru. Dalam praktek di masa orde baru banyak pejabat pemerintah, terlebih-lebih jabatan politis atau jabatan negara seperti, Gubernur, Bupati, anggota DPRD dsb diisi oleh orang-orang tertentu atau orang-orang yang sudah ditentukan oleh pemerintah pusat. Maka menuntut hak-hak otonomi daerah sekarang ini, daerah mengusulkan dan memperjuangkan orang daerah sendiri. Siapapun orangnya yang di “drop” dari pusat akan di tolak. Kalau dulu UU no. 5 1974 membatasi kewenangan DPRD, maka sekarang ini ada kecenderungan DPRD secara semena-mena memecat Bupati bahkan Gubernurnya.

Gejala ini kiranya bisa dimengerti, apabila berjalan untuk sementara waktu. Akan tetapi setelah sekian lama, masyarakat sendiri merasakannya bahwa gejalanya dalih untuk mengejar efektivitas dan efisiensi, maupun dalih untuk demokratisasi dalam mengembangkan otonomi daerah itu lebih

banyak sebagai topeng bagi banyak pemimpin yang mengejar kepentingan pribadi atau kepentingan golongan bukan kepentingan rakyat.

Dalam rangka membangun pemerintahan, khususnya pengembangan otonomi daerah, rakyat luas masih mengharapkan dipenuhinya pesan-pesan pendiri negara dahulu seperti tertuang dalam pelajaran UUD 45. Bahwa untuk memahami ketentuan Perundang-undangan sampai pada dasar hukum negara yang tertulis supaya benar dalam praktek penyelenggaraan negara, diperlukan pemahaman yang sedalam-dalamnya hingga dapat kita temukan suasana kebatinannya. Maka yang sangat penting didalam penyelenggaraan pemerintahan dan dalam hidup bernegara ialah semangat bangsa kita terutama semangat yang harus dimiliki oleh para penyelenggara negara dan semangat para pemimpin pemerintahan.

Sekarang ini kita hidup dalam negara yang berbentuk republik. Yang berkuasa sebagai raja, adalah rakyat seluruhnya. Itulah sebabnya UUD 45 menyebutkan bahwa sistem pemerintahan negara ini berdasar atas hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*Machtstaat*). Adapun para penyelenggara negara dan pemerintahan dari yang duduk di lembaga tertinggi negara, lembaga-lembaga tinggi negara dan seterusnya, hingga sampan penyelenggara pemerintahan di daerah, hanyalah sebagai “*Warangka Dalem*”.

PEREMPUAN MASA KINI ANATARA IDEALITAS DAN HEDONISITAS

Oleh : Tri Ihsani

Pendahuluan

Setiap tanggal 21 April kita memperingati hari Kartini. Selalu terjadi fenomena yang hampir sama dalam setiap tahunnya mengenai peringatan tersebut. Sesalu dengan lagu Ibu Kita Kartini serta lomba memasang sanggul, kekebaya, sampai lomba memasak. Yang diperingati hanya sebatas sebuah rutinitas tanpa memahami makna yang terkandung di dalamnya, yaitu mengapa Kartini disebut sebagai pejuang. Hanya sedikit orang yang mengerti mengenai pemikiran Kartini yang dituangkan dalam surat-suratnya.

Kartini adalah putri seorang bupati Jawa. Meskipun ia tidak berjuang dengan menggunakan senjata, namun keberaniannya dalam memperjuangkan nasib perempuan telah menjadikannya salah satu pembela hak-hak perempuan yang terkemuka pada masanya. Lewat tulisanlah ia menolak kolonialisme dan feodalisme. Ia adalah perintis emansipasi perempuan di Indonesia. Perempuan Jawa yang pada waktu itu hidup di bawah domisi patriarkhi absolut dan feodalisme, praktek poligami dan adat pingitan bagi para gadis yang meningkat remaja. Hal semacam itu menumbuhkan keyakinan kuat bagi perempuan untuk lepas dari ketertindasan (marlita, 2000). Bagi Kartini, Pendidikan bagi kaum perempuan adalah sangat penting dalam rangka mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan.

Kartini yang memusatkan perjuangannya melawan feodalisme dan kolonialisme karena ia percaya bahwa keduanya menciptakan penderitaan rakyat Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan. Nasionalisme yang diperjuangkan Kartini dalam beberapa hal menjiwei organisasi nasionalisme pertama yaitu Boedi Oetomo. Secara umum pun, pemikiran kartini mengenai nasionalisme, kemerdekaan dan persamaan terus digaungkan oleh organisasi-organisasi perempuan dan organisasi dan organisasi nasioanal yang terus bertambah pada tahun-tahun berikutnya. (Marlita, 2000).

Perempuan Indonesia Masa Kini

Masa sekarang telah sangat jauh berbeda dengan zaman Kartini dulu. Perempuan bias mendapatkan hak-haknya secara lebih mudah dan luas. Demikian juga untuk generasi mudanya.

Berbicara mengenai pemuda, usia muda adalah usia penuh energi, harapan dan sekaligus penuh masalah, yang dialami oleh laki-laki maupun perempuan. Dalam usia itu seluruh energi secara fisik maupun emosional sedang berada dalam titik puncak. Keingin tahuan akan berbagai hal yang berbagai aktivitas dan kreativitas untuk menunjukkan kemampuan serta keberadaannya, sekaligus bagian dari proses memperkaya pengalaman lahir batin terus bergelora. Gejala semacam ini meliputi perasaan kaum muda laki-laki maupun perempuan. Apapun sebutan mereka, pemuda, siswakah atau bahkan mahasiswa. Sekali mereka pun salah langkah atau bahkan sesat pikir.

Gejala kaum muda ini, butuh saluran-saluran untuk menyalurkan energinya yang bergejolak. Mereka butuh informasi dan bantuan dalam melihat dan menyelesaikan masalahnya.

Pemuda, pelajar dan mahasiswa, sesungguhnya menjadi tumpuhan utama untuk menjadi kelompok pelaku perubahan, untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib dan sejahtera. Dan nantinya, dikemudian dalam lagu bangun pemuda-pemudi :

***Masa yang akan datang kewajibanmulah
Menjadi tanggunganmu terhadap nusa***

Untuk membangun dan mencapai suatu cita-cita mulia, yaitu tercapainya masyarakat adil dan sejahtera, kita harus punya harapan dan kemauan kerja keras menjadikannya sebagai suatu kenyataan.

Beberapa tahun terakhir, seiring dengan modernisasi, dunia media masa membuka peluang selebar-lebarnya bagi para remaja. Sekian bintang

remaja pun bermunculan meramaikan dunia hiburan (sinetron, film dan model). Meskipun kehadiran mereka di dunia pertelevisian juga tidak lepas dari remaja yang serba hedonis dan tidak jarang juga menampilkan kehidupan percintaan remaja yang bias dibidang kelewat batas. Sekarang pun sedang marak adanya ruang-ruang bagi para remaja untuk menyalurkan minat dan bakatnya untuk menjadi seorang bintang muda baru semacam Akademik Fantasi (AFI) yang rantingnya di televisi langsung melejit.

Di dunia pendidikan, jumlah perempuan yang sampai pada Perguruan Tinggi jumlahnya terus meningkat. Rata-rata mereka pun lulus cepat dengan IPK yang cukup memuaskan jika dibandingkan dengan laki-laki. Banyak mahasiswa yang berprestasi secara akademi, Demikian juga dengan pelajar perempuan. Perempuan muda kita banyak yang berprestasi, bahkan sampai ke tingkat Internasional pun.

Artinya bahwa sebenarnya banyak tempat dan ruang bagi generasi muda khususnya perempuan agar suaranya di dengar, diakui eksistensinya, diakui prestasi dan potensinya berkesan, kesempatan dalam pengembangan minat dan bakat, pengambilan keputusan, sampai hak untuk sarana dan prasarana pendidikan (Semai, 2002)., sehingga mereka biasa dapat mandiri dan bertanggungjawab pada diri dan masa depannya daripada sekedar hura-hura atau nongkrong di mall.

Di sisi yang lain, budaya kita telah menanamkan pembagian peran, ciri, sifat dan nilai-nilai yang tidak adil sejak usia dini, terhadap anak laki-laki dan perempuan. Akibatnya dalam relasi keseharian antara laki-laki dan perempuan dalam lingkungannya pendidikan maupun di luar lingkungan itu, timbul berbagai masalah dan ketidakadilan. Dari mulai soal kepemimpinan,.

Berbicara mengenai mahasiswa, pemuda yang bias dibidang intelektual, disana banyak mahasiswa yang aktif, misalnya dengan mengikuti organisasi yang ada di kampus. Tetapi soal kepengurusan organisasi mahasiswa, selalu saja ceritanya dari waktu ke waktu adalah soal dominasi

mahasiswa laki-laki di tubuh organisasi tersebut. Kalupun ada perempuan, mungkin dapat dihitung dengan jari, berapa jumlah perempuan sebagai ketua senat di seluruh fakultas di perguruan tinggi maupun swasta. Demikian juga dengan pemilihan jurusan-jurusan baik dari tingkat SMU maupun sampai di perguruan tinggi. Selalu saja terjadi pengelompokan yang tidak adil, jurusan-jurusan ilmu pasti (eksakta) selalu dianggap lebih pas untuk laki-laki dan perempuan dianggap pas masuk jurusan social. Padahal ilmu pasti atau pun social dapat dipelajari oleh siapa saja, dan tidak ada hubungannya dengan jenis kelamin.

Benar apa yang dikatakan oleh Kartini (Toer, 2000) bahwa pendidikan seorang perempuan akan menjadikan dia seorang isteri dan ibu yang lebih baik. Nilai-nilai budaya kita yang menempatkan perempuan pada posisi domestik (rumah tangga), sehingga ada pemikiran bahwa perempuan tidak usah sekolah tinggi dengan jurusan yang sudah ditentukan khusus untuknya. Karena meskipun sudah berpendidikan tinggi toh akhirnya kembali ke dalam rumah. Sekarang ini jumlah perempuan yang sampai ke perguruan tinggi lumayan banyak. Merekapun rata-rata berprestasi dan lulus cepat dibandingkan dengan kaum laki-laki. Tetapi ketika sudah berumah tangga mereka akan kembali ke rumah masing-masing dan mengabdikan kepada suami.

Penutup

Berbicara mengenai permasalahan perempuan tidak bias dilepaskan dari perbicaraan mengenai konsep yang menempatkan perempuan sebagai *The second sex* (Adullah, 1977). Patriarki sebagai sebuah struktur budaya telah mengakar kuat selama beratus-ratus tahun lamanya. Budaya yang menyebabkan diskriminasi, kekerasan, peminggiran sampai peran ganda terhadap perempuan ini memang turut dilanggengkan oleh struktur negara juga agama. Kebijakan yang ada di negara kita jarang yang berpihak kepada kaum perempuan.

Adalah suatu hak dan kebebasan bagi setiap orang, termasuk perempuan dan bermasyarakat yang adil dan demokratis, serta yang menghargai martabat kemanusiaan kita. Kita paham akan besarnya tantangan bangsa yang harus dihadapi bangsa ini mengingat terpuruknya perekonomian negara kita dan keroposnya kelembagaan politik kita ditingkat nasional, regional dan lokal.

Pemuda sebagai generasi penerus bangsa memegang peranan penting dalam perubahan bangsa ini. Masa muda haruslah diisi dengan kegiatan kegiatan yang bermanfaat. Maka peran berbagai pihak juga diperlukan dalam hal ini, terutama orang tua dalam mendidik anaknya.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Irwan. 1997. Sangkan para gender. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Marlita, Tita dan Kristi P. 2000. Pergerakan Perempuan Indonesia. Makalah dalam Pergerakan Perempuan Indonesia dalam masyarakat yang tengah berubah. Jakarta. Program Pusat Studi Kajian Wanita Program Pasca Sarjana UI.
- Makalah > 2004. Jalan Keluar Bagi Perempuan Indonesia dari cengkaraan Penindasan. Jakarta: PRD.
- Semai. Edisi XXII Mei 2002 Jakarta: Koalisi Perempuan Indonesia.
- Toer, Pramodya Ananta. 2000. Panggil Aku Kartini Saja. Jakarta : Penerbit Hasta Mitra.

KEPEMIMPINAN NASIONAL INDONESIA SEKARANG INI

Oleh : Prof. DR. Ki Supriyoko, M.Pd.

A. Kepemimpinan Nasional dalam Teori

1. Pemimpin dan kepemimpinan adalah dua hal yang berbeda, meskipun kedua tidak dapat saling dipisahkan. Pemimpin lebih mengacu kepada seseorang atau sekelompok orang yang memimpin suatu organisasi (*people*), sedangkan kepemimpinan adalah koordinasi aktivitas dari para pemimpin untuk mencapai tujuan organisasi (*activity*). Dalam konteks kepemimpinan nasional, tujuan organisasi adalah tujuan bangsa Indonesia. Disini kata kuncinya adalah tujuan bangsa serta koordinasi aktivitas.
2. Setiap orang pada dasarnya merupakan pemimpin di tingkat dan untuk konteksnya masing-masing, bahkan banyak orang yang dalam waktu bersamaan menjadi pemimpin di berbagai organisasi sekaligus. Misalnya ia sebagai pemimpin negara sekaligus sebagai pemimpin partai, pemimpin organisasi sosial dan pemimpin keluarga.
3. Setiap kegiatan pada dasarnya merupakan proses kepemimpinan di dalam skala masing-masing. Skala kepemimpinan ditentukan banyak sedikitnya yang terlibat dalam organisasi atau besar kecilnya organisasi serta kompleksitas permasalahan dalam mencapai tujuan organisasi.
4. Secara spesifik kepemimpinan memiliki karakteristik sebagai berikut:
 - a. Bukan merupakan perorangan tetapi merupakan aktivitas.
 - b. Koordinasi strategi untuk mencapai tujuan
 - c. Koordinasi pengalaman, ketrampilan dan pengetahuan

- d. Tenaga yang tidak dapat dilihat dengan mata (Kasat mata)
 - e. Diagnosi dengan usaha-usaha kelompok atau orang-orang.
 - f. Karisma sangat membantu tetapi tidak dapat menggantikan, dan
 - g. Koordinasi langkah-langkah untuk menjadikan sesuatu lebih baik.
5. Terdapat sembilan persyaratan bagi seorang pemimpin untuk dapat menjadikan dirinya sebagai pemimpin yang efektif. Adapun kesembilan persyaratan yang dimaksud adalah Sbb:
- a. Memiliki antusiasme terhadap bidang tanggungjawabnya
 - b. Dapat menentukan tujuan organisasi secara realistis
 - c. Dapat menjadi teladan perilaku bagi orang lain (terpimpin)
 - d. Dapat membuat keputusan yang “jernih” dan jelas
 - e. Mau menerima perubahan-perubahan yang harus terjadi.
 - f. Mampu mengoperasi, mengkoordinasi dan mengkomunikasikan
 - g. Mau mendengar masukan dan keluhan orang yang dipimpin
 - h. Mau menerima kritik-kritik yang konstruktif
 - i. Mampu membuat : *tim kerja* ” yang solid dan terpercaya
6. Untuk kepemimpinan secara tepat diperlukan pertimbangan “ketupat” yaitu sbb:
- a. Keadaan (*Condition*) dalam hal ini pemimpin harus mempertimbangkan didalam keadaan yang bagaimana kepemimpinan itu akan diterapkan.
 - b. Waktu (*time*) dalam hal ini pemimpin harus mempertimbangkan dalam waktu apa kepemimpinan itu akan diterapkan, dan
 - c. Tempat dan situasi (*Place and Situation*) dalam hal ini pemimpin harus mempertimbangkan tempat mana dan situasi bagaimana kepemimpinan itu akan diterapkan.

7. Teori “Trilogi Kepemimpinan” (versi Tamansiswa) mengandung tiga komponen dasar. Adapun ketiga komponen dasar yang dimaksud itu adalah Sbb:
 - a. “Ing Ngarso Sung Tulodho” maksudnya ketika seorang pemimpin itu berada di depan maka ia harus dapat memberi contoh dan dicontoh oleh dipimpin.
 - b. “Ing Madya Mangun Karsa” maksudnya ketika seorang pemimpin itu berada ditengah harus dapat membangun dan membangkitkan semangat dan motivasi yang dipimpinnya.
 - c. “Tut Wuri Handayani” maksudnya ketika seorang pemimpin berada dibelakang harus mampu mengikuti secara arif terhadap ide-ide yang dipimpin.

C. KEPEMIMPINAN DALAM REALITAS

1. Mengacu kepada sejarah Indonesia klasik, proses awal tumbuhnya bangsa Indonesia ada dua kutub yang seiring diacu; Pertama, lahirnya bangsa Indonesia secara embrional tumbuh semenjak ke 14 yaitu zaman Majapahit dan Kedua lahirnya bangsa Indonesia secara embrional bahkan sudah ada semenjak abad ke 7 zaman Sriwijaya. Dikedua zaman ini sudah ada keinginan dari pemimpin kerajaan untuk “mempersatukan” Indonesia meskipun dari sisi semantik istilah Indonesia itu sendiri belum lahir.
2. Mengacu sejarah Indonesia modern, proses awal tumbuhnya bangsa Indonesia dimulai semenjak lahirnya Budi Utomo (BO) pada tahun 1908 yang di anggap sebagai organisasi (politik) yang pertama di Indonesia. Adanya keinginan BO untuk memperjuangkan perbaikan bangsa Indonesia merupakan titik awal bangsa Indonesia itu sendiri, meskipun ketika itu BO belum memakai istilah Indonesia dalam berbagai kenyataannya.

3. Bangsa Indonesia adalah bagian dari bangsa-bangsa lain yang ada dimuka bumi ini, secara organisasi Indonesia merupakan salah satu anggota dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang secara umum memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan bangsa-bangsa lain di dunia ini.
4. Dari ketiga butir tersebut dapat dimunculkan tujuan nasioanal bangsa Indonesia yang meliputi tujuan idiologis dan tujuan politis. Secara idialis, tujuan bangsa ini adalah mencapai persatuan dan kesatuan bangsa; sedangkan secara politis, tujuan bangsa adalah mampu unjuk prestasi secara internasioanal diberbagai bidang sehingga dapat berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan bangsa-bangsa lain didunia ini.
5. Tujuan nasional secara idiologis sampai sekarang belum tercapai secara optimal. banyak kasus diberbagai negara seperti di Papua dan Aceh menunjukan kepada kita bahwa tingkat ketercapaian tujuan persatuan dan kesatuan bangsa masih rendah. Terjadinya sistem pemerintahan dari yang sentralistis ke desentralistis yang lebih dikenal dengan otonomi daerah dari banyak sisi juga mengandung bom waktu yang dapat memporandakan persatuan dan kesatuan bangsa bila tidakantisipasi sejak awal.
6. Tujuan nasional secara politis sampai sekarang ini juga belum tercapai secara optimal. Rendahnya peringkat mutu manusia (*Human Devolopment Index*) , rendahnya angka harapan hidup (*Lafe expectancy*) rendahnya tingkat pendidikan (*Educational Index*) dsb, bangsa Indonesia menunjukan ke belum optimalan pencapaian tujuan politis bangsa kita. Hal ini tentu saja berkait dengan martabat bangsa Indonesia dimata masyarakat dunia.
7. Keadaan tersebut merupakan “buah” dari kepemimpinan nasional kita yang sekaligus menunjukan bahwa mesin kepemimpinan kita belum berjalan secara lurus itulah sebabnya diperlukan perbaikan dan atau penggantian terhadap komponen-komponen yang sudah

rusak agar mesin kepemimpinan nasional dapat berfungsi secara optimal.

Dengan adanya perbaikan atau penggantian ini terdapat koordinasi aktivitas yang memungkinkan tercapainya nasional secara optimal.

C. PENUTUP

Tahun 2004 mendatang adalah tahun atau momentum yang sangat strategis untuk memperbaiki kepemimpinan nasional. Agar tujuan nasional kita dapat dicapai secara optimal maka kinerja kepemimpinan kita harus maksimal, dan agar kinerja kepemimpinan nasional kita dapat maksimal maka dukungan pemimpin yang baik sangat diperlukan.

Oleh karena itulah tahun 2004 nanti harus dapat kita manfaatkan untuk memilih para pemimpin yang baik.

KONSEP KEKUASAAN JAWA DULU DAN SEKARANG

Oleh : G Moedjanto.

Konsep Kekuasaan Jawa

Konsep kekuasaan Jawa disebut pula sistem atau doktrin keagungbinataran.

Di dalam konsep itu terkandung pengertian agung binatara, bahu denda nyakrawati, berbudi bawa leksana ambek adil paramarta (Besar laksana dewa, pemelihara hukum dan pemelihara dunia, meluap budi luhur mulainya dan bersifat adil terhadap sesama).

Dari keterangan tersebut tampak raja Jawa berkuasa secara *absolut* namun kekuasaan yang absolut itu diimbangi dengan kewajiban moral yang besar juga untuk kesejahteraan rakyatnya. Oleh karena itu dalam konsep kekuasaan dikenal juga tugas raja "Jaga tata titi temtremit praja" (Menjaga ketertiban dan kesejahteraan rakyat).

Dengan demikian sistem kekuasaan Jawa menyeimbangkan antara kekuasaan absolut raja dan kewajiban absolut demi menjaga kesejahteraan rakyat yang diperintahkan. Rakyat berkewajiban *ngemban dawuh dalem* (Melaksanakan perintah raja).

Keseimbangan atau hak dan kewajiban raja dan rakyat merupakan gambaran prinsip jumbuhing atau pamoring gusti dan kawula (Bersatunya raja dan rakyat).

Supaya kekuasaan itu berdaya dan berhasil guna, maka dalam konsep kekuasaan Jawa dikenal adanya konsep kewilayahan dan birokrasi serta dibuat pedoman perilaku bagi para penguasa dan rakyat.

Tak ada yang salah sebagai konsep abad ke 17 sebagai sistem untuk menjawab pertanyaan abad itu. Tetapi dalam praktiknya nilai yang dijalankan hanyalah yang menguntungkan penguasa misalnya janji Pakubuwono ke II memberikan Sukowati pada Mangkubumi.

Konsep Kewilayahan

Konsep kewilayahan negara tercermin dalam gambaran sebagai berikut :

1. Pada tingkat pusat terdapat *keraton, negara* atau *kotagara*, yaitu wilayah inti tempat tinggal raja dan keluarganya.
2. *Negara agung*, yaitu daerah terletak *tanah luhuh (Apanage)* dari para bangsawan keluarga bangsawan.
3. *Manca negara* yaitu daerah darat diluar daerah *negara agung*, kira-kira Panaraga ke timur dan Purwarejo ke barat.
4. Daerah *pesisir wetan*, kira-kira Demak ke timur dan *pesisir kilen*, kira-kira demak ke barat.
5. Daerah seberang, yang terletak di Sumatera selatan, Kalimantan selatan dan Sulawesi selatan.

Birokrasi dan Piwulang

Birokrasi Mataram menyangkut urusan pusat dan daerah. Di pusat pemerintahan dipimpin oleh Patih (Pepatih) dalem. Ia membawahkan sejumlah pejabat atau nayaka, semacam kepala departemen, yang disebut Wedana. Patih juga membawakan militer dan para bupati.

Birokrasi Kabupaten merupakan replika dari birokrasi kerajaan. Kalurahan merupakan replika dari kabupaten. Bupati pada hakekatnya adalah raja kecil atau taklukan raja besar.

Doktrin Keagungbinataran mengajarkan bahwa raja harus selalu membangun kerajaan, sehingga kerajaannya menjadi pusat politik yang tertinggi dan paling kuasa. Secara singkat menurut konsep kekuasaan Jawa raja besar ditandai oleh :

1. Wilayah Kerajaannya sangat luas;
2. Daerah taklukan juga sangat luas disertai oleh barang persembahan (upeti) yang amat banyak.

3. Kesetiaan para bupati dan punggawa lainnya dalam menunaikan tugas.
4. Kebesaran dan kemeriahan pada waktu ada upacara kerajaan;
5. **besarnya tentara;**
6. Kekayaan yang dimiliki;
7. Kekuasaan tunggal di tangan raja.

Birokrasi Mataram sudah cukup rumit. Dalam abad ke 17 di Mataram terdapat sekitar 150 jabatan. Jadi spesifikasi tugas-tugas dalam birokrasi sudah terbentuk.

Demi berputarnya birokrasi, Mataram perlu mengembangkan piwulang (ajaran). Diantara piwulang itu termuat dalam buku *Sastra Gending Nitistruti, Nitisastra, Panitisastra, Wulangreh, Wedatama dan Astabrata*.

Bangsawan Jawa diharapkan mahir dalam olah keprajuritan, kaprajan (pemerintahan), olah bahasa, olah beksa (tari) dan tembang (nyanyi) dan berperilaku satria (*gentleman*) dan perwira. Mereka siap mengemban konsep kekuasaan Jawa.

Konsep Kekuasaan Jawa Sekarang

Masyarakat dan kebudayaan sudah berubah maka berubah pula konsep kekuasaan Jawa. Konsep kekuasaan Jawa, kalau masih ada, hanya tinggal dalam keraton. Di luar keraton berlaku budaya politik baru, yang merupakan paduan budaya Jawa dan non-Jawa.

Dalam realita tampak terjadinya deJawanisasi kebudayaan Jawa, dan sebaliknya terdapat proses jawnisasi kebudayaan non-Jawa, misalnya meluasnya bentuk bangunan joglo, beberapa istilah Ing Ngarso sung tulada, ing madya mangun karsa, tutu wuri handayani dan rumusan dasar negara Pancasila.

Budaya demokrasi merebak, begitu juga nilai-nilai hukum, dan lain-lain.

Penghasilan Negara

Dalam negara Jawa penguasa memerlukan penghasilan untuk penyelenggaraan aktivitas negara. Ada dua cara bagi negara untuk memperoleh penghasilan:

1. Pajak (*Contingeten*)
2. Setoran Paksa (*Verpligte leverantie*)

Pajak yang dipungut secara berantai dari penguasa yang paling rendah sampai yang paling tinggi, dalam berbagai bentuk.

Setoran paksa dalam bentuk upeti atau persembahan kepada penguasa. Disamping itu ada berbagai bentuk wajib, kerja wajib untuk lurah, bupati dan raja.

Demikianlah bentuk-bentuk penghasilan negara yang mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Dengan penghasilan-penghasilan tersebut para penguasa membiayai penyelenggaraan negara. Bentuknya mengalami perkembangan antara terkait dengan keharusan mendapat persetujuan rakyat lewat wakil-wakilnya.

Demokrasi atau Feodalisme

Persoalan yang sering muncul dikalangan masyarakat adalah pemahaman tentang demokrasi dan feodalisme. Ada pendapat pada saat sekarang sistem politik atau kemasyarakatan yang dikehendaki masyarakat adalah demokrasi. Sistem itu sering dipertentangkan dengan feodalisme.

Sampai awal abad ke 19 memang kerajaan-kerajaan di Jawa masih dapat menyelenggarakan kekuasaan yang feodalistis, yang sering dinyatakan menindas atau memeras rakyat. Karena itu rakyat berjuang memerangi demokrasi dan mengalahkan feodalisme.

Perjuangan itu berhasil. Maka muncul aliran yang melawan pikiran feodalisme. Tanda-tanda yang hendak mencungulkan feodalisme harus ditolak, termasuk penetapan Sri Sultan HB X menjadi Gubernur DIY.

Anggapan di Yogyakarta ada refeodalisme adalah keliru. Ada banyak indikator demokrasi, misalnya adanya kebebasan berkumpul dan

berserikat, kebebasan mengemukakan pendapat adanya sistem perwakilan rakyat, pembatasan waktu bagi seseorang untuk memegang jabatan atau adanya sistem pergantian pemimpin. Jelas sistem penetapan pergantian pejabat bukan satu-satunya indikator demokrasi, dan pemilihan bagi seseorang menjadi pejabat bukan jaminan demokrasi (Suharto dipilih tetapi ?). Lain-lain indikator dapat pembaca tambahkan sendiri, misalnya terkait dengan pengangkatan Amin Rais, A.M. Fatwa dan Salosa (Gubernur Papua) menjadi Kanjeng Pangeran Amin Rais, Kanjeng Pangeran A.M Fatwa dan Kanjeng Pangeran Salosa pada tanggal 28 September 2003.

Renungan Lanjutan

1. G. Moedjanto, *The Cocept of Power in Javanece Culture*
2. G. Moedjanto , *Konsep Kekuasan Jawa Penerapannya oleh Raja-raja Mataram*
3. Soemarsaid Moertono, *Negara dan Usaha Bina Negara di Jawa Pada Masa lampau.*
4. G. Moedjanto, *Kasulatan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman.*

PENDIDIKAN DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF SEJARAH

Oleh : Joko Suryo

1. Pendahuluan

Pembahasan tentang masalah pendidikan di Indonesia melalui perspektif sejarah adalah sangat menarik. Melalui histories tersebut , diharapkan akan dapat dipahami fase-fase perkembangan pendidikan di Indonesia dari masa lampau hingga masa kini dan dapat diproyeksikan perkembangan pendidikan di masa depan. Untuk itu maka secara ringkas uraian ini dimaksud untuk meninjau perjalanan pendidikan di Indonesia memulai tiga fase perkembangan pendidikan pada masa kolonial dan fase perkembangan pendidikan pada masa kemerdekaan.

Fase pertama, Mencakup periode perkembangan pendidikan pada masa masyarakat hidup dalam system masyarakat dan kebudayaan trasional, yang berlangsung pada masa kejayaan kerajaan nusantara, yaitu dari awal abab masehi sampai dengan abab ke -15 dan dari abab ke -16 sampai abab ke -18. Kedua periode itu berlangsung pada masa kebudayaan Hindu-Budha dan islam mempengaruhi perkembangan kehidupan masyarakat Indoensia baik dalam bidang politik, social, ekonomi maupun cultural.

Fase Kedua, mencakup perkembangan pendidikan pada masa masyarakat Indonesia hidup di bawah pengaruh system pemerintahan kolonial Belanda, yaitu pada periode 1800-1943 dan masa pemerintahan pendudukan Jepang, yaitu periode 1942-1945.

Fase ketiga, mencakup perkembangan pendidikan dari sejak lama Proklamasi Kemerdekaan sampai pada masa mutakhir, yaitu dari sekitar tahun 1945 hingga masa kini. Fase ini menggambarkan tentang bagaimana sistem pendidikan mengalami perubahan structural masyarakat Indonesia Indonesia dari masyarakat lama ke masyarakat baru, yang berlangsung sejak masyarakat Indonesia bebas dari masa penjajahan hingga usaha pembangunan bangsa dan negara secara dinamis berkesinambungan dilakukan.

2. Pendidikan pada Fase Pertama : Pendidikan Tradisional dan Pergumulan manusia Harmonis Berintegrasi dengan alam.

Pendidikan pada fase pertama merupakan fase yang berlangsung pada masa masyarakat Indonesia masih hidup dalam ikatan tradisi masyarakat pertanian (*agrarian society*) atau tradisi masyarakat pra-industri (*Pre-indutrial society*) dan di bawah naungan kerajaan Hindu-Budha (yaitu pada periode abab ke -4/5 sampai abab ke -15 , serta kerajaan islam di Nusantara (yaitu pada abab ke -16 -18). Dari perspektif sejarah kebudayaan periode ini dapat disebut sebagai masa tradisional , dan dari perspektif sejarah peradaban dapat disebut sebagai fase kehidupan peradaban Gelombang pertama (*The Firsty wave*) , untuk meminjam istilah Alvin tofler (Alvin Toffler, 1990) atau fase kehidupan peradaban Pra-industri (*Pre-industrial Civilzation*), meminjam istilah Daniel Bell (Daniel Bel; 1975;1978).

Sesuai dengan fase dan jamannya maka pendidikan pada masa itu berkembang sejalan dengan pandangan dunia, orientasi, sistem dan tututan kehidupan dari tradisi budaya dan peradabannya. Ciri-ciri pendidikan pada masa itu pada hakekatnya dapat dirumuskan sebagai berikut :

Pertama, sesuai dengan pandangan dunia kosmologi dan kosmogonis yang menguasai alam pikiran kehidupan masyarakat tradisional , maka pendidikan pada masa itu pada dasarnya cenderung berorientasi untuk melestarikan terdisi kehidupan manusia yang langgeng , harmonis , serasi dan seimbang lebih ditekankan untuk memelihara dan mebina kelestarian tradisi kehidupan masyarakat dari generasi ke generasi dari masa ke masa sejalan dengan pemeliharaan kelestarian hubungan harmonis antara manusia alam semesta atau antara mikrokosmos dan makrokosmos.

Kedua, pendidikan mentalitas dan spiritualitas (keagamaan) merupakan bagian intergral dari pendidikan manusia yang harmonis dan berintegrasi dengan alam dengan landasan nilai-nilai keagamaan dan kebudayaan yang bersumber pada Hinduisme, Buddhiisme dan Islam.

Ketiga, pada masa masyarakat tingkat kawula, wong cilik (golongan bawah, rakyat, desa) proses tranfer (ilmu) pengetahuan dalam pendidikan

ditunjukkan untuk menyiapkan manusia (*pra-indutri*) yang mampu menjadi pelaku utama dalam pergumulan dengan alam (*a game againt nature*), yaitu mengolah apa yang memenuhi tuntutan hajat hidupnya (proses produksi pertanian, perikanan, pertambangan dan kehutanan).

Keempat, pada lingkungan masyarakat tingkat atas, yaitu raja dan bangsawan (Gusti, kraton, nagari) pendidikan ditujukan untuk menyiapkan calon pemegang kekuasaan (*the ruling claas*) (raja), bangsawan, kaum aristocrat, kaum literati, cendekiawan (pujangga), kaum rokhaniawan (pendeta, ulama), dan golongan elite lainnya.

Kelima, Orientasi pendidikan lebih ditunjukkan untuk memelihara dan membina bangunan masyarakat yang bersifat korporatif, kolektif, komunal, primordial dan gemeinschaft (paguyuban).

Keenam, Pendidikan juga berfungsi untuk menjaga dan membina kelangsungan sistem keluarga besar (*extended family*) dengan segala tradisi.

Ketujuh, proses belajar-mengajar (*learning process*) dan alih pengetahuan (*transfer of knowledge*) lebih bercorak lokal, individual, personal, oral, praktis, dan dikelola dalam ikatan hubungan patron-clientship (guru-murid). Kelembagaan padepokan, perguruan, pesantren, dan kelembagaan yang ada didalam istana-istana kerajaan, merupakan kelembagaan pendidikan penting pada masa itu.

Perlu dikemukakan bahwa pada sekitar abad ke-7 telah terdapat berita tentang berdirinya sebuah perguruan (tinggi) agama Budha di Sriwijaya (abad ke 7 - 11) yang dikunjungi oleh mahasiswa dan pendeta dari Cina dan dari tempat lainnya. Hal ini menjelaskan bahwa pada masa kuno sesungguhnya telah ada sistem pendidikan yang maju. Bahkan berita lain menjelaskan bahwa sekitar zaman itu juga mengirim mahasiswanya untuk belajar agama di Nalanda (India), yang mengisaratkan bahwa komunikasi pendidikan tinggi antar negara pada masa itu telah terjadi. Disebutkan juga bahwa di sekitar Candi Borobudur dan prambanan terdapat Pusat Biara atau Wihara yang sekaligus menjadi pusat pengajaran agama Budha dan agama Hindu.

Sebagaimana diceritakan dalam Babat Tanah Jawa, babad Demak dan Serat Centhini, bahwa para tokoh wali Sembilan dan para Ulama memimpin pergururan keagamaan Islam yang kemudian disebut Pesantren sebagai pusat pendidikan masyarakat Indonesia pada abad Ke -15-16 . beberapa pesantren terkenal pada masa itu antara lain ialah pesantren Ampel, gresik, Tuban, Demak, Cirebon dan Banten. Disebutkan bahwa pesantren giri Gresik, yang diasuh oleh tokoh Sunan Giri. Banyak dihadiri oleh para santri dari Maluku, Ambon dan Nusa Tenggara. Hal ini menjelaskan bahwa sistem pendidikan pesantren pada abad ke 15-16 secara tidak langsung telah berperan menjadi sarana proses integrasi masyarakat nusantara, hal yang menarik bahwa dalam perkembangannya pesantren yang semula didirikan oleh para wali untuk menjadi pusat pendidikan bagi para santri belajar membaca Al 'qur'an dan ilmu Agama Islam itu kemudian berkembang menjadi pusat "Peradaban Santri " dan pusat kelahiran kaum Ulama atau Intelektual muslim. Di lingkungan "Peradaban Santri" tersebut , lahir tokoh Ulama-ulama besar yang berperan sebagai "Guru Bangsa " pada zamannya. Diantara tokoh ulama termuka tersebutialah para tokoh wali 9 di Jawa pada sekitar abad ke 15-16, yaitu Sunan Giri, Sunan Bonang , Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, Sunan Gunungjati, Sunan Muria, Sunan Drajat, dan Sunan Tembayat . Selain itu di dunia melayu pada sekitar abad ke -16-18 juga muncul tokoh-tokoh intelektual muslim terkemuka. seperti Sham al-Dian al -Sumantri, Hanzah Fanusuri , dan Abdal-Rauf al-Singkili, serta Shekh Yusuf al-Banjari. (Wf. 1808), dan tokoh-tokoh ulama pemikir lainnya. Keberadaan pendidikan pesantren ada masa kini sebagai warisan sistem pendidikan dari masa lampau di tengah-tengah sitem pendidikan dern merupakan fenomena unik bagi sejarah pendidikan di Indonesia. Hal ini menggambarkan berlangsungnya dua elemen sitem sistem pendidikan tradisional dan modern dalam kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kini. Yang mencerminkan adanya pluralitas pendidikan.

Dari ciri-ciri diatas maka dapat dikemukakan bahwa pendidikan pada masa tradisional memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya

terletak pada segi pendidikan mentalitas, moralitas dan spiritualitas yang cukup kuat, sementara pendidikan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) sangat lemah. Mengingat orientasi pendidikan lebih ditekankan pada pelestarian tradisi kehidupan maka pendidikan tradisional tidak menjadi agen dan motor penggerak perubahan masyarakat atau sumber-sumber pembaharuan (inovasi) seperti yang berlaku dalam masyarakat modern.

Bisa dipahami bahwa sampai dengan abad-18 di Indonesia tidak terjadi perubahan-perubahan kemasyarakatan yang mendasar karena tidak adanya motor penggerak peradaban yang mendasar seperti yang terjadi di Eropa pada masa itu. Pada abad ke 16-17 secara berturut-turut di Eropa telah terjadi Renaisans, Abad pemikiran (*the age of Reason*), dan pencerahan (*the age of Enlightenment*), yang penemuan-penemuan barunya (*scientific invention*) dan mendorong terjadinya Revolusi Industri. Pada masa itu di Eropa muncul tokoh pemikir dan ilmuwan termuka, seperti Bacon, Galileo, Hobbes, Descartes, Pascal, Spinoza, Leibniz, John Locke, Voltaire dan David Hume. Yang menjadi tokoh penggerak perubahan zaman yang dilandasi di atas ide kemajuan (*idea of progress*). Kecenderungan dan tokoh-tokoh penggerak perubahan semacam itu muncul di Indonesia, disebabkan adanya perbedaan latar sejarah, masyarakat, struktur, kultur dan iklim pendidikannya.

3. Pendidikan pada fase Kedua : Pendidikan pada masa Kolonial dan Awal Perkenalan dengan sistem Pendidikan Barat dan Pergumulaan Masyarakat Indonesia dengan Hegemony Kekuasaan Kolonial.

Pendidikan pada fase kedua merupakan fase perkenalan jenis pendidikan baru (modern) bercorak barat yang di Indonesia yang dibawa pemerintah Kolonial Belanda, yaitu berupa sistem pendidikan persekolahan dengan model proses belajar-mengajar secara klasikal. Sejak abad ke-19 jenis pendidikan baru tersebut dikembangkan sebagai bagian dari

kebijakan politik kolonial untuk melancarkan upaya menguasai tanah jajahan. Secara Pragmatis, bertahap dan terbatas sekolah-sekolah didirikan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja baik dalam kantor-kantor administrasi pemerintah maupun perusahaan-perusahaan swasta di tanah jajahan. Maka dari itu, perkembangan pendirian sekolah-sekolah pada masa itu berjalan sejajar dengan proses birokratisasi, komersialisasi, modernisasi, dan westernisasi yang dilancarkan oleh kebijakan Pemerintah kolonial. Proses birokratisasi yang mencakup proses penggantian sistem birokrasi tradisional dengan birokrasi kolonial yang secara struktural mencakup wilayah administrasi pemerintah desa, kecamatan (*onderdistrict*) kabupaten (*district*), Kabupaten (*regentschap*) sampai keresidenan (*residentie*) banyak membutuhkan tenaga pegawai pribumi (seperti carik desa, juru tulis dan mantri polisi, camat, wedana, patih, bupati, guru, mantri kesehatan, dokter dan pegawai lainnya) sehingga pembukaan terutama setelah diperkenalkannya sistem perekonomian kapitalis barat melalui pembukaan sistem investasi modal swasta dalam sektor perkebunan, perdagangan, perindustrian, perbankan, serta pengenalan sistem pajak tanah, maka sejumlah tenaga pegawai pribumi juga diperlukan (seperti sebagai mandor, pengawas, juru tulis atau kerani dan sebagainya). Proses modernisasi mencakup berbagai sektor kehidupan, selain sektor administrasi dan birokrasi serta sektor perekonomian, juga mencakup sektor edukasi atau pendidikan model Barat, yang sekaligus menjadi media proses Westernisasi, yaitu pengenalan budaya gaya hidup Barat di tanah jajahan.

Perlu dikemukakan bahwa perkembangan pendidikan di tanah jajahan mengalami peningkatan penting pada waktu dilancarkan kebijakan Politik Etis (1900-1930). Pemerintah banyak melakukan reorganisasi beberapa sekolah-sekolah penting untuk meningkatkan jumlah lulusan untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja, seperti Sekolah Pendidikan Pamong Praja (*Opleidingscholen voor Inlandsche Ambtenaren OSVIA*), dan Sekolah Pendidikan Kedokteran yang semula disebut “Sekolah Dokter Jawa”

menjadi “ Sekolah Pendidikan Kedokteran Pribumi “ (School tot Opleidingschool van Inlandsche artsen-STOVIA). Demikian juga sistem pendidikan untuk orang pribumi sekolah kelas satu dijadikan sekolah (Dasar) pribumi Belanda atau Hollandsch-inlandsche Schol –HIS, kemudian didirikan semacam sekolah Menengah Pertama untuk orang pribumi disebut MULO (Meer uitgebreid lager onderwijs) pada tahun 1914, sekolah menengah atas yang disebut HBS (hoogere Burgeresschool), yang dipersyaratkan bagi mereka yang akan meneruskan ke Universitas. Sementara itu pendidikan tinggi tingkat universitas baru didirikan pada tahun 1920 yaitu sekolah tinggi teknik disebut Technische Hoogeschool di Bandung, dan Sekolah Tinggi Hukum (Rechtshoogeschool di Bandung. Dan Sekolah Tinggi Kedokteran yaitu Geeneskundige Hoogenschool di Batavia pada tahun 1922. Dampak perkembangan pendidikan pada periode itu sangat penting artinya bagi perubahan masyarakat Indonesia.

Ciri-ciri perkembangan pendidikan pada masa kolonial dapat dikemukakan sebagai berikut, secara umum pendidikan pada masa kolonial tidak bersifat demokrasi, tetapi lebih bersifat kolonialistik. Pendidikan kolonial diberikan bukan untuk semua warga negara Indonesia, melainkan untuk kepentingan pemerintah kolonial dan berikan secara berbeda-beda, selektif dan terbatas berdasarkan ras/cnitas dan kedudukan sosialnya di negara kolonial. Maka dari itu, penyelenggaraan sekolah dibedakan antara lain untuk anak-anak Eropa., untuk anak-anak orang asing timur (Vreemde Oosterlingen- atau Cina dan Arab), dan anak orang pribumi (Inlander). Misalnya, ELS atau Europese Lagere School merupakan Sekolah Dasar diselenggarakan khusus untuk anak orang Eropa, sementara untuk anak-anak pribumi disediakan Sekolah Desa 3 tahun (hanya mengajarkan soal baca tulis dan berhitung), sekolah Rakyat 5-6 tahun (diberikan ilmu pengetahuan umum yang terbatas) dan Hollands- Inlandsche school – HIS (diberikan Bahasa Belanda, untuk anak pribumi terkemuka). Demikian pula kurikulum beserta muatan kompetensi mata pelajaran yang disajikan di sekolah-sekolah di negeri Belanda dibedakan dengan yang disajikan di tanah jajahan (untuk jenjang sekolah yang sama).

Kedua, Diskriminasi juga berlaku dalam memperoleh peluang dan lapangan kerja, kedudukan , karier dan gaji bagi anak-anak pribumi. Sebagai contoh, gaji atau kedudukan akan berbeda antara pegawai pribumi dan pegawai Eropa sekalipun keduanya memiliki ijazah pendidikan yang sama.

Ketiga, Pendidikan pada masa kolonial juga bersifat antagonis and anti integrasi kultural. Pada satu pihak , Bahasa Belanda dijadikan bahasa resmi pemerintahan kolonial dan didirikan sekolah berbahasa Belanda untuk anak-anak Eropa, sementara pada pihak lain, orang pribumi atau rakyat kecil dibiarkan untuk menggunakan bahasanya sendiri (Bahasa daerah) dan didirikan sekolah-sekolah berbahasa daerah untuk rakyat pribumi.

Keempat, sekalipun demikian dalam perkembangan, pendidikan bercorak Barat pada masa kolonial tersebut telah berhasil melahirkan golongan baru dalam masyarakat Indonesia, yaitu golongan elite Indonesia baru (modern Indonesian Elite) , atau kaum terpelajar (Intelektual dan intelegensi) yang dikenal sebagai motor penggerak perubahan masyarakat Indonesia pada awal abad ke-20 (Robert Van Niel, 1970).

Kelima Nasionalisme dan pergerakan Nasional Indonesia pada awal abad ke -20 hakekatnya merupakan hasil perjuangan dan kreativitas dari kaum muda terpelajar Indonesia yang telah mengeyam sistem pendidikan modern yang berkembang pada masa kolonial.

Keenam, Pendidikan pada periode 1900-1945 selain menjadi sumber peledak pembaharuan juga menjadi sarana perjuangan mencapai kemerdekaan Indonesia. Tidak sedikit kaum pergerakan yang mendirikan sekolah selain ditujukan untuk mencerdaskan bangsa juga ditujukan untuk menjadi sarana perjuangan mereka (sekolah Kartini, Sekolah-sekolah Tamansiswa, Sekolah-Sekolah Muhammadiyah dsb).

Jadi dengan demikian pengenalan pendidikan Barat masa kolonial selain memiliki sisi negatif, yaitu bersifat kolonial juga memiliki sisi positif yaitu melahirkan golongan baru menjadi agen dan motor penggerak perubahan serta perjuangan baru untuk membangun bangsa yang bebas merdeka dari hegemoni kekuasaan kolonial.

4. Pendidikan pada Fase ketiga : Pendidikan Pada masa Kemerdekaan dan pergumulan Masyarakat Indonesia dengan Pembangunan Masyarakat Bangsa dan Negara.

Fase ketiga pada hakekatnya merupakan fase perkembangan pendidikan pada masa pasca kolonial, yang mencakup masa setelah Indonesia merdeka yaitu sejak proklamasi Kemerdekaan 1945 hingga masa kini pada hakekatnya dapat dibedakan atas periode, yaitu periode Revolusi Kemerdekaan, periode awal Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yaitu 1950-1965, dan periode pemerintahan orde baru, 1966-1998, serta periode pasca orde baru atau reformasi (1998 hingga masa kini).

Sesuai dengan jamannya pendidikan pada periode revolusi kemerdekaan dilakukan disela-sela perjuangan mempertahankan kemerdekaan, dan orientasi pendidikan lebih diarahkan untuk membangun semangat nasionalisme dan patriotisme. Pendidikan menjadi sarana penting untuk membangkitkan semangat juang, rasa cinta tanah air dan semangat untuk membela tanah air bagi generasi muda Indonesia pada masa itu berakhirnya masa revolusi kemerdekaan pada hakekatnya dapat disebut sebagai salah satu tonggak keberhasilan "Pendidikan rakyat" Indonesia pada masa itu., yaitu masa pendidikan dikekola oleh masyarakat luas pendukung revolusi yang secara spontanitas membuka sekolah pelatihan atas inisiatif dan dana sendiri tanpa tergantung kepada pemerintah.

Pendidikan pada periode berikutnya merupakan periode pendidikan pada masa pasca revolusi, yaitu ketika pemerintahan baru dalam NKRI terbentuk dan meluncurkan berbagai pembaharuan dan kebijakan termasuk kebijakan dalam bidang pendidikan. Sesuai dengan dinamika politik pemerintahan yang lebih ditunjukan pada persoalan pembangunan bangsa (*Nation Building*), antara lain membangun sistem politik pemerintahan yang berdemokratis yang berdasarkan demokrasi parlemenar, dan pembangunan kesatuan bangsa (*Charekter building*), maka pendidikan pada masa itu cenderung lebih ditunjukan untuk mendukung kebijakan politik pembangunan bangsa dan negara bangsa (nasional building

dan character building) dalam negara kesatuan RI. Dalam untuk mencerdaskan bangsa, warga negara yang melaksanakan atau terdidik, sumber daya manusia terampil, dan menjadi warga negara negara Indonesia, pendidikan juga dituntut juga untuk menghasilkan manusia yang berbudi luhur. Secara idial pendidikan ditujukan untuk menghasilkan manusia Indonesia yang harmonis jiwa dan raganya, sebagaimana digambarkan dalam salah satu bagian lagu Indonesia raya, yang berbunyi “Bangunlah Jiwanya, bangunlah badan.”. Pembangunan dan pembinaan atau bangsa atau nation sangat strategis dilakukan melalui pendidikan dari tingkat pendidikan dasar, pendidikan menengah hingga pendidikan tinggi. Pengajaran bahasa Indonesia dan sejarah Indonesia merupakan mata pelajaran yang strategis dalam pendidikan kebangsaan.

Berbeda dengan periode sebelumnya, pendidikan pada periode pemerintahan orde baru menjadi lebih ditujukan untuk mendukung kebijakan pembangunan ekonomi sebagai paradigma kebijakan politik pada masa itu. Tuntutan untuk menyediakan sumberdaya manusia yang terampil dan terdidik secara masal terhadap pendidikan di Indonesia menjadi sebuah kecenderungan besar, yang kemudian menimbulkan persoalan dalam kinerja, pelaksanaan pendidikan di lapangan, terutama dalam menghadapi persoalan sistem dan mutu yang harus dipertanggungjawabkan. Orientasi pada produksi (lulusan) cenderung mendesak sementara orientasi pada mutu menjadi tantangan dan persoalan. Proses demokratisasi, diseminasi dan distribusi pendidikan dengan demikian menjadi tuntutan dalam program pembangunan nasional, yang sekaligus mendorong terjadinya proses massalisasi pendidikan di Indonesia. Secara umum pendidikan pada masa itu memiliki perkembangan yang positif disamping segi-segi yang negatif. Dampak dari proses komersialisasi dan kapitalisme modern yang dibawa oleh kebijakan pembangunan nasional yang berorientasi pada pembangunan ekonomi pada akhirnya ikut mempengaruhi dinamika kehidupan pendidikan di Indonesia. Kompleksitas persoalan, dan kendala serta tantangan dari perubahan global juga mulai dirasakan dalam kehidupan pendidikan di Indonesia sejak masa itu.

Salah satu persoalan yang muncul pada masa pasca orde baru/reformasi antara lain ialah : Persoalan timbulnya pergeseran dari sentralisasi ke desentralisasi pendidikan sebagai bagian dari proses sentralisasi bidang pemerintahan ke proses desentralisasi pemerintahan pada era otonomi daerah yang sedang berlangsung pada masa sekarang ini.

5. Pendidikan pada fase ke empat: Pendidikan di masa depan dan pergumulan masyarakat Indonesia dengan pembangunan masyarakat madani. (civil society) ditengah-tengah kehidupan global.

Pendidikan pada fase terakhir adalah pendidikan pada masa depan yang penuh tantangan. Pada masa itu pendidikan di Indonesia dituntut untuk mampu mendasari terbentuknya masyarakat bangsa (*nation society*) Indonesia yang demokratis atau masyarakat madani (*Civil society*) ditengah-tengah kemelut pemulihan krisis multidemensi dan tantangan kehidupan global. Untuk itu pendidikan di Indonesia perlu melakukan pemantapan paradigma visi, dan misinya. Diantaranya pementapan paradigma tentang pendidikan sebagai sarana pencerdasan bangsa dan pembentukan manusia Indonesia yang beraklaq tinggi atau pendidikan yang berwawasan ilmu pengetahuan dan teknologi dan taqwa atau IMTAQ seperti yang telah lama menjadi gagasan.

Beberapa kendala dan tantangan yang dihadapi pendidikan di masa depan antara lain dikemukakan sebagai berikut.

Petama, pemulihan krisis multi dimensi di Indoensia yang berlangsung sejak awal reformasi hingga masa kini belum kunjung berakhir. Kemelut kehidupan politik, ekonomi, sosial dan moralitas budaya bangsa yang dihadapi bangsa Indoensia pada masa kini tersebut akan sangat mempengaruhi kinerja pendidikan dimasa depan bangsa Indonesia. Tuntutan pendidikan sebagai sarana pembentuk peserta didik yang ideal seperti tersebut diatas menjadi sangat besar dan berat, karena pendidikan tidak dapat mengatasi sendiri kendala dan tantangan bangsa yang bersifat multidemensi. Ketergantungan konsolidasi pendidikan terhadap stabilitas politik dan ekonomi di Indonesia dengan demikian sangat besar.

Kedua, tantangan proses globalisasi yang berlangsung sejak akhir abad ke 20 terhadap dunia pendidikan di Indonesia sebagai negara berkembang menjadi semakin besar dan berat. Pendidikan di Indonesia pada masa kini dan masa yang akan datang tidak terlepas dari pengaruh timbulnya oleh proses perubahan-perubahan tatanan kehidupan yang bersifat mendunia sebagai akibat dari berbagai faktor seperti revolusi teknologi informasi canggih (Information Technology), revolusi transportasi dan komunikasi, terbentuknya masyarakat Panca-industri (*Post Village*), Pasca Perang Dingin (*Post Cold War*), dan Kapasitisme Global (*Global Capitalis*). Pendidikan di Indonesia harus menghadapi dampak dari gejala-gejala yang ditimbulkan dari perubahan-perubahan yang bersifat mendunia tersebut, seperti proses masifikasi produk (mass production-produksi massa), masifikasi konsumsi (mass consumption-konsumsi massa), masifikasi budaya (mass culture-budaya massa), masifikasi media, dan masifikasi pendidikan (mass education-pendidikan massa). Ciri dari proses masifikasi tersebut antara lain berupa timbulnya gejala materialisasi (dekadensi moral), merosot nilai-nilai keagamaan, kehilangan jati diri, frustrasi, ketakutan, kekerasan, sadisme, dan krisis kehidupan yang mengancam kehidupan manusia. Semua gejala-gejala tersebut pada hakekatnya telah merembes ke dalam kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia pada masa kini, sehingga pendidikan di Indonesia menjadi semakin tertantang mengatasi ancaman yang maha dahsyat tersebut. Sanggupkah pendidikan di Indonesia menanggulangi tantangan dan ancaman besar tersebut.

Persoalan sekarang ialah bagaimana kita bangsa Indonesia dapat mensiasati segala tantangan dan ancaman tersebut dengan menyusun strategi politik pendidikan yang tepat dan mantap sehingga kita dapat menjawab menanggulangi segala tantangan dan ancaman pendidikan di Indonesia pada masa depan.

6. Kesimpulan.

Dari uraian singkat diatas dapat dikemukakan bahwa perkembangan pendidikan di Indonesia pada hakekatnya tidak terlepas dari latar dinamika sejarah masyarakat dan bangsa Indonesia sendiri yang berlangsung dari masa lampau hingga masa kini. Tiap-tiap zaman memiliki cara menjawab tantangan dan jawaban masing-masing menurut zamannya, sebagaimana tercermin dalam corak pergulatan masyarakat dalam mewujudkan sistem pendidikan pada setiap zamannya.

Corak pendidikan telah mengalami berbagai pergeseran sistem dan paradigma beserta visi dan misinya sesuai dengan tantangan dan tuntutan dari zamannya, yaitu masa Tradisional, Kolonial hingga masa Indonesia Modern pada masa kini. Tantangan dan tuntutan pendidikan di masa depan terasa semakin besar dan mendasar sehingga diperlukan tekad dan siasat yang tepat dalam politik pendidikan masyarakat dan bangsa Indonesia yang didukung oleh seluruh komponen masyarakat dan bangsa Indonesia sendiri.

DAFTAR BACAAN

- Bell, Daniel. *The Coming of post Industrial Society*. New York : Basic Books, 1975.
- . *The Cultural Contradiction of Capitalism*. New York : Basic Books, 1978.
- Hill, Hal (ed) *Indonesia's New Order, the Dynamics of Socio-Economic* University Of Cambridge, 1990.
- Kahin, G. McT. *Nationalism and Revolution in Indonesia*. Ithaca and London.
- Nordholt, Henk Schulte and Irvan Abdullah (eds) *Indonesia, In Search of Transition*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Ricklefs, M.C. *A History of Modern Indonesia, Since c. 1200*. Third Edition. Houndmills etc. : Palgrave, 2001.
- Tofler, Avin. *The Third Wave. The Classic Study of Tomorrow*, New York, etc : Bantam Books, 1990.

KOLEKSI MUSEUM : MEDIA BELAJAR SISWA

Oleh : V. Agus Sulistya, S.Pd

Pendahuluan

Membicarakan masalah museum, bagi sebagian masyarakat awam sangat perlu diberikan pengertian terlebih dulu tentang apa itu “Museum”. Secara sekilas masyarakat awam akan menganggap museum adalah sebuah tempat yang hanya dimanfaatkan sebagai tempat penyimpanan benda-benda yang telah usang dan tidak bermanfaat. Boleh dikatakan museum hanya merupakan “*gudang barang rongsokan*”. Hal itu dapat kita jumpai dalam ungkapan-ungkapan yang sering terdengar di masyarakat. Seperti misalnya, “*Sepeda sudah bobrok seperti itu kok masih dipakai, mbok di museumkan saja*”. Ungkapan ini dapat menjadi bahan penelaahan bagi kita bahwa bagi masyarakat awam museum belum mendapatkan tempat seperti yang kita inginkan.

Oleh karena itu perlu dilakukan pelurusan pemahaman akan hakekat apa dan bagaimana museum itu sendiri.

Dalam membicarakan apa itu hakekat museum, kita tidak dapat mengesampingkan awal mula sejarah dari terbentuknya sebuah museum. Kata museum yang dipakai dalam pembicaraan sehari-hari sampai saat ini berasal dari bahasa Yunani yaitu *Mouseion* yang berarti *kuil tempat pemujaan terhadap Dewi-dewi Muses*, yaitu dewi kesenian (yang berjumlah sembilan) putra dewa **Zeus** dengan **Mnemosyne**. Adapun kesembilan dewi kesenian itu antara lain :

1. **Calliope**, dewa syair kepahlawanan
2. **Euterpe**, dewa seni musik dan syair lirik
3. **Erato**, dewa syair percintaan
4. **Polithemnia**, dewa syair puji-pujian yang bersifat suci
5. **Clio**, dewa sejarah

6. **Thalia**, dewa seni komedi
7. **Terpsichore**, dewa seni tari
8. **Melpomene**, dewa seni tragedi
9. **Urania**, dewa ilmu pengetahuan perbintangan (ilmu falak). (*Djoko Soekiman, Museografia, XXV No. 1 Tahun 2001*)

Terbentuknya museum pada dasarnya terjadi karena naluri alamiah manusia sebagai makhluk pengumpul (*Collecting Insting*). Pengumpulan itu dilandasi dari sisi menarik (*karena kekhususan*) dari benda-benda yang dikumpulkan. Sebuah hasil penelitian arkeologi berhasil mengungkapkan bahwa kurang lebih 85.000 tahun yang lalu di lembah *Neander* ditemukan kepingan-kepingan batu (*oker*), fosil kerang dari aneka bentuk, serta batu-batuan yang sangat aneh bentuknya. Barang-barang tersebut diindikasikan sebagai barang-barang hasil pengumpulan oleh *Manusia Neanderthal* (*manusia yang berdiam di lembah Neander*). Barang-barang yang dikumpulkan tersebut karena memiliki "*sisi menarik*" dari pandangan si pengumpul. Kumpulan koleksi-koleksi tersebut kemudian dikenal dengan nama *Curio Cabinet*. Nama ini kemudian untuk menyebut museum pada awal mulanya.

Selanjutnya pada masa abad pertengahan yang dikenal dengan museum adalah *koleksi-koleksi pribadi* milik para raja dan bangsawan, para pecinta seni dan budaya yang kaya dan makmur, serta para pecinta ilmu pengetahuan. Museum juga pernah diartikan sebagai kumpulan ilmu pengetahuan dalam bentuk karya tulis seorang sarjana. Ini terjadi pada jaman *encyclopedis*.

Ketika *Revolusi Perancis* meletus tahun 1789, museum yang semula hanya menjadi tempat penyimpanan barang yang mempunyai arti khusus bagi pemiliknya mulai dibuka untuk umum. Bahkan banyak koleksi-koleksi perseorangan yang dihibahkan pada perkumpulan-perkumpulan yang bergerak dalam bidang ilmu dan kesenian untuk dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum.

Meskipun museum dari waktu awal mulanya hingga kini telah berkembang dengan berbagai perubahan fungsi, namun pada hakekatnya pengertian tentang museum tetap tidak berubah, bahwa museum dibentuk atas dasar dua aspek pokok yaitu **ilmiah** dan **kesenian**.

Dalam perkembangan selanjutnya, museum itu berdiri sebagai dampak dari adanya kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan. Perkumpulan-perkumpulan ilmu pengetahuan yang ada, mendirikan sebuah museum untuk dijadikan *laboratorium* bagi penelitian sebagai pendukung perkembangan ilmu pengetahuan yang dibidangnya. Demikianlah sehingga sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan maka banyak pula museum-museum berdiri dengan berbagai macam koleksi yang disajikannya.

Menyadari akan pentingnya peranan museum bagi setiap paguyuban hidup nasional dan internasional, maka ahli permuseuman tingkat internasional yang tergabung dalam **ICOM** (*Internationale Council of Museums*) dalam musyawarah umum ke XI yang diselenggarakan di Copenhagen pada tanggal 14 Juni 1974, merumuskan bahwa yang dimaksud dengan **Museum** adalah *suatu lembaga yang permanen, yang melayani kepentingan masyarakat dan kemajuannya, terbuka untuk umum, tidak bertujuan mencari keuntungan, yang mengumpulkan, memelihara, meneliti, memamerkan dan mengkomunikasikan benda-benda pembuktian material manusia dan lingkungannya, untuk tujuan-tujuan studi, pendidikan dan rekreasi.*

Dari urian di atas dan juga definisi tentang museum oleh ICOM dapat kita lihat bahwa koleksi museum merupakan hal terpenting dalam pengelolaan sebuah museum. Koleksi museum merupakan unsur pokok sebuah museum disamping unsur lain yaitu bangunan, dan sumber daya manusia. Melalui koleksi museum sebuah museum dapat melakukan *telling story* kepada para pengunjung museum.

Koleksi Museum

Koleksi museum bagi sebagian orang yang bergerak dalam bidang permuseuman sudah sangat akrab dengan kehidupan kerjanya. Bahkan setiap hari mereka dapat berjumpa dengannya. Namun tidak semua orang dapat mengetahui akan manfaat atau peran koleksi museum itu sendiri. Secara spontan koleksi museum akan diartikan sebagai benda-benda yang dipunyai dan dipamerkan oleh museum yang kemudian dapat dilihat oleh pengunjung museum. Akan tetapi dibalik makna spontan yang muncul tersebut koleksi museum punya banyak peran yang dapat diembannya. Sebelum lebih jauh membicarakan tentang koleksi museum, dijelaskan apa yang dimaksud dengan koleksi museum.

Yang dimaksud **koleksi museum** adalah *sekumpulan benda-benda bukti material manusia dan lingkungannya yang berkaitan dengan satu atau berbagai bidang atau cabang ilmu pengetahuan*. Disini jelas bahwa koleksi museum selalu mempunyai sifat ilmiah dalam arti bahwa koleksi museum harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Meski demikian batasan sebuah benda dapat dijadikan koleksi museum atau tidak masih kabur antara museum yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu perlu diadakan keseragaman dalam pemberian batasan. Adapun batasan (syarat-syarat) koleksi museum adalah sebagai berikut :

1. *Mempunyai nilai sejarah dan ilmiah (termasuk nilai estetika)*. Koleksi museum harus dapat dijelaskan tentang makna di dalamnya dalam perspektif sejarah dan ilmiah.
2. *Dapat diidentifikasi wujudnya (morfologi), tipenya (tipologi), gayannya (style), fungsi, maknanya, asalnya secara historis dan geografis, genusnya (dalam orde biologi) atau periodenya dalam geologi khususnya untuk benda sejarah alam dan teknologi*.
3. *Harus dapat dijadikan dokumen, dalam arti sebagai bukti kenyataan dan kehadirannya (reliabilitas dan existensinya) bagi penelitian ilmiah*. Koleksi museum harus dapat menjadi tanda sebuah kejadian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

4. *Dapat dijadikan suatu monumen atau bakal jadi monumen dalam sejarah alam dan budaya.* Koleksi museum meski dapat menjadi tanda terjadinya sebuah perubahan besar dalam perjalanan sejarah alam, dan manusia.
5. *Benda asli (realia) replika atau reproduksi yang syah menurut persyaratan museum.* Artinya koleksi museum dapat berupa benda asli maupun replika. Benda replika itu sah-sah saja asal memenuhi syarat, misalnya sangat sulit di cari aslinya kemudian dibuat replikanya dengan ketentuan berdasar data-data yang kredibilitasnya terjamin. Atau benda tersebut mempunyai peranan penting namun hanya ada satu tidak ada lainnya, oleh karenanya harus dibuat replikanya. Atau benda aslinya sangat riskan untuk dipamerkan (rusak, terlalu berbahaya dari segi keamanan dll) perlu dibuatkan replikanya

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa koleksi museum mempunyai peranan yang pokok dalam *misi* sebuah museum. Ke mana misi museum tersebut akan mengarah, disitulah koleksi museum punya peranan. Tetapi ada satu hal pokok yang harus diingat bahwa museum disamping bertugas mengumpulkan, mengawetkan, menyimpan, merawat *benda-benda bukti material manusia dan lingkungannya yang berkaitan dengan satu atau berbagai cabang ilmu pengetahuan* (koleksi museum) juga bertugas menyajikan. Yang tersebut terakhir yang paling pokok dalam pengembangan misi museum melalui koleksi-koleksinya. Satu hal yang paling efektif dalam penyajian koleksi museum adalah dengan **pameran museum**.

Telah dijelaskan bahwa koleksi museum merupakan unsur yang pokok dalam sebuah museum, namun perlu diingat bahwa koleksi tersebut tidak dapat berbuat apa-apa atau bahkan akan berupa seonggok barang-barang yang yang berguna dan tak mempunyai arti sama sekali kalau belum mendapat *sentuhan* kurator, yaitu sumber daya manusia di museum yang bertugas menangani koleksi. Dari kurator yang bekerja dengan pendekatan berbagai bidang ilmu pengetahuan berusaha membuat koleksi museum tersebut dapat "*berkata-kata*" (*telling story*). Proses inilah yang kemudian disebut sebagai *pendiskripsian koleksi*.

Secara singkat pendiskripsian koleksi museum idialnya dapat memenuhi kriteria 4 W (*Who/What*=Siapa/apa, *Why*=Mengapa, *When*=Kapan, *Where*=Dimana, dan 1 H (*How*=Bagaimana).

1. Who/What

Koleksi museum idialnya mempunyai nama, sebutan, istilah.

2. Why

Keterangan koleksi museum yang lebih mengarah kepada fungsi, guna dan arti dari koleksi museum tersebut.

3. When

Keterangan koleksi yang lebih mengarah kepada penjelasan umur atau penjaminan dimana koleksi tersebut punya peranan.

4. Where

Keterangan koleksi yang lebih mengarah pada penunjukkan tempat. Baik itu asal dari, ditemukan di, dibuat di, dll

5. How

Keterangan koleksi yang lebih mengarah pada keadaan fisik koleksi, seperti retak, terbuat dari bahan apa, dengan ragam hias apa, masuk sub jenis koleksi apa dll.

Melihat dari uraian tersebut telah jelas bahwa meski museum telah mengalami perkembangan yang begitu pesat namun ada satu hal yang tetap yaitu bahwa koleksi-koleksi museum tetap terkait dengan dua hal pokok yaitu *ilmiah* dan *kesenian*.

Koleksi Museum Sebagai Media Belajar Siswa

Seorang pengunjung museum sewaktu mengunjungi museum, ruangan yang pertama ditanyakan kebanyakan adalah *ruang pameran museum*. Selain mereka yang mempunyai kepentingan lain misalnya dengan urusan administrasi, urusan dengan kelompok kerja teknis museum, atau perpustakaan. Kebanyakan orang yang berkunjung ke museum adalah untuk melihat pameran (*penyajian koleksi museum*). Dalam ruang pameran tetap museum, para pengunjung akan dapat menikmati sebuah tata pameran

tetap yang ditata dengan *story line* tematis kronologis (terlihat nyata di museum-museum khusus sejarah). Urut-urutan peristiwa yang terjadi divisualkan dalam bentuk penataan materi koleksi museum yang ditata secara kronologis.

Seseorang yang berkunjung ke museum dapat dikatakan dia sedang membuka-buka sebuah buku sejarah. Koleksi-koleksi museum sebagai *materi pengisi* lembar demi lembar *buku* tersebut merupakan *materi visual wakil jaman* yang tersimpan di museum dan selanjutnya menjadi dokumen masa silam yang harus dilestarikan dan dikomunikasikan sehingga akan menunjang fungsionalisasi museum sebagai sumber informasi.

Ketika para siswa mengunjungi ruang pameran tetap museum, di sana terjadi proses dialog antara mereka dengan koleksi yang dipamerkan. Dari situ telah terjadi interaksi antara koleksi museum dengan pengunjungnya dalam hal ini siswa yang dimungkinkan karenanya akan terjadi transformasi *nilai-nilai luhur sejarah dan budaya bangsa*.

Melalui koleksi museum siswa dapat mengkorelasikan teori yang ada di bangku sekolah dengan *data visual* yang ada. Dapat dikatakan teori-teori yang ada di kelas akan lebih menarik perhatian siswa ketika mereka ditunjukkan visualnya. Dengan begitu siswa lebih terkesan dan relatif lebih ingat dengan informasi yang terkandung dalam koleksi tersebut dan juga terkait dengan kurikulum di sekolah. Kasus semacam ini sering muncul di museum-museum khusus yang sarat akan muatan lokal bagi siswa-siswa di sekolah dasar.

Dengan ikut terlibat di dalamnya melalui *dialog* antara pengunjung dengan koleksi museum melalui informasi koleksi beserta pendukung lainnya, pengunjung akan dapat mengetahui arti penting koleksi tersebut sesuai dengan kurun waktunya. Sehingga dengan demikian akan dapat menempatkan pada posisinya secara proporsional.

Benda-benda koleksi museum yang demikian banyak jumlah dan ragamnya merupakan sebagian dari hasil karya budaya bangsa yang mewakili jaman-jamannya. Misalnya jaman prasejarah, Klasik, Islam dan

Modern. Masing-masing benda tersebut mempunyai nilai sejarah tersendiri dan gaya seni yang mewakili jamannya.

Sebuah museum diharapkan dapat berperan sebagai “*Catatan Harian*” sebuah bangsa. Perlu diingat bahwa museum dalam perjalanannya ke depan akan selalu akrab dengan *kelampauan (past)* yang berjalan dalam rangkaian kesatuan dimensi waktu *sekarang (present)* dan *akan datang (future)*. Ketiganya merupakan kesatuan yang tak dapat dipisahkan. Hubungan mereka terjalin erat dalam bingkai *keterkaitan kausalitas*.

Seiring dengan perputaran roda waktu, sejarah pun berputar dengan perubahan-perubahan yang terjadi di dalamnya akibat adanya proses berlangsungnya peristiwa. Peristiwa-peristiwa tersebut akan muncul sebagai hal-hal yang baru dan menarik karena telah menyebabkan terjadinya sebuah perubahan. Peristiwa-peristiwa yang terjadi yang mengakibatkan terjadinya perubahan tersebut kemudian akan mempengaruhi *trend* atau *style* dari sebuah jaman.

Sebagai contoh pada saat masa purba peralatan yang dipergunakan sebagian besar adalah dari batu, kemudian berkembang dengan diketemukannya logam, baik perunggu maupun besi. Kemudian menginjak lagi ke jaman dimana manusia telah mengenal tulisan, terjadilah perubahan dengan hal yang baru yaitu dengan munculnya prasasti-prasasti. Kemudian masuknya agama Islam akan memberi gaya baru dengan munculnya nama-nama, bangunan-bangunan ataupun munculnya kerajaan-kerajaan Islam yang jelas akan timbul pula budaya-budaya Islam. Perubahan-perubahan tersebut kemudian menjadi tonggak-tonggak sejarah yang dipakai sebagai *titik penjamaanan*. Sebagai contoh adanya Jaman Batu, Jaman Perunggu, dan Jaman Islam.

Kedatangan kedatangan Belanda yang kemudian menyebabkan terjadinya perlawanan rakyat karena politik kolonialnya, terjadi perubahan. Peristiwa adanya gangguan keamanan rakyat pribumi oleh kolonial Belanda itu kemudian menjadi tanda sebuah *penjamaanan* yaitu *Jaman Kolonial*. Adanya pengaruh politik Etis yang menyebabkan terjadinya perubahan dalam pola pikir bangsa Indonesian khususnya para pemuda pelajar,

menyebabkan timbulnya perjuangan baru melalui otak dengan dipelopori berdirinya sebuah organisasi modern yang pertama kali yaitu Boedi Oetomo. Perubahan ini menjadi hal yang baru dan menarik dan kemudian menjadi awal mula sebuah *penjamanan* baru yaitu *Jaman Pergerakan*. Demikian pula pada jaman-jaman berikutnya seperti *Jaman Kemerdekaan*, *Jaman Revolusi*, *Jaman Orde Baru*, *Jaman Reformasi* dan sebagainya.

Peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam bingkai penjamanan tersebut diatas tentunya akan meninggalkan jejak. Jejak itulah yang kemudian sampai ke museum berupa benda-benda peninggalan sejarah yang mempunyai nilai sejarah dan budaya. Benda-benda koleksi museum sebagai *wakil-wakil jaman* ini akan dapat berkata-kata kepada pengunjung setelah mendapat sentuhan tangan dari kurator. Diibaratkan bahwa seorang pengunjung, dengan berkunjung ke sebuah museum sejarah mereka akan menikmati nuansa perlawatan ke masa silam melalui *jendela-jendela jaman* yang tersirat dalam koleksi-koleksi yang dipamerkan. Di situlah kemudian terjadi *dialog antar jaman* dengan media koleksi museum. Pengunjung dapat menempuh perjalanan ke masa silam melalui koleksi yang dipamerkan di museum. Pengunjung dapat mengetahui sebuah gaya (cengkok, Bahasa Jawa) dalam satu kurun waktu (jaman) yang tersirat dari sebuah koleksi museum. Dengan demikian paling tidak pengunjung telah melakukan dialog seputar pengalaman kolektif sebuah generasi di masa lampau.

Dengan demikian museum dapat berperan secara proaktif melalui kegiatan-kegiatan yang ada di dalamnya dalam menunjang kegiatan belajar siswa. Di sini dapat dikatakan koleksi dapat berfungsi sebagai media belajar siswa, melalui koleksi-koleksinya. Melalui koleksi museum siswa dapat mencocokkan teori yang ada di bangku sekolah dengan data visualnya.

Pada hakekatnya belajar adalah sebuah usaha untuk berubah yang tentu saja ke arah yang lebih baik. Dari koleksi museum siswa dapat belajar banyak baik itu estetika, etika, maupun logika. Hal itu dapat kita maklumi

karena hakekat museum yang terus eksis dengan bingkai ilmiah dan kesenian. Melalui koleksi-koleksi lukisan siswa dapat belajar tentang seni, melalui koleksi sejarah siswa dapat belajar tentang sejarah, demikian juga dengan siswa-siswa yang lainnya.

Terkait dengan pembicaraan masalah kelampauan seorang pujangga Romawi yang bernama Cicero mengatakan bahwa, *“Orang yang tidak mengetahui atau memahami kejadian sebelum dilahirkan, adalah orang yang selama hidupnya tetap menjadi kanak-kanak”*. Menarik benang merah dari pernyataan tersebut, bahwa masa silam adalah bukanlah kurun waktu yang tanpa makna dan patut dikesampingkan. Namun justru kelampauan itu merupakan lapisan yang terkait erat dengan masa sekarang.

Penutup

Setelah menyimak dari uraian yang terpapar di atas, dapat kita lihat bahwa koleksi museum memegang peranan penting dalam sebuah museum. Penyampaian misi sebuah museum tersirat dari koleksi yang disajikannya. Koleksi tersebutlah yang akan berkata-kata menyampaikan misi apakah yang diemban oleh museum terkait. Dalam koleksi ini pulalah media dialog antara pengunjung dengan museum terkait dengan misi yang diembannya. Oleh sebab itu sekarang yang menjadi tanggung jawab pengelola museum bahwa bagaimana caranya agar koleksi-koleksi museum tersebut dapat benar-benar menjadi media belajar siswa. Tentunya hal ini bukanlah hal yang mudah. Artinya diperlukan pemikiran yang serius. Yang jelas hal itu terkait dengan peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusianya.

Oleh karena itu dalam mengakhiri tulisan ini saya berharap agar para pengelola museum memperhatikan benar-benar penyajian koleksi-koleksinya. Diusahakan agar koleksi-koleksi yang disajikannya benar-benar dapat berdiri sebagai *wakil jaman* yang dapat *berdialog* dengan para pengunjung melalui informasi yang terkandung di dalamnya. Sehingga fungsionalisasi museum sebagai sumber informasi dapat teraplikasi secara optimal, proporsional dan profesional. Terima kasih.

DAFTAR BACAAN

- Amir Sutaarga, *Pedoman Penyelenggaraan dan Pengelolaan Museum*, Proyek Pembinaan Permuseuman Jakarta Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 1989/1990.
- Ankersmit, F.R, *Refleksi Tentang Sejarah Pendapat-Pendapat Modern Tentang Filsafat Sejarah*, PT. Gramedia, Jakarta, 1987 (terj. Dick Hartoko).
- Djoko Soekiman, *Peranan Museum dalam Pemahaman Sejarah*, (artikela dalam *Museografia*, majalah permuseuman Jilid XXV No. 1. Th. 2001).

MUSEUM BENTENG YOGYAKARTA MEDIA PENUNJANG KURIKULUM BERBASIS KOMPETENSI BIDANG STUDI IPS (SEJARAH)

Oleh : Drs. Suharjo

Salah satu predikat kota Yogyakarta adalah sebagai kota perjuangan. Hal ini jelas terlihat didalam sepanjang sejarah kota Yogyakarta dari zaman Mataram sampai dengan saat ini, Yogyakarta selalu sarat dengan perjuangan. Disaat situasi negara dalam kondisi memperoleh ancaman, tantangan dan gangguan maka Yogyakarta selalu menjadi barometer dan pelopor dari setiap perubahan dalam negara Indonesia dari zaman ke zaman.

Museum Benteng Yogyakarta dapat dikatakan sebagai representatif dari predikat kota Yogyakarta sebagai kota perjuangan tersebut. Hal ini sangat berasalatan sekali, karena Museum Benteng Yogyakarta merupakan museum khusus sejarah perjuangan nasional yang memiliki koleksi benda-benda peninggalan sejarah perjuangan dari masa kedatangan Belanda di Indonesia sampai dengan masa terbaru sekarang ini.

Dengan demikian keberadaan koleksi Museum Benteng Yogyakarta merupakan perwujudan dan wakil dari roh perjuangan kota Yogyakarta dari zaman ke zaman, yang dapat dijadikan sebagai media untuk mengenang, memahami dan mengambil hikmah dari setiap peristiwa sejarah. Hal ini sangat penting bagi dunia pendidikan karena dapat melengkapi sarana yang tidak diperoleh di sekolah, berupa benda-benda wakil zaman yang dapat berbicara mengenai peristiwa dan kejadian masa lampau yang sangat berpengaruh terhadap perjalanan sejarah bangsa Indonesia.

Didalam kurikulum terbaru tahun 2001 dinyatakan bahwa pendidikan di Indonesia mengacu pada kurikulum berbasis kompetensi. Basis kompetensi harus menjamin pertumbuhan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, penguasaan hidup, akademik, seni, serta pengembangan kepribadian Indonesia yang kuat dan beraklaq mulia.

Apabila dikaitkan dengan otonomi daerah perlu dilakukan diversifikasi jenis pendidikan secara professional dan sesuai dengan kebutuhan daerah. Didalam silabus pendidikan sejarah disebutkan bahwa pendidikan sejarah ditujukan untuk memberikan pemahaman kepada siswa, akan sejarah bangsa di masa lalu, baik yang terjadi di Indonesia maupun yang diluar negeri., sehingga dapat memahami nilai-nilai dan jati diri bangsa yang sudah tertanam dan mengakar selama berabad-abad. Sehingga generasi muda sebagai generasi penerus bangsa memiliki jati diri dan identitas Ke-Indonesiaan yang kuat dan mampu menghadapi arus globalisasi secara benar.

Jadi fungsi pendidikan sejarah adalah untuk membangun perspektif dan kesadaran sejarah dalam menemukan, memahami, menjelaskan, masa kini dan yang akan datang serta jati diri bangsa, melalui pemahaman masa lalu.

Di dalam kurikulum tersebut dipaparkan bahwa agar pendidikan sejarah dapat diberikan secara utuh dan benar maka perlu memanfaatkan media belajar serta obyek yang tersedia di daerah secara optimal. Media belajar yang mendukung pemahaman sejarah itu misalnya seperti benda-benda peninggalan lam lingkungan. Budaya dan sejarah serta bukti-bukti lainnya, baik yang sudah disimpan di museum maupun yang berupa benda tak bergerak seperti candi dsb.

Museum sesuai dengan tugas fungsinya merupakan instansi yang bertugas mengumpulkan, merawat, meneliti, mengkaji dan mengkomunikasikan benda-benda pembuktian dan lingkungan, sejarah dan budaya untuk kepentingan ilmu pengetahuan, pendidikan dan rekreasi. Sehingga sesuai kurikulum terbaru yang berbasis kompetensi, sangat pas apabila dunia pendidikan memanfaatkan museum, sebagai media pembelajaran sejarah, budaya, dan alam lingkungan pada masa lalu untuk referensi tentang media jati diri identitas bangsa.

Dalam rangka menunjang pendidikan sejarah yang berbasis kompetensi maka museum Benteng Vredeburg Yogyakarta sebagai museum

khusus sejarah perjuangan memiliki koleksi yang amat sangat bermanfaat bagi proses pembentukan identitas dan jati diri bangsa. Karena banyak peristiwa sejarah yang terjadi di Yogyakarta, yang perlu diketahui oleh anak didik untuk memahami sejarah Yogyakarta dan Indonesia pada umumnya. Hal itu dapat dilihat antara lain di dalam koleksi-koleksi museum yang memvisualkan peristiwa-peristiwa seperti di bawah ini:

Pertama, pada masa perjuangan lokal kedaerahan Yogyakarta telah memperlihatkan kiprahnya dalam mengusir kolonialisme antara lain seperti perlawanan Sultan Agung terhadap VOC tahun 1628-1629, Kegigihan Sultan Hamengku Buwono I melawan Belanda, sehingga harus diawasi dengan mendirikan Benteng Vredeburg pada tahun 1760. Perang Diponegoro tahun 1825-1830 mampu menggerakkan perlawanan di wilayah Yogyakarta, Pacitan, Purwodadi, Banyumas, Pekalongan, Semarang, Madura sehingga oleh Belanda disebut sebagai *De java Orloog*”.

Kedua, pada masa pergerakan nasional Yogyakarta semakin memperlihatkan perjuangan yaitu terlihat pada peristiwa Kongres Budi Utomo I 1908 dan peranan Dr. Wahidin Soediro Hisodo dengan keputusannya: Untuk memajukan pengajaran, pertanian, peternakan, perdagangan, industri dan menghidupkan kembali kebudayaan. Pelopor pendidikan Agama (Muhammadiyah) 18 Nopember 1912 sehingga diikuti daerah-daerah lain untuk mendirikan perkumpulan Muhammadiyah dengan nama lain seperti Nurul Islam (Pekalongan), Almunir (Makasar), Alhidaah (Garut), Sidik Amanat Tablik Fathonah atau SATF (Solo) sebelum diberi ijin resmi pembukaan cabang Muhammadiyah oleh Belanda. Pelopor penegak Hak-hak pekerja (RM. Suryopranoto) dimana untuk minta kenaikan kesejahteraan. Pelopor Pendidikan Nasional (pribumi), Tamansiswa 3 Juli 1922 yang memberikan kesempatan belajar kepada kelas menengah ke bawah yang tidak tertampung di sekolah Belanda serta penentang keras Undang-Undang Sekolah Liar (*Wilde Schoolen Ordonantie*). Pencetus konsep Trilogi Pendidikan yang menjadi acuan Depdiknas sampai saat ini. Kongres Perempuan I tahun 1928 yang menghasilkan kesejajaran wanita dan pria terutama dalam hal hak dalam

keluarga, juga menghasilkan organisasi PPPI yang sekarang berubah menjadi Kwoni.

Ketiga, pada masa Revolusi Fisik (Perang Kemerdekaan 1945 – 1949), Yogyakarta semakin sarat dengan perjuangan antara lain menjadi Ibukota RI (4 Januari 1946 – 27 Desember 1949), menggantikan Ibukota yang dikuasai Belanda Perintis Sekolah Kadet AU 1947. Perintis Militer Akademi 1946. Benteng pertahanan negara kesatuan Republik Indonesia (Perang Gerilya), serta memelopori pendidikan tinggi dengan berdirinya Perguruan Gajah Mada, dan masih banyak lain peristiwa kepeloporan lainnya pada decade ini.

Keempat, pada masa Demokrasi Liberal 1950-1959 juga sebagai pelopor demokrasi antara lain sebagai Pilot Project pemilihan Umum Daerah untuk pertama kalinya di Indonesia yaitu tahun 1950, dan percentus Seminar Pancasila tahun 1959.

Kelima, pada masa Demokrasi Terpimpin 1959-1965, Yogyakarta menjadi tempat Ikrar Trikora 19 Desember 1961 di Alun-Alun Utara Yogyakarta. Serta Pelopor Pembubaran PKI 1965 yang dimotori oleh pemuda-pemuda dari ormas Islam.

Keenam, masa Orde Baru 1965-1998, merupakan tempat penancangan P4, Rancangan Program KB nasional.

Ketujuh, yang baru saja terjadi dan masih hangat di benak kita yaitu masa reformasi 1998 di Yogyakarta terjadi gerakan masa yang sangat simpati melalui Aksi Damai Sejuta umat 20 Mei 1998 atau yang lebih dikenal dengan pisowanan Ageng 1998. Sehingga keesokan harinya Presiden Soeharto mengundurkan diri.

Di samping peristiwa-peristiwa kepeloporan yang berdampak nasional seperti tersebut diatas juga masih banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi di Yogyakarta yang melengkapi pemahaman sejarah anak didik. Semua koleksi museum tersebut amat bermanfaat dalam menunjang proses belajar mengajar kurikulum berbasis kompetensi yang sekarang sedang dilaksanakan.

BAB IV

B. PENDIDIKAN POLITIK

PERANAN HUKUM DALAM MENANGGULANGI DISINTEGRASI BANGSA

Oleh: Prof. Dr. Muchsan, S.H.

Kita semua telah tahu bahwa Bangsa Indonesia itu lahir bersamaan dengan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Sejak itu secara yuridis formal bangsa Indonesia lahir. Hal ini terbukti naskah Proklamasi di sana dikatakan atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Tetapi sebetulnya secara material embrio ini sudah ada semenjak Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Pada waktu itu sudah ada tekad untuk persatuan dan kesatuan bangsa, nusa dan Bahasa tetapi belum membentuk suatu *Nation*, belum membentuk suatu bangsa secara yuridis formal.

Apabila kita amati, faktor apa penyebab lahirnya bangsa Indonesia. Seorang sarjana Barat bernama *Ernes Raynold*, mengatakan banyak faktor yang menjadi motivasi terbentuknya bangsa. Antara lain : *Rasa senasib dan sepenanggungan*. Mereka orang perorangan mengusir penjajah dari bumi Indonesia gagal total. Pangeran Diponegoro dari Jawa Tengah, Imam Bonjol dari Sumatera, Teuku Umar dari Aceh, Hasanudin dari Makasar, semuanya gagal. Mereka merasa senasib sepenanggungan. Ini merupakan perekat. Merupakan pengendalian dari lahirnya bangsa di Indonesia.

Sehari setelah kemerdekaan, 18 Agustus 1945 kemudian diundangkan Undang-Undang Dasar 1945. Dari UUD tersebut saya mencatat tiga amanat, *dari the Founding Fathers* kita yang berkaitan dengan integrasi bangsa ini. Antara lain banyak tetapi yang saya garis bawahi hanya tiga. *Pertama*, Negara Republik Indonesia berbentuk kesatuan. *Kedua*, Indonesia adalah negara hukum. *Ketiga*, memberikan suatu tugas, memberikan suatu fungsi yang harus dilaksanakan. Empat fungsi yang

pertama yang disebut *protectional function* (fungsi perlindungan). Undang-Undang Dasar mengatakan, Negara akan melindungi segenap bangsa. Fungsi yang kedua, adalah fungsi kesejahteraan. Undang-Undang Dasar mengatakan negara akan memajukan kesejahteraan bangsa. Fungsi yang ketiga adalah *Education Function*, fungsi pendidikan. Undang-Undang Dasar mengatakan negara akan mencerdaskan bangsa. Fungsi keempat adalah fungsi kedamaian. Undang-Undang Dasar mengatakan negara akan menciptakan kedamaian yang kekal dan abadi. Inilah tiga amanat yang dibebankan oleh para pembentuk negara kita.

Tetapi saat ini kita bisa melihat bahwa 57 tahun kemerdekaan apa yang terjadi, amanat-amanat tersebut jauh dari kenyataan. Mari kita lihat bersama-sama. Negara kesatuan, sekarang muncul ide-ide untuk disintegrasi. Aceh sudah memproklamsikan kemerdekaannya. Minta supaya bebas dari kesatuan RI. Papua juga sudah menaikkan bendera Bintang Kejora. Begitu juga daerah-daerah lain sudah mulai bibrik-bibrik melepas diri dari negara kesatuan. Ini berarti bahwa amanat pertama betul-betul tidak terwujud. Oleh karenanya dalam hal ini saya akan membahas masalah pokok. Satu masalah pokok, mengapa harus tergulir suatu paham disintegrasi di negara Indonesia ini?. Apakah sebabnya?. Kalau kita tahu penyebabnya maka kita akan tahu terapi yang paling cocok.

Penyebab *pertama*, karena lem (perekat) untuk berdirinya bangsa yaitu rasa senasib dan sepenanggungan telah dirusak. Nasib setiap suku bangsa dibikin tidak sama. Inipun andil dari pemerintah. Mulai ordelama, orde baru pembangunan terpusat di Jawa. Sedangkan di luar Jawa pembangunan lebih terlambat. Padahal sumber-sumber pendapatan daerah berasal dari luar Jawa. Masyarakat Aceh, tambang emas di Arum ditimba oleh pemerintah pusat (Jawa). Sedangkan yang kembali ke Aceh hanya beberapa persen. Ini asal mula terjadinya Gerakan Aceh Merdeka. Mereka menuntut harta kekayaan supaya mereka dapat membangun di Aceh. Jadi nasib satu persatu di bikin tidak sama. Ironisnya yang merusak, sengaja atau tidak dari pihak pemerintah. *Freeport*, berapa trilyun keuntungan dari Tembaga-pura, yang kembali ke daerah hanya beberapa.

Penyebab *kedua*, negara kesatuan disalah tafsirkan. Istilah persatuan mulai orde lama sampai orde baru ditafsirkan sentralisasi. Kesatuan adalah sentral. Sentral adalah satu. Sehingga serba pusat. Semuanya serba pusat. Pemerintah daerahnya kepanjangan tangan dari pusat. Semua didrop dari pusat, pemerintah daerah tidak punya kewenangan untuk mengembangkan daerahnya. Begitu juga sumber-sumber daya alam di daerah semuanya lari ke pusat. Termasuk tenaga-tenaga ahli, dalam bidang seni, olah raga, dll. Dari daerah yang kelihatan baik pasti ditarik ke pusat. Sehingga daerah akan menjadi sapi perahan dari pemerintah pusat.

Penyebab *ketiga*, amanat yang kedua, yaitu empat fungsi yang semakin terpuruk. Lima puluh tujuh tahun kita merdeka, tetapi empat fungsi tadi mari kita lihat. Fungsi pertama, *protectional function* (fungsi perlindungan). Kalau warga merasa terlindungi hidupnya pasti ayem. Tetapi apa yang terjadi, beberapa suku bangsa kita masih hidup dalam keadaan was-was, ketakutan dll. Negara kita belum dapat memberikan perlindungan sebagaimana diminta oleh para pembentuk negara kita. Fungsi yang kedua, *Welfare function* (fungsi kesejahteraan). Masih banyak masyarakat kita yang hidup dibawah garis prasejahtera. Padahal sejahtera untuk ukuran bangsa Indonesia adalah sangat-sangat simpel. Ukurannya hanya SPP (sandang, Pangan, Papan). Apabila itu terpenuhi sudah dianggap sejahtera. Sandang pangan berarti pekerjaan tetap. Papan berarti tempat tinggal yang layak. Ironisnya kadang-kadang yang membikin tidak sejahtera adalah pemerintah sendiri. Sampai detik ini saya belumpemah melihat ada undang-undang yang mengatur kepentingan umum itu apa. Sehingga dengan dalih kepentingan umum ini pemerintah dengan mudah sekali merekayasa suatu kepentingan menjadi kepentingan umum. Penggusuran tanah besar-besaran, dengan dalih untuk kepentingan umum. Akhirnya bermuara kepada penderitaan rakyat. Yang ketiga dalah *fungsi pendidikan*. Inipun terperosok. Kita cukup prihatin, kalau luar negeri mengirim tenaga ahli ke Indonesia betul-betul ahli. Ahli hukum, ahli kimia, ahli sejarah, ahli bahasa. Tetapi kalau Indonesia mengirim tenaga ahli ke luar negeri hanya tenaga ahli perbabuan. Ini menunjukan tingkat skill (keahlian) adalah merosot sekali.

Fungsi yang keempat, kedamaian abadi. Apalagi damai luar negeri, damai dalam negeri saja belum dapat terwujud. Kita sering melihat sidang-sidang MPR para elit politik. Sekarang bukan lagi berkedaulatan rakyat, tetapi berkedaulatan parpol. Mereka mementingkan parpol masing-masing, lupa bahwa dia adalah amanat dari rakyat. Berarti kedamaian dalam negeri belum terwujud apalagi luar negeri. Begitulah amanat yang kedua belum juga terwujud.

Sekarang amanat yang ketiga, yaitu negara hukum. Mestinya apabila kita mengatakan negara hukum, maka harus sentral. Merupakan pusat dari segala aktivitas, menjadi *centre of action*. Tindakan aparat dan rakyat bisa dikembalikan kepada hukum.. Tetapi apa sekarang yang terjadi, hukum hanya instrumental. Pada Orde Baru semua perbuatan presiden dibuatkan kepres-nya. Berarti hukum hanya sebagai alat legitimasi dari perbuatan pejabat. Sehingga negara hukum menjadi terbalik. Bukan *Rule of law* yang terjadi, tetapi *Political Rule of law*. Jadi dalam hal ini politik yang menggantikan peranan hukum. Nah itulah penyebabnya. Sekarang kita coba memecahkan bagaimana terapinya.

Terapi yang *Pertama*, bagaimanapun juga negara persatuan harus dipertahankan. Seiring dengan bergulingnya reformasi muncul faham federal atau liberal. Dua-duanya merupakan pekerjaan yang berakibat berat. Ibarat kita akan makan buah simalakama. Oleh karenanya pemerintah kita sudah cukup bagus. Tadi sudah disebut dengan otonomi yang luas, bebas, riil dan bertanggungjawab. Itu Otonomi menurut UU No. 2 tahun 1999 secara kulit. Secara isi saya berani mengatakan itu Otonomi dengan sistem federal. Yang kita ambil federalnya, buktinya apa ?

Pertama, Dalam pembagian wewenang menggunakan teori sisa. Teori residu. Ini hanya ada pada pemerintah federal. Pemerintah pusat hanya minta 5 yaitu *Hankam, Luar negeri, Moneter (keuangan), Peradilan, Agama*. Sisanya serahkan daerah. Ini sistem federal. Bukti kedua, dihapuskannya tingkatan-tingkatan pemerintah. Sekarang tidak ada tingkat I, II, III, desa, dll. Semuanya tidak ada. Sehingga Bupati secara

fungsional bukan bawahan Gubernur. Secara administratif memang dia ada dibawah gubernur. Bupati bertanggungjawab langsung kepada rakyat. Ini sistem federal.

Nah sekarang perpaduan. Sistem kesatuan dan sistem federal. Ini merupakan terapi yang paling bagus. Hanya saja bagaimana tekad kita untuk melaksanakan otonomi ini. Keberhasilan otonomi sangat tergantung pada penyelenggaraan pemerintah daerah. Kalau seperti sekarang DPRD dan pemerintah daerah itu sebetulnya telah diikat dengan suatu tali. Dalam Undang-Undang dikatakan hubungan kemitraan. Jabarkan kemitraan itu apa. Sekarang malah tidak, di Surabaya DPRD memecat walikota, DPRD memecat gubernur. Arogansi muncul, mereka lupa bahwa ada tali hubungan kemitraan. Sayangnya dalam tatib atau perda belum dijabarkan kemitraan itu apa. Sehingga arogansi itu muncul. Kinerja belum baik yang dituntut hanya pesangon saja.

Terapi kedua, agar amanat fungsi negara tadi dapat dilaksanakan dengan baik maka harus diefektifkan lembaga pengawasan. Tanpa pengawasan ibarat mobil tanpa rem. Sehingga dalam melaksanakan fungsi negara tidak terkendali karena remnya tak berfungsi. Pengawasan harus kita hidupkan. Pengawasan yang sekarang tidur dan sekarang perlu dibangun adalah *Independence Control* (pengawasan independen). Dalam demokrasi harus ada. Kalau pengawasan hanya waskat, internal ~~dan~~. Kadang-kadang dapat direkayasa, tetapi pengawasan independent oleh lembaga infra struktur politik seperti LSM, NCO, Organisasi di luar negara, ini perlu kita hidupkan seperti Parwi (*Parlemen Watch Indonesia*), ICW (*Indonesian Corruption Watch*), di Yogyakarta juga ada YCW (*Yogyakarta Corruption Watch*). Tetapi kadang-kadang karena lembaga ini masih kecil suaranya tidak didengar. Para penyelenggara pemerintah selalu menggunakan pepatah biarlah anjing menggonggong, kafilah berlalu.

Di Amerika, lembaga-lembaga ini dulu yang namanya *Watch Dog*, (Anjing pengawas). Sekarang sudah 150 tahun Amerika berdemokrasi sehingga anjingnya sudah dewasa, maka menggonggongnya cukup

berwibawa. Tetapi kalau Indonesia, karena kita baru beberapa tahun berdemokrasi Wacch Dognya ini, anjingnya masih berbentuk kirik Jawa.

Terapi *ketiga*, Supaya negara hukum tetap eksis maka mau tidak mau hukum dasarnya harus diamandemen. Saya adalah orang yang paling setuju amandemen UUD 1945. Sukarno dulu juga mengatakan, bahwa UUD 1945 ini adalah UUD sementara. Nanti kalau kita sudah punya MPR harus diamandemen. Supomo dulu juga mengatakan ini hanya undang-undang transisi. Saatnya kita harus mengamandir UUD 1945. Sampai detik ini amandemen keempat masih mengundang masalah. Apalagi hukum yang lebih rendah, hukum dasarnya saja masih belum terbentuk. Padahal ini rel ibarat kereta api. Relnya belum mapan. Bagaimana gerbong akan berjalan baik jika relnya belum mapan. Terutama saya usulkan dalam amandemen UUD 1945 hak asasi manusia harus betul-betul diatur. Saya mengusulkan ada 32 hak asasi manusia masuk semua. Tidak seperti sekarang hanya 4 pasal yang memuat hak asasi. Pelanggaran hak asasi dengan mudah terjadi. Dengan dalih hukumnya belum ada dan sebagainya. Bagaimanapun peranan hukum dalam UUD 1945 ini akan dapat menjadi negara disintegrasi bangsa. Saya terus terang tuntutan mereka yang menuntut disintegrasi hanya dua. Tuntutan pertama, mereka diminta menikmati harta kekayaan mereka sendiri (sumber daya alam), sehingga dapat membangun daerah. Tuntutan kedua, Pelanggaran HAM di daerah Aceh, Papua, tolong ditegakkan.

Kalau pemerintah bisa otonomi tadi, dengan memberi kesempatan daerah membangun daerahnya, juga peradilan hak asasi manusia dapat ditegakkan dengan baik mungkin mereka akan puas. Tetapi dapat kita lihat hukum kita sangat-sangat merosot saat ini. Istilah-istilah hukum banyak diplesetkan. Hakim itu jabatan terhormat, sekarang diplesetkan “hubungi aku kalau ingin menang”. Kemudian Pengacara, itu juga jabatan terhormat sekarang katanya singkatan Pengemis cari-cari Perkara. Ini sinisme terhadap hukum.

KEMAJEMUKAN MASYARAKAT DAN PENDIDIKAN POLITIK

Oleh : Arie Sujito

Masyarakat Indonesia tergolong memiliki tingkat kemajemukan (keragaman) tinggi. Hal ini diukur melalui dua parameter penting: (a) *gradual*, dengan berdasarkan pada tingkatan pendidikan, pekerjaan, kepemilikan kekayaan, dst; (b) *nominal* yang dilihat melalui bermacam suku bangsa, agama, bahasa, adat istiadat, dst. Keragaman struktur sosial demikian itu, secara teoritis pada umumnya dapat mengarah dua kecenderungan keadaan, yakni (1) integrasi dan (2) disintegrasi.

Terbentuknya integrasi, tatanan masyarakat yang solid dan kuat jika keragaman itu mampu dikelola dengan baik diantara kelompok atau aktor-aktor yang ada. Pengelolaan dapat didasarkan pada kesepakatan nilai dan persepsi untuk memahami keadaan dan perbedaan, kaitan budaya, agama, asal muasal dan konteks historis, serta ikatan-ikatan sosial dan ideologis lainnya. Sebaliknya, kemajemukan dapat berpotensi konflik dan mengarah disintegrasi atau perpecahan, jika didalamnya terkandung anggapan perbedaan merupakan ancaman apalagi tidak terbangun kesepahaman bersama dalam keragaman. Makna integrasi pada hakekatnya dipahami sebagai kesatuan suatu komunitas sosial terbentuk oleh rasa kebersamaan. Pengertian kebersamaan bukan untuk menyeragamkan (homogenitas), tetapi oleh dasar heterogenitas karena itulah, nilai kebersamaan dalam keragaman struktur sosial akan melahirkan integrasi atau kohesi sosial. Nah kunci dasar keduanya adalah kesepahaman mengenai perbedaan dan struktur sosial yang beragam (majemuk) itu. Bagaimana hal ini dijelaskan dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat.

Perjalanan sejarah dan dinamika menunjukkan, kemampuan kelola kemajemukan bukan pekerjaan yang mudah. Betapa sulitnya membangun konsensus dalam perbedaan. Namun, jika kita perhatikan dalam kehidupan masyarakat secara langsung, pengalaman itu juga dapat didapatkan dalam

kehidupan masyarakat. Menguatnya konflik dan kekerasan yang melibatkan negara dan masyarakat, sengketa antar kelompok etnis, sentimen agama dan permusuhan, perselisihan antar parpol, penyerangan antar kampung, dst merupakan bukti kerawanan dan kerentanan masyarakat. Dalam situasi konflik banyak korban berjatuhan dari material, trauma dan ketakutan oleh ancaman, nyawa melayang, sampai dengan hancurnya lembaga sosial oleh karena permusuhan yang berlarut-larut. Bahkan, konflik dan kekerasan itu bermuara pada ancaman disintegrasi. Sebaliknya, tidak sedikit di lingkungan masyarakat upaya-upaya mencegah konflik dan kekerasan lahirnya solidaritas sosial membantu dan menolong para korban gerakan kemanusiaan, bahkan juga intervensi dan fasilitasi penghentian pertikaian melalui dialog perdamaian. Fenomena yang terakhir itu tidak lain merupakan manifestasi kebersamaan dan kerukunan untuk menjaga integrasi dan kohesi sosial.

Tulisan ini akan lebih memfokuskan pada dinamika kemajemukan dengan kecenderungan integrasi atau disintegrasi itu dihadapkan realitas perubahan ekonomi politik sejak pergeseran struktur kekuasaan pasca otoriterisme. Perkembangan masyarakat di era liberalisasi politik dalam rangka demokrasi, dimana kontestasi politik demikian terbuka menjadi kondisi obyektif yang harus disikapi melalui pendidikan politik secara memadai. Tidak bisa dipungkiri, bahwa perjalanan lima tahun sejak jatuhnya kekuasaan orde baru telah menghasilkan dua hal penting, **pertama**, liberalisasi politik, **kedua**, kebebasan media.

Demokrasi sebagai sistem politik modern memperkenalkan empat prinsip penting yaitu 1. Partisipasi, 2. transparansi 3. Kontrol dan 4. Akuntabilitas. **Partisipasi**, diartikan sebagai keterlibatan warga secara aktif dalam proses pengambilan kebijakan. Sebelum suatu keputusan atau kebijakan itu ditetapkan, maka pemegang otoritas politik harus memperhatikan aspirasi warganya sebagai pertimbangan keputusan, tanpa kecuali. Karena itu, partisipasi dibutuhkan untuk mencegah agar proses dan produk kebijakan tidak diskriminasi. Sementara **Transparansi**

menyangkut keterbukaan proses politik, dimana segala informasi erat kaitannya dengan kepentingan publik dapat diakses oleh siapapun. Menyangkut di dalamnya adalah aturan main (*rule of the game*), materi atau substansi yang diatur, serta implikasi dari suatu kebijakan ditetapkan. Pengertian **kontrol**, mengandung maksud pentingnya mekanisme pengawasan jalannya sistem pemerintahan sesuai konsensus atau konstitusi yang disepakati dengan batasan wilayah kewenangan masing-masing. Pengawasan dapatlah dijalankan pada level kelembagaan maupun kesadaran kritis kolektif warga masyarakat. Sementara **akuntabilitas** diartikan sebagai perlunya pertanggungjawaban segala kebijakan itu kepada publik sebagai pemilik kedaulatan. Pertanggungjawaban tentu bukan hanya terbatas pada dimensi administratif, tetapi bersifat substantif atau politik.

Sejauh ini, secara umum perkembangan demokrasi masih terbatas pada arus formal prosedural. Sebagai mekanisme politik, demokrasi diperlukan sebagai dasar dalam kehidupan sehari-hari, termasuk berpolitik praktis, kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya. Pada tingkat negara seperti birokrasi, parlemen maupun sistem kepartaian yang berlaku, praktek demokrasi masih begitu tipis kendatipun jargon demokrasi itu telah bergema terus di reproduksi oleh negara. Demikian pula kehidupan masyarakat, ternyata masih rawan sengketa antar kelompok dalam berpolitik, dengan masih menebalnya gagasan feodalisme dan konservatisme. Dengan kata lain, menyaksikan membelukarnya praktik KKN, otoriterisme dalam kepemimpinan, premanisme, konflik dan kekerasan serta sejumlah persoalan-persoalan lain di aras negara dan masyarakat, memberi petunjuk betapa tantangan berat tengah menghadang untuk mewujudkan demokrasi di era liberalisme politik saat ini.

Apa yang perlu dilakukan dalam kerangka pendidikan politik pada masa liberalisme politik menyongsong demokrasi untuk keadilan rakyat? Mai kita uraikan.

Pertama, kesadaran yang merupakan aspek pembentuk persepsi dan kesepahaman mengenai perbedaan. Pada dasarnya, perbedaan itu

adalah realitas-realitas alamiah dan historis, karena itu kehadirannya sulit dielakan dalam kehidupan manusia. Dalam hal apapun kita bisa berbeda. Nah biasanya, tidak sedikit pula perbedaan juga melahirkan konflik dan kekerasan termasuk dalam ranah politik. Jika perbedaan dimanipulasi dan terdistorsi oleh kepentingan sepihak dengan mengabaikan hak-hak dan kepentingan orang lain, lalu melahirkan konflik. Jika konflik tidak dikelola atau diselesaikan sebaiknya mungkin (bahkan seringkali dibatasi atau direpresi), maka tidak mustahil konflik bisa mengarah pada tindak kekerasan. Di sini, kuncinya adalah bagaimana perbedaan itu dapat dipahami, dimengerti dan ditoleransi agar tidak saling merugikan. Konflik dikelola, diselesaikan dan ditransformasikan menuju perdamaian. Bagaimana strateginya?

- a. Ciptakan ruang mediasi. Selama ini masyarakat kita selalu tersekat-sekat atau terbatas oleh perbedaan, tanpa dihubungkan arena dalam berkomunikasi. Keterbatasan media atau ruang komunikasi itu menyebabkan munculnya potensi manipulasi informasi dan persepsi. Wajar saja jika perbedaan kemudian terdistorsi, lalu lahirilah kecurigaan antar sesama. Persepsi yang saling berlawanan tidak dikomunikasikan, akibatnya saling curiga. Forum komunikasi di tingkat kampung, desa, kota yang bersifat informal biasanya sangat efektif sebagai basis penguatan kesadaran membangun hubungan kebersamaan diantara masyarakat yang majemuk. Disanalah, prinsipnya perbedaan perlu dikomunikasikan tidak terpendam yang akhirnya menjadi bom waktu yang siap meledak, dalam bentuk konflik dan kekerasan.
- b. Membuka diri secara inklusif. Karena kenyataan keragaman yang ada di masyarakat, pergaulan secara inklusif menjadi langkah penting yang harus ditempuh. Interaksi sosial jangan dibatasi karena kesamaan suku, agama, atau asal muasal kelompok atau kelas semata. Ini yang cenderung eksklusif. Tetapi justru melintasi perbedaan kelompok itu, supaya saling mengenal, mengerti akan

watak, karakter, perbedaan cara dan pemikiran dan seterusnya yang pada akhirnya muncul saling pemahaman dan toleransi.

- c. Memperluas dan mengembangkan tradisi dialog, dan menghilangkan cara-cara komando dan diktator. Merespon dinamika demokrasi dan kebutuhan mewujudkan integrasi bangsa maka dalam mengelola hubungan sosial hendaknya mengedepankan prinsip dialogis di semua sektor. Cara-cara fasilitasi yang menggunakan alur *botton up* untuk membangun partisipasi warga menjadi sangat relevan, terutama jika kita kaitkan dengan konteks stuktur dan kultur masyarakat yang sudah berubah ke arah lebih maju saat ini. Cara-cara intruksi tentu tidak efektif lagi dan harus dihilangkan, karena melalui cara komando itu integrasi bangsa hanyalah bersifat semu, yang hanya ditopang loyalitas dan ketakutan.
- d. Pengembangan pendidikan perdamaian, toleransi dan multikulturalisasi. Proses belajar atau arena pendidikan bagi masyarakat (anak-anak sampai orang dewasa) hendaknya memberikan bobot nilai yang besar pada pengembangan aspek perdamaian, toleransi, dan multikulturalisme. Kemampuan seseorang dalam dunia pendidikan semestinya tidak dipathok berbasiskan nasionalitas (kecerdasan otak) semata, tetapi juga kematangan emosi dan keramahan hati. Ini penting sebagai pilar membangun kesadaran solidaritas sosial.

Kedua, keadilan sosial ekonomi. Sebagian besar penyebab konflik dan kekerasan di tengah-tengah masyarakat (khususnya di Indonesia) karena masalah terjadinya jarak struktural antar kelompok. Fakta perbedaan akses (kesempatan) struktural (ekonomi, pendidikan, lapangan kerja, kekuasaan) sehingga mempengaruhi kesejahteraan menjadi lahan bagi meledaknya sengketa dan kekerasan warga. Nah, persoalan struktural ini biasanya bergerak secara cepat jika dibalut oleh isu-isu “SARA” (suku, agama, Ras, dan antar golongan). Kita tahu, kesadaran masyarakat masih sempit karena praktik manipulasi (sebagaimana terurai di depan), sehingga

perbedaan dan konflik mudah terperangkap pada pergeseran isu. Akar masalah konflik sebenarnya menyangkut keadilan sosial ekonomi, tetapi hal itu mudah bergeser menjadi agama atau suku. Kasus-kasus konflik dan kekerasan di Kalimantan, Ambon, Aceh, Papua barangkali dapat dijadikan argumen pemikiran itu. Karena itulah, berkaitan kebijakan ekonomi dan politik berkaitan dengan konflik dan kekerasan, tentunya harus mempertimbangkan pada prinsip-prinsip keadilan di semua tingkatan.

Ketiga, penegakan hukum secara konsisten. Prinsip penegakan hukum adalah penting dalam tatanan sosial masyarakat. Apalagi masyarakat kita adalah majemuk. Jika persepsi dan kesepahaman mengenai perbedaan tidak mampu diselesaikan, maka hukum harus menjadi alternatif dan pilar penting penengah. Sebagai instrumen penjamin keadilan, institusi hukum harus ditopang oleh aparat yang jujur dan bertindak adil, kultur hukum yang rasional, dan konteks struktur hukum yang demokratis. Karena fungsinya yang strategis, di semua level hukum harus mengabdikan pada keadilan. Pengalaman terjadinya praktik konspirasi aparat penegak hukum dalam bentuknya diskriminasi hukum, mengakibatkan ketidakpercayaan (*distrust* dan delegitimasi) warga terhadap hukum. Kita bisa lihat kekerasan massa dan perlawanan warga terhadap institusi hukum, setidaknya bersumber karena sistem hukum yang tidak ditegakkan secara konsisten. Demikian pula mengenai praktik penyimpangan yang terjadi di sektor negara maupun masyarakat, semestinya harus ditindak secara hukum dengan prinsip-prinsip dasar menjaga keadilan.

PASANG SURUT PARPOL (SEBUAH CATATAN DALAM PELAKSANAAN DEMOKRASI)

Oleh : H. Markhaban Fakkih

I. Pendahuluan

Sistem multi partai dan maraknya kehidupan politik telah membawa pada satu kondisi yang lebih memungkinkan untuk mewujudkan keinginan kualitas hidup menjadi lebih baik. Namun juga menimbulkan pertanyaan, apakah partai politik sudah benar dalam menjalankan fungsinya?

Partai politik yang dibentuk oleh sekelompok warga secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita, jelas sebagai suatu badan hukum. Seiring dengan otonomi daerah, peranan parpol sejak jaman demokrasi liberal sampai reformasi saat ini, parpol yang diatur dalam undang-undang nomor 31 tahun 2003 menjadi bahan diskusi yang menarik. Pasang surut sejak awal berdirinya NKRI akan menambah wacana kehidupan demokrasi.

II. Zaman Partai-partai Politik Bagian I

Setelah keluar maklumat 3 November 1945, tumbuh dan berkembang partai-partai politik yang pada umumnya didasarkan pada primordial. Menjelang pemilu 1945 semakin kentara ikatan primordial tersebut mempengaruhi pengorganisasian partai-partai politik. Termasuk dalam hal garis sosial keagamaan sesuai variasi yang ada waktu itu, yaitu santri, priyayi dan abangan.

Pada bagian ini terwujudlah demokrasi parlementer yang berakibat tidak ada stabilitas pemerintahan. Kabinet sering berganti, bahkan pada periode ini tercatat tidak ada satupun kabinet yang mencapai usia tidak lebih dari dua tahun. Hal ini terjadi karena tidak adanya kekuatan mayoritas di parlemen, perebutan kursi-kursi jabatan diwarnai politik dagang sapi.

Pemilu 1955 diharapkan akan terbentuk pemerintah dengan kekuatan mayoritas. Ternyata hasil pemilu tetap tidak menghasilkan kekuatan mayoritas. Puncaknya terjadi kegagalan konstituante mengambil keputusan. Akhir dari pertikaian partai-partai politik keluarlah dekret 5 juli 1959.

Periode demokrasi terpimpin tercatat terjadinya penurunan peran partai-partai politik. Pada masa ini yang berperan hanyalah PKI dengan praktek-praktek kotor, tetapi bukan sebagai partai mayoritas. Dominasi PKI hanya bisa diimbangi oleh militer. Ujung dari dominasi PKI berakhir dengan kejatuhan PKI oleh rakyat Indonesia dimotori oleh pihak militer.

III. Zaman Partai-Partai Politik Bagian 2

Orde baru melakukan reorganisasi dan refungsionalisasi politik, baik suprastruktur, maupun infra struktur dengan maksud untuk menciptakan stabilitas politik. Partai-partai politik dianggap berperan mengganggu stabilitas nasional yang akhirnya membuat kekacauan Politik. Fusi partai politik tahun 1973 merupakan keberhasilan orde baru untuk mengontrol partai politik dan terjadilah sentralisasi Politik ditangan karya pemegang kekuatan mayoritas.

Keberadaan Partai baik PPP maupun PDI hanya sebatas sebagai pelengkap demokrasi. Golkar membangun kekuatan mayoritas menggunakan KORPRI sebagai mesin politik yang dikawal ketat oleh militer.

Partai politik selama Orde Baru tidak lebih hanya sebagai tukang stempel untuk menyetujui konsep-konsep politik dan Golkar yang dirasa ada manfaat terjaganya stabilitas selama 30 tahun. Sayangnya kekuatan mayoritas Golkar tidak diikuti dengan peningkatan kualitas kehidupan demokrasi. Pemilu hanya sebagai alat legitimasi pemerintah, bukan sebagai alat demokrasi. Proses depolisasi massa dilaksanakan agar massa terasing dari arena politik dan menciptakan iklim tidak ada beda pendapat.

Peran parti Politik yang sangat kecil memang membawa hasilnya yang besar, terciptanya stabilitas Politik (meskipun semu) Tiga kekuatan politik merupakan kelanjutan ikatan primordial dengan tiga varian, PPP mewakili santri, Golkar mewakili priyayi, PDI mewakili abangan. Ketiga varian berdasar teori Clifford Geertz sebenarnya tidak cocok digunakan pada masa itu.

IV. Zaman Reformasi

Keruntuhan orde baru memunculkan kembali kebebasan termasuk dalam bidang politik ditandai dengan berdirinya partai-partai politik seperti pada zaman liberal.

Pemilu 1999 diikuti 48 partai politik, diharapkan akan membawa angin segar bagi kedaulatan benar-benar ada ditangan rakyat, dalam kenyataan kedaulatan rakyat telah dikebiri (dirampas) oleh para sebagian Elite politik, demi memperebutkan posisi sentral. Partai-partai politik juga masih mengedepankan kepentingan elite dan bukan segera mencari jalan keluar mengatasi krisis. Marginalisasi politik selama orde baru telah berubah 180 derajat dengan berperannya Partai Politik di semua lini pemerintahan.

Kekuatan mayoritas tidak juga terwujud pada masa reformasi ini sehingga pemerintahan menjadi rapuh, mudah ditarik dan diulur oleh partai-partai yang berkekuatan seimbang. Upaya mewujudkan kekuatan mayoritas dan mengurangi kekuatan jumlah Partai Politik adalah Undang-undang Nomor 31 tahun 2003 yang memperketat berdirinya Partai Politik.

Undang-undang Nomor 31 tahun 2003 menjadi agak merepotkan apabila dikaitkan dengan kebebasan berserikat menurut UUD 45. Begitu pula apabila dikaitkan dengan otonomi daerah khususnya otonomi berpolitik bagi masyarakat di daerah. Aktifitas politik yang ditonjolkan oleh partai-partai masih mengedepankan kepentingan partai dan lebih khusus kepentingan elite politik.

Apabila tidak segera ada perubahan peran dan aktivitas partai-partai dikhawatirkan rakyat akan muak pada partai-partai besar yang ada, karena merasa kedaulatan mereka telah dirampas dan partai-partai tersebut tidak ada pengaruhnya dalam merubah tingkat kehidupannya. Jika hal ini terjadi akan terjadilah krisis politik serta partai-partai kembali dimarginalkan bukan oleh penguasa tapi oleh rakyat.

V. Penutup.

Peran partai-partai menjadi semakin kuat apabila dalam mengemban kedaulatan rakyat benar-benar menjalankan fungsinya secara maksimal. Elite politik dituntut meninggalkan kepentingan pribadi seperti demi kekuasaan dll. Kehadiran partai masih diperlukan rakyat sepanjang kepentingan rakyat lebih dikedepankan dari pada kepentingan idiologi partai.

Kebebasan berserikat dengan pilar multi partai menjadi dasar berkembangnya demokrasi. Namun demikian tetap diperlukan adanya kekuatan partai mayoritas sebagai pendukung stabilitas pemerintahan. Era reformasi dengan kebebasan dan demokratisasi dalam kerangka otonomi daerah menjadi semakin mantap dengan peninjauan kembali undang-undang nomor 31 tahun 2002. Salah satu hal yang patut diperhatikan adalah diakomodir partai-partai lokal yang memang riil ada, tetapi tidak memenuhi syarat secara Nasional.

POKOK - POKOK GAGASAN PENDIDIKAN POLITIK, PEMILU, DAN DEMOKRASI

Oleh : Dadang Juliantara

Sekarang ini kita mulai mendengar suara-suara miring terhadap proses reformasi yang sudah berjalan sejak tahun 1998. Kita mendengar: "Rakyat tidak butuh reformasi, rakyat butuh nasi". "Rakyat bosan dengan politik". "Rakyat Rindu orde Baru". Dan seterusnya. Suara yang dimaksud bukan saja suatu kritik, melainkan telah memasuki tahap delegitimasi terhadap apa yang berlangsung lima tahun terakhir ini. Bagaimana masalah ini harus dipahami?. Benarkah reformasi tidak menghasilkan apa-apa?. Benarkah reformasi hanya menghasilkan kekacauan dan ketidakadilan.

Ketimpangan Kuasa sebagai Pangkal

Untuk memahami dengan jelas dan kritis berbagai proses delegitimasi tersebut, ada baiknya bila kita meninjau beberapa segi dasar, yang harus dilihat sebagai persoalan fundamental yang dihadapi rakyat atau bangsa Indonesia.

Memahami Indonesia, saat ini pada dasarnya tidak bisa dilepaskan dari kenyataan Orde baru (OB) yang berlangsung selama tiga dasa warsa. Melihat OB berarti memahami sebagaimana sebuah ketimpangan kuasa (kuasa asimetri) hadir, dan menjadi realitas hidup rakyat. Ketimpangan kuasa pula yang menjadi faktor dari kekerasan dan kemiskinan masa rakyat. Perubahan tidak akan punya arti jika hanya berarti perubahan kepemimpinan, dan tidak menyentuh perubahan relasi kuasa. Perubahan relasi kuasa tidak lain dari proses demokratisasi.

Ketimpangan kuasa telah menempatkan masa rakyat dalam posisi serba lemah dan mudah dikalahkan perlawanannya. Partisipasi menjadi semu, sebab kesadaran masa rakyat adalah kesadaran bikinan penguasa. Rakyat menjadi subordinat dari penguasa. Sebaliknya penguasa bukan sebagai pelayan, tetapi justru minta dialayani. Negara bukan menjadi organisasi

kekuasaan rakyat, justru menjadi organisasi kekuatan elite yang mengabdikan untuk kepentingan elite. Rakyat merana dalam kemiskinan dan penderitaan, sementara elite memperoleh kemuliaan dari derita rakyat. Maka sebuah perubahan penguasa demokrasi, hanya akan punya makna jika menyentuh penguatan rakyat dan pada akhirnya membuka jalan bagi perubahan dengan prakarsa rakyat. Bagaimana kualitas dari ketimpangan kuasa yang ada?. Baiklah kita melihat lebih dalam bentuk ketimpangan kuasa yang ada, yang diciptakan oleh penguasa orde baru. *Tiga tingkat penaklukan*. Secara strategis, apa yang bisa dilukiskan sebagai upaya penaklukan, dilakukan pada tiga tingkat utama, yakni:

- Pertama, upaya untuk menaklukan (mengontrol) daerah. Suatu usaha melakukan stabilisasi antar daerah, dengan cara membangun relasi hirarki antara pusat dan daerah. Langkah ini dilakukan dengan mengembangkan kebijakan pengaturan pemerintah daerah, melalui UU No. 5 tahun 1974, tentang pemerintah di daerah. Kebijakan ini telah menjadikan pemerintah daerah bukan sebagai representasi kepentingan rakyat daerah, melainkan sebagai representasi kepentingan pusat. Pilihan kebijakan tersebut sesungguhnya merupakan akibat langsung dari kerangka berfikir efisiensi, sehingga yang dikembangkan adalah struktur (pemerintahan) yang memungkinkan efisiensi dan bukan struktur yang memungkinkan demokrasi lokal. Pemerintah pusat menganggap pihaknya telah paling tahu akan kebutuhan masyarakat, karena itu intervensi pusat lebih besar untuk mengontrol pemerintah daerah guna menjamin efisiensi dan kemajuan ekonomi. Sudah barang tentu kerangka ini mendorong praktek penyeragaman dan menegaskan keanekaragaman, yang secara substansial bermakna yang mengabaikan nilai-nilai demokrasi.
- Kedua, kontrol terhadap desa. Stabilisasi daerah segera diikuti oleh langkah stabilisasi desa melalui UU No. 5 tahun 1979. Dikatakan : “ bahwa sesuai dengan sifat negara kesatuan Republik Indonesia, maka kedudukan pemerintah desa sejauh mungkin

diseragamkan, dengan mengindahkan keragaman keadaan desa dan ketentuan adat istiadat yang masih berlaku untuk memperkuat pemerintahan desa agar mampu menggerakkan masyarakat dalam partisipasinya dalam pembangunan dan penyelegaraan administrasi desa yang makin meluas dan efektif....” Keragaman tidak dilihat sebagai keniscayaan dan kebutuhan obyektif, justru sebaliknya,” Pemerintah desa yang sekarang ini bentuk dan coraknya masih beraneka ragam, yang kadang-kadang merupakan hambatan untuk pembinaan dan pengendalian yang intensif” (bagian penjelasan nomor 4).

Langkah yang dilakukan orde baru dalam proses pembangunan pedesaan tersebut, tidak lepas dari keinginan dasar, yakni mengkooptasi desa dan menempatkannya sebagai instrumen kekuasaan pusat, melalui pengembangan lembaga (politik) baru dalam kehidupan masyarakat desa serta mengenalkan berbagai gagasan yang dinilai modern. Maksud dasarnya adalah untuk menciptakan suatu integrasi yang utuh terhadap desa-desa (Jawa dan Luar Jawa). Proses ini dimaksudkan pula untuk membuka berbagai akses terhadap desa, khususnya dalam memperkuat program pembangunan, seperti “realisasi agenda revolusi hijau”.

Usaha yang dilakukan tidak berhenti disitu. Pemerintah pusat, melakukan suatu langkah yang bisa dibaca sebagai “menghadirkan sosok kekuasaan pusat di desa”. Dengan demikian, pemerintah desa dan elite lokal pada umumnya, tidak lagi menjadi alat bagi rakyat desa, melainkan lebih peka pada dinamika kepentingan pusat. Koorkoratisme yang dikembangkan, menjadi bagian lain dari suatu upaya untuk menaklukkan seluruh potensi yang ada, termasuk dominasi elite lokal yang dipandang bisa menjadi potensi resistensi.

Hal dari keseluruhan politik terhadap desa sebagai mana diungkapkan M. Ryaas Rasyid, ketika masih menjabat sebagai Dirjen PUUD, menyampaikan suatu pandangan kritis mengenai UUPD no. 5 tahun

1979, dalam forum rapat konsultasi penyelenggaraan pemerintah daerah (12 – 7- 1999) : (1) Masalah penyeragaman desa-desa; (2) Proses depowering; (3) pemerintah desa menjadi alat mobilisasi; (4) Otonomi desa tidak diakui secara tegas; dan (5) mengedepankan kekuasaan. Desa tidak lagi menjadi wilayah komunitas yang terkontrol oleh warganya, tetapi sebaliknya sebagai alat pengendalian dan alat untuk memperkuat realisasi kepentingan elite pusat.

Ketiga, penaklukan individu. Setelah episode pengendalian daerah dan desa, maka giliran berikutnya adalah melakukan kontrol terhadap individu, terutama menyangkut kontrol terhadap hak (politik) dasar, yakni hak mengeluarkan pendapat (pikiran) dan hak untuk berorganisasi (berkumpul dan berserikat). Melalui paket UU politik tahun 1985, penguasa melakukan pengendalian terhadap partai politik, dengan deidiologisasi dan penetapan asas tunggal. Halaman ini bisa dibaca sebagai kontrol terhadap keyakinan politik. Negara bergerak dari berwatak otoriter ke arah totaliter. Bukan saja tindakan yang dikontrol, melainkan juga pikiran. Untuk melawan berbagai perlawanan terhadap tekanan individu ini, penguasa mengadopsi konsep-konsep yang dilabelkan sebagai kultur timur, dan mengkontraskan dengan apa yang disebutnya sebagai kultur barat. Pada bagian lain, penguasa masih memberlakukan UU subversif, dengan pasal-pasal karet, yang memungkinkan penguasa memukul lawan-lawan politiknya. Intelijen berkeliaran dimana-mana, bukan untuk menciptakan rasa aman bagi individu, melainkan menjadikan individu sebagai obyek dimana setiap tindakan dan pikiran individu bisa dijadikan bahan dakwaan di pengadilan.

Melalui tiga tingkat penaklukan ini, dapat dikatakan bahwa negara orde baru sesungguhnya telah mempersiapkan suatu struktur kekuasaan hirarkis, yang menguasai satuan-satuan kewilayahan dan wilayah privat (pribadi). Dengan demikian, negara, telah menetapkan batas-batas penting mengenai wilayah kekuasaan negara dan wilayah yang bisa

dimasuki oleh pribadi (individu). Makna tersembunyi dari proses ini adalah suatu skema dimana individu menjadi manusia “pengungsi” memasuki wilayah dengan negara sebagai tuannya. Skema ini bisa dikatakan mirip dengan skema jaman feodal, yang menempatkan pribadi dalam struktur hirarkis, dalam kualitas manusia di bawah (masa rakyat), dan kwalitas manusia di atas (elite penguasa) dibedakan, ibarat kawula dan Gusti. Pada penampilan yang paling vulgar, dimana seragam dipandang sebagai repretansi dari elite (dunia elite), maka pemakai seragam segera bisa berubah sebagai makhluk yang penuh kemudahan dan fasilitas.

Tiga tingkat pembatasan (pengucilan). Apa yang dibayangkan sebagai suatu proses pembatasan atau bahkan pengucilan, adalah suatu proses yang membentuk kondisi (dan situasi), dimana pribadi atau kelompok, menjadi kesulitan bergerak, sebagai akibat dari skema yang dikembangkan (yang ada). Dalam hal ini, kita menemukan setidaknya tiga tingkat pembatasan, yakni :

Pertama, Pembatasan akses informasi dan inisiatif. Negara mengatur sedemikian rupa apa yang boleh dikonsumsi masyarakat dan individu. Melalui lembaga pendidikan, keluarga dan institusi agama, negara melakukan kontrol sedemikian rupa, sehingga informasi yang diterima masyarakat sangat terbatas. Batas-batas antara informasi dan doktrin atau pamflet politik penguasa sangat tipis. Apa yang diungkapkan masyarakat, sering kali merupakan “jiplakan” atau “barang cetakan” dari apa yang sudah disampaikan oleh rezim. Lebih jauh dari itu, negarapun telah mengurangi imajinatif dan mungkin inovatif, akan dengan mudah dikebiri atau dibuang, dengan suatu garis dasar: tidak sesuai dengan Pancasila atau tidak sesuai dengan budaya timur. Singkat kata negara memonopoli kebenaran dan sumber-sumber kebenaran, serta moral yang menentukan mana yang baik dan mana yang buruk serta mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan oleh masyarakat.

Kedua, Pembatasan gerak langkah masyarakat, melalui pengendalian sistimatis atas arena-arena pembangunan kekuatan politik. Negara melakukan pengendalian sampai pada pembentukan organisasi-organisasi kemasyarakatan, termasuk partai politik. Partai telah dikebiri, dibatasi ruang geraknya, dan dibatasi apa yang boleh dipikirkan. Idiologi partai ditentukan oleh negara, dan program yang bisa dikembangkan partai harus sejalan dengan apa yang menjadi agenda negara. Daya kekuatan politik rakyat telah dihilangkan. Politik sendiri telah dikucilkan dari kehidupan rakyat sehingga dikalangan rakyat terdapat suatu kepercayaan bahwa suatu perubahan mendasar kehidupan mereka bisa terjadi tanpa suatu kepercayaan bahwa suatu politik. Parlemen sebagai institusi yang penting dalam kehidupan demokrasi, telah dikebiri sejak pagi. Bahkan yang sangat menyedihkan adalah ada banyak kalangan intelektual, yang tidak melihat praktek orde baru sebagai masalah, namun dengan sederhana menunjuk lokasi masalah pada parlemen itu sendiri. Mengabaikan praktek orde baru, tentu akan menempatkan parlemen dalam posisi terpojok, sebab sejak awal parlemen sesungguhnya bukan badan perwakilan rakyat, bukan wakil rakyat, melainkan wakil dari penguasa. Parlemen sesungguhnya adalah wakil tanpa rakyat.

Ketiga, Pembatasan akses rakyat dalam arena-arena pengambilan kebijakan (Keputusan politik).

Rakyat (massa) diposisikan tidak boleh sebagai penonton di bawah tribun. Arena yang ada telah dikurung dalam sejumlah prosedur legal, sehingga akses rakyat sangat terbatas atau bahkan tidak ada sama sekali. Rakyat sendiri sangat asing dengan proses pengambilan kebijakan, dan kadang meyakini bahwa pengambilan kebijakan merupakan urusan pemerintah, sedangkan rakyat kebanyakan hanyalah urusan makan saja. Malahan penguasa mengkampanyekan agar rakyat ada di rumah saja, dan tidak perlu dipusingkan masalah politik. Rakyat hanya diundang sekali dalam lima tahun, yakni suatu proses pengambilan putusan penting dalam mana rakyat tidak tahu apa yang diputuskan.

Para pengambil kebijakan menempatkan diri layaknya pihak yang memiliki otonomi untuk mengambil keputusan, meskipun tanpa persetujuan dari rakyat.

Perubahan substansial : Reformasi adalah gerbang.

Ketimpangan relasi antara negara dan rakyat atau antara masa rakyat dan penguasa pada dasarnya memuat berbagai dimensi-dengan ujung kekuatan masa secara nyata, dan tidak punya daya tawar. dimensi-dimensi yang dimaksud adalah :

1. Sukses penguasa adalah mencabut atau menjauhkan masa/ rakyat dari urusan politik. Politik menjadi urusan elite. Rakyat tabu berpolitik. Oleh sebab itu, politik menjadi barang asing dan terasing dari masa rakyat;
2. Menjauhnya politik dari wacana publik, membuat politik hanya dekat dengan sedikit orang atau pada orang yang sangat terbatas. Pada hal sebuah perubahan yang substansial membutuhkan ketertiban rakyat dalam jumlah yang besar.
3. Inti dari perubahan adalah ketika masa rakyat bisa ikut menentukan. Hal ini tidak lain dari terorganisasinya rakyat dalam kelompok-kelompok politik yang benar-benar menjadi representasi dari rakyat. Dengan demikian, dibutuhkan lebih dari sekedar kesadaran melainkan suatu kemampuan atau ketrampilan berpolitik;
4. Demokrasi yang substansial adalah ketika ruang pengambilan kebijakan benar-benar menjadi milik masa rakyat- dimana suara rakyatlah yang menjadi pegangan. Hal ini bermakna bahwa institusi politik formal benar-benar merepresentasikan kehendak rakyat. Perubahan dalam soal ini bukan saja menyangkut perubahan para pemain, melainkan perubahan sistem.

Dengan demikian, kita dapat katakan bahwa reformasi yang kini berjalan pada dasarnya bukan tujuan atau bukan ujung dari pembaharuan

atau perubahan yang dimaksudkan. Reformasi adalah “Bunyi Kentongan”. Sebagai pertanda bahwa pembaharuan harus segera dilakukan agar masa rakyat dan kejayaan bangsa Indonesia dapat dipertahankan. “Bunyi kentongan” inilah yang diharapkan dapat membangunkan semua pihak, agar mulai berfikir ulang- memeriksa kembali semula yang dianggap wajar, dan bersama-sama mengembangkan pikiran mengenai bagaimana cara mengatasi masalah-masalah yang ada. Pergantian pucuk pimpinan nasional, adalah simbul dari urgensi atau kemendesakan perubahan, dan tentu saja bukan tujuan dari perubahan itu sendiri. Pergantian pucuk pimpinan nasional adalah gerbang unuk mencapai perubahan yang substansial. Perubahan pucuk pimpinan yang tidak disertai dengan berbagai bentuk perubahan lainnya tentu saja tidak akan memberikan banyak makna.

Apa yang paling penting dari proses reformasi sekarang ini?. Kita mencatat suatu hasil yang sangat penting dari reformasi tersebut adalah terjadi rekonfigurasi kekuasaan dan termasuk terjadinya proses pencairan keseimbangan. Kekuasaan ini tidak lagi memusat melainkan menyebar. Yang menjadi masalah adalah bahwa “Pola dasar “pikiran di kalangan masyarakat telah terbentuk bahwa kekuasaan pada dasarnya terpusat. Masyarakat belum sempat memahami dengan jelas bahwa kekuasaan sudah tidak lagi memusat, melainkan telah menyebar. Kekuasaan Presiden sebagai contoh tidak lagi sebagai mana dulu tetapi telah mengalami kemerosotan luar biasa. Kita masih ingat dalam kasus presiden K.H. Abdurrahman Wahid, dimana pemerintah presiden dilakukan oleh pembantu presiden. Kita juga dapat melihat sendiri bagaimana pemerintah pusat kuwalahan berhadapan dengan prakarsa daerah.

Apa yang dapat kita katakan? Bahwa dalam proses yang demikian ini, sangat wajar apabila pembaharuan tidak berjalan cepat sebagaimana yang diharapkan masyarakat. Perubahan tidak lagi dapat berjalan dengan tangan besi, melainkan harus dengan “Demokrasi”. Keputusan tidak lagi bersifat hirarkis, melainkan harus mendengarkan apa yang dikehendaki oleh rakyat. Ketrampilan berdemokrasi yang sudah dicabut dari akarnya, membuat seni

berdemokrasi tidak dapat berjalan. Akibatnya masyarakat merasa bosan, lelah dan tidak sabar. Kondisi yang demikianlah yang kita lihat telah digunakan oleh kekuatan-kekuatan anti reformasi untuk memanipulasi kesadaran rakyat, dan mengatakan bahwa reformasi hanya membuat kekacauan. Jika kita tidak lebih jujur cobalah kita bandingkan proses reformasi yang baru berjalan lima tahun ini dengan apa yang dapat dilakukan oleh Orde Baru pada lima tahun pertama! Bahkan pemilu baru berani dilakukan tahun 1971, sedangkan kita dalam 6 tahun kali ini sudah akan menyelenggarakan pemilu yang ketiga.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa suatu perubahan dengan keterlibatan penuh dan prakasa sudah tentu tidak akan berjalan dengan cepat dan segera. Pentahapan atau proses yang bertahap, menjadi keharusan. Hal ini bukan akibat kemauan subyektif, melainkan kebutuhan obyektif. Hanya dengan proses bertahap, perubahan akan bias memberi makna. Pentahapan menjadi penjamin dari proses sistematis yang hendak dilalui, yang berujung pada : membuka jalan dan memperkuat langkah. Tidak biasa dihindari adanya kenyataan bahwa perubahan akan membutuhkan kekuasaan. Perubahan bukan perkara kecerdasan, tetapi soal kekuatan. Disinilah pendidikan politik diposisikan.

Pendidikan Politik Untuk Pembaharuan

Pendidikan politik untuk suatu pembaharuan tentu saja bukan perkara instan. Pendidikan politik tidak mungkin untuk diorientasikan untuk kebutuhan jangka pendek, seperti menghadapi pemilu. Kita menyadari bahwa pendidikan politik telah mengalami suatu reduksi yang sangat mendasar dan banyak terlibat kalangan terlibat didalamnya, termasuk LSM dan Perguruan Tinggi (kalangan Akademis). Pendidikan politik ramai dibicarakan orang hanya ketika ada momentum pemilu, seakan-akan suatu kecerdasan politik dapat dibangun pada satu malam.

Pendidikan politik yang kita maksud disini adalah suatu proses panjang yang dimaksudkan membangun 3 M, yakni Mengerti (menyadari),

mau dan mampu. Apa maksudnya? Mengerti (Menyadari) adalah suatu tahap dimana orang atau sekelompok memiliki pemahaman yang cukup mengenai politik dan praktek politik. Lebih penting lagi orang atau kelompok orang yang dimaksud, memiliki sejumlah ketrampilan analisis, terutama untuk menyingkap yang tersembunyi. Mau adalah suatu tahap dimana orang atau kelompok orang, beranjak pada tindakan dan tidak sekedar berhenti pada pemahaman. Mau atau karsa, dalam soal ini diartikan sebagai kemampuan orang atau kelompok terlibat atau melibatkan diri secara aktif dalam proses demokrasi. Mampu adalah suatu tahap dimana orang atau sekelompok orang memiliki ketrampilan demokrasi, ketrampilan berpartisipasi dan mengerjakan perubahan. Bagaimana kesemuanya dapat dicapai?

Untuk mencapai maksud tersebut, dibutuhkan sebuah tahap, yang dimaksud dengan tahap adalah fase-fase perubahan yang diinginkan dicapai. Adapun fase yang dimaksud fase yang diinginkan dan dicapai adalah :

1. Tahap dimana pendidikan politik politik, dan partisipasi politik, menjadi wacana publik. Hal ini berangkat dari suatu kenyataan, bahwa masalah ini masih merupakan “barang tabu” asing dan jarang dipakai. Artinya bahwa dalam tahap ini, pendidikan politik tidak lebih hanya sebagai penguatan wacana publik atau proses pengembangan ‘runag-ruang diskusi atau perdebatan’ Pendidikan politik dalam fase ini menjadi wahana untuk memeriksa kembali segala hal yang semula hal dianggap benar.
2. Tahap dimana “ruang-ruang perdebatan” menjadi lebih masal dan mendapatkan kaki yang jelas. Dengan demikian bukan saja “masalah pendidikan politik, politik dan partisipasi” menjadi wacana yang menguat melainkan jumlah mereka yang memiliki kesadaran bertambah dalam kuantitas dan kualitas, Pendidikan politik menjadi instrumen untuk pengorganisasian.
3. Tahap dimana kesadaran individu bertransformasi menjadi kesadaran kolektif, dengan demikian pendidikan politik menjadi wahana untuk

proses konsolidasi dan membangun organisasi untuk perubahan. Pendidikan politik merupakan alat untuk menyatukan individu-individu dan pada tahap selanjutnya menjadi kekuatan perekat, sehingga terbangun kelompok-kelompok penekan kelompok yang efektif.

4. Tahap dimana kelompok-kelompok penekan memiliki daya sebagai akibat posisinya yang menjadi bagian dari institusi politik. Pada tahap ini, politik tidak lagi hanya sekedar menjadi wacana, melainkan telah direalisasikan atau diwujudkan dalam praktek nyata.

Penutup

Dengan gambaran ini dapatlah kita katakan bahwa proses reformasi masih membutuhkan tenaga yang lebih besar agar sampai pada alamat yang dimaksud. Tanpa tenaga yang lebih besar, reformasi hanya akan memberi jalan pada otoriterisme merevitalisasi diri. Gerakan delegitimasi terhadap proses reformasi, menunjukan dengan sangat jelas bahwa gerakan reformasi pada dasarnya belum menjalankan misi dasarnya-menggelar pendidikan politik yang sistematis dan tranformatif.

INTEGRASI NASIONAL DALAM PERSPEKTIF POLITIK

Oleh : G Moedjanto

Kondisi terpecah-pecah :

Kita dapat merunut perang-perang di Indonesia sudah mulai sejak abad ke 8, seperti diberitakan prasasti Canggal, tahun 732.

Keadaan perang di Indonesia berlanjut sampai awal abad ke 20 Belanda berhasil menguasai Indonesia yang luas karena orang Indonesia tidak bersatu. Perang terjadi di Jawa, Sumatra, Sulawesi, Maluku.

Keadaan terpecah hampir terjadi pula pada jaman Jepang. Pada jaman itu wilayah-wilayah Indonesia dibagi tiga yaitu Sumatra, Jawa dan Daerah Indonesia lainnya. Tetapi syukurlah tidak berlanjut ke perpecahan.

Langkah Menuju Persatuan:

Langkah menuju persatuan mulai dengan munculnya kelas elite modern. Keterpelajaran membuat mereka mengenal berbagai ide seperti demokrasi, republik, liberalisme, nasionalisme, dan sebagainya.

Paham tersebut paling akhir mendorong muncul dan berkembangnya rasa persatuan, mulai persatuan dalam lingkup kecil berkembang ke persatuan yang lebih besar. Contoh persatuan daerah Jawa ke persatuan seluruh Indonesia. Kondisi persatuan kita juga integrasi, sedangkan sisi perpecahan kita sebut disintegrasi. Semula antara daerah yang satu dengan lain terlihat dalam pemasaran barang yang jangkauannya makin luas. Itulah yang disebut **emperium**.

Munculnya Dimensi Politik:

Persatuan memberi peluang untuk timbulnya negara. Negara diselenggarakan oleh pemerintah atas nama rakyat. Rakyatlah yang menjadi pemilik kedaulatan. Kalau pemerintah menjalankan amanat dengan baik,

rakyat akan terus membiarkan pemerintah menjalankan kekuasaan, ia akan diganti. Itulah yang disebut teori kedaulatan rakyat.

Untuk menjalankan kekuasaan rakyat membentuk partai-partai. Aspirasi rakyat disalurkan lewat partai-partai politik, terus ke badan-badan perwakilan dan berakhir ke pemerintah (badan eksekutif).

Bidang penyelenggaraan pemerintah seperti tersebut masuk dimensi politik. Dimensi politik meningkatkan persatuan **emporium** menjadi **imperium** dengan wilayah yang luas.

Dari dimensi Politik ke Multi – dimensi:

Dalam perkembangannya nasionalisme tidak hanya berdimensi politik, tetapi berdimensi ganda. Ada pun dimensi dari nasionalisme adalah dimensi:

1. Sosial
2. Ekonomi
3. Kultural
4. religius
5. Hukum
6. Dll

Kita tidak sekedar mau merdeka dalam politik, tetapi juga dalam bidang-bidang lain, sesuai prinsip nasionalisme yang multi-dimensi. Tetapi supaya kita dapat membangun dimensi-dimensi lain, samangatlah penting membangun dimensi politik supaya ada kebebasan berprakasa dan melaksanakan. Dengan begitu terlihat ada proses integrasi.

Unsur-Unsur dalam pengertian Integrasi :

Integrasi mengandung banyak unsur, yaitu:

1. Integrasi berasal dari **integrare** (latin) yang berarti memberi tempat dari suatu keseluruhan;
2. Integrasi juga berarti pembersatuan, pemanduan dan pembauran;

3. Ada integrasi sosial, yang berarti kohesi sosial, solidaritas social, keharmonisan sosial, atau keseimbangan social;
4. Ada integrasi politik;
 - a. Vertikal, yaitu integrasi elit dan massa;
 - b. Horisontal, yaitu integrasi teritorial yaitu mempersatukan unsur daerah menuju ke ketunggalan bangsa;
5. Intergrasi merupakan suatu proses dari kondisi terpisah, Bhineka, Heterogen.
6. Proses integrasi adalah :
 - a. Asimilatif = yang dominan diikuti;
 - b. Asosiatif = secara alamiah dengan membiarkan tetap ada kebhinekaan;
 - c. Unifikasi = penyatuan unsur-unsur, misalnya dalam bentuk NederlanschIndie

Lewat proses integrasi dapatlah dihasilkan negara bangsa (*Nation state*) dan negara kebangsaan (*national state*). *Nation state* adalah negara yang menjadi milik seluruh bangsa. Jadi seluruh bangsa menjadi pemilik dari negara yang bersangkutan. Maka pada mereka dapat *sense of obligation* (perasaan wajib membela negara). Padanannya dalam bahasa jawa rumongso melu handarbeni, maka wajib melu hangrungkebi.

Adapun *national state* adalah negara yang mengatasi paham perseorangan dan golongan, negara yang menjadi tempat bernaung (naungan) seluruh bangsa, yang memperlakukan seluruh bangsa secara adil atau sama. Maka dalam negara kebangsaan seluruh bangsa diperlukan secara adil atau sama. Maka dalam negara kebangsaan diskriminasi dalam SARA dan seks (gender) tidak pada tempatnya.

Faktor penunjang Integrasi :

Bangsa Indonesia mempunyai heterogenitas yang kaya untuk terjadinya perpecahan (disintegrasi). Tetapi syukurlah ditemukan juga

faktor-faktor penunjang terjadinya integrasi. Faktor-faktor integrasi itu ada yang bersifat sosiografis, kultural atau politik domestik dan kecerdasan bangsa Indonesia menemukan hikmah dari politik baik yang dipraktekkan Belanda maupun Jepang.

Adapun faktor integrasi domestiknya adalah :

1. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan potensi daerah yang berbeda;
2. Adanya pelayanan dan perniagaan antar pulau;
3. Tumbuhnya emporium dan imperium yang mempersatukan daerah (daya centripetal);
4. Pecahnya suatu imperium memberi peluang integrasi daerah (daya centrifugal);
5. Penyiaran agama Islam;
6. Kesamaan budaya, khususnya bahasa Melayu yang kemudian diangkat menjadi bahasa Indonesia;
7. Pendidikan dan paham-paham baru.

Semua mengembangkan kesadaran berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Politik kolonial memberikan hikmahnya:

1. Politik etis dan pembentukan Pax neerlandica
2. Politik kolonial baru yang mengarahkan negara jajahan menjadi negara merdeka;
3. Pemberian otonomi daerah sejak 1903 dan Volksraad, 1916;
4. Nasionalisme Indonesia yang masak karena penindasan Jepang;
5. Beberapa konsensi politik seperti pembentukan PETA, BPUPKI dan PPKI.

Keberanian dan kecerdasan pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia dapat meraub hikmah dari politik penjajahan baik pada jaman Belanda maupun Jepang.

Cegah Disintegrasi Pulihkan Integrasi Nasional.

Dari sejarah kita dapat menyimak bagaimana integrasi dibentuk. Memang tidak terlalu sulit, karena banyak faktor integrasi yang membantu. Tetapi lebih banyak dan berbahaya faktor disintegrasi.

Dalam waktu 5 tahun terakhir kita rasakan betapa aksi-aksi disintegrasi mencuat di Aceh, Poso, Maluku dan Irian (Papua), di samping dalam bentuk bentrokan-bentrokan berskala lebih kecil seperti perang antar kampung atau pembacokan-pembacokan yang kadang-kadang kriminalitas mumi.

Gejala-gejala disintegratif akan makin besar kalau kita tidak menghadapinya dengan penuh kearifan. Dua hal sangat penting untuk mencegah meluasnya disintegrasi dan memulihkan integrasi adalah ditegakkan keadilan (khususnya keadilan social) dan kemanusiaan (yang adil dan beradab), meluas ke tekad untuk merevitalisasi nilai-nilai dasar Pancasila.

Nilai-nilai itu pantas ditumbuhkembangkan lewat pendidikan sejak dini, dengan cara yang benar, misalnya tidak menjelekan atau membangkitkan permusuhan kelompok. Sebaliknya kita perlu membangun persaudaraan di segala arah masyarakat. Meminjam ajaran Islam kita pantas atau wajib mengembangkan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wathoniah dan ukhuwah basyoriyah (persaudaraan sesama Islam, sesama bangsa dan sesama umat manusia).

Penutup.

Dari uraian di atas dapatlah kita tangkap gambaran kronologi (sinkronis) dan diakronis (tematis) arti integrasi bangsa Indonesia.

Bangsa Indonesia tumbuh dari kondisi pada waktu lampau yang terpecah-belah, berkembang dalam integrasi emporium dan kemudian imperium Nederland Indie dengan wilayah yang sangat luas.

Dalam negara Indonesia wilayah yang sangat luas itu terdapat baik factor disintegrasi maupun faktor integrative. Antara kedua factor itu terdapat

adu kekuatan. Tinggal pilihan pada kita, kita mau memenangkan yang mana. Bila kita gagal menemukan jalan dan salah pilih, RI akan terpecah belah dan tinggal warisan sejarah.

Saya mengajak saudara-saudaraku mengikuti ajakan Bung Karno, selaku solidarity maker (penggalang persatuan), untuk mempertahankan kesatuan bangsa.

Tetapi jangan lupa, kitapun pantas mengikuti nasehat Bung Hatta, yang seorang administrator, untuk memelihara persatuan negara, dan tidak membiarkan terjadinya persatuan bangsa.

Demikianlah sumbang saran yang dapat saya sampaikan dalam diskusi ini. Salam dan hormat untuk Anda sekalian.

DIATAS DASAR YANG GOYAH

Oleh : KH. Muhaimin

Topik pembicaraan dalam forum saya rasa erat sekali hubungannya dengan kegalauan pihak dibayangi ketakutan terhadap semakin menipisnya rasa solidaritas dan kebangsaan generasi saat ini yang disebabkan oleh derasnya universalisasi nail akibat arus globalisasi.

Globalisasi sebenarnya telah mulai terjadi sejak penjelajahan Ibnu Battutoh ataupun pelayaran Columbus, Magelhaens dan Marcopolo, meskipun proses globalisasi pada waktu itu masih bersifat fisik dan manual. Dengan ditemukannya serat optik, proses globalisasi berjalan secara digital dan sangat massif sehingga lewat teknologi jarak jauh seperti telepon, televisi dan internet, gelombang perubahan terjadi secara besar besaran dibarengi sektor kehidupan.

Perubahan yang sedang berkecamuk saat ini bukan sekedar tersedianya perangkat keras yang lebih modern tetapi perubahan ini telah merambah berabagai wilayah kebudayaan yang menyangkut cara berfikir, gaya hidup, identitas social dan pandangan-pandangan keagamaan. Saat ini kita sedang berada dalam suatu proses sejarah yang sangat menakjubkan yaitu menyatunya peradaban umat manusia berkat kemajuan teknologi komunikasi dan transprtasi. Proses itu berjalan sangat pesat merambah kesegenap ujung dunia, sehingga hampir-hampir tidak ada satu bangsapun yang mampu menghindar dari arus besar yang sedang melanda dunia.

Berbagai isu mondial seperti hak asasi manusia, lingkungan hidup, demokratisasi, pluralisme, kesetaraan jender menyeruak masuk kedalam berbagai institusi dan menjadi acuan kebijakan baru. Ikon-Ikon barupun muncul dan dengan serta merta memperoleh sambutan gegap gempita dari semua kalangan terutama generasi mudanya yang sangat mudah terbuai oleh “budaya massa “ yang serba instant. Kultur baru ini telah membawa masyarakat ke arah cita rasa budaya yang sanagat dangkal dan

menyempitkan nalar explorative dan kreatifnya sehingga merasa cukup bangga menjadi sekedar epigon-epigon orang lain. Yang terjadi kemudian adalah fenomena hadirnya sebuah generasi yang terputus sama sekali dengan sejarahnya ; sejarah lokal, sejarah nasional, sejarah agamannya bukan sejarah dirinya sendiri. Mereka tenggelam dalam narasi-narasi heroik tanpa mampu memahami sari patinya. Sejarah, sekedar dibaca sebagai catatan kronologis kejadian yang telah lewat.

Dalam masyarakat yang tengah mengalami keterputusan sejarah, kejujuran dari, fair play, kepolosan dan kesederhanaan semakin dijumpai dalam kehidupan keseharian. Mental mau menang sendiri yang terlukis dalam adigium *asu gede menang kerahe* adalah gejala jamak (baca ; lumarah, biasa) sehingga persaingan hidup nyaris tanpa norma. Meskipun harus dibungkus dengan pembenaran menejerial dan paradigma-paradigma baru yang sama sekali tidak kita pahami (baca; menipu diri).

Efisien dan efektivitas sejati adalah eksploitasi luar biasa terhadap sumberdaya manusia yang mengeraskan hati dan membutakan nurani serta menghancurkan sumber kebesaran dan kehormatan bangsa kita tidak disana, karena kesemuanya itu akhirnya hanya akan melahirkan dis integrasi social dan dis integrasi kepribadian.

Namun apakah kita memang cukup memiliki energi sejarah dan spirit agama untuk membedung derasnya hamtaman gelombong budaya massa tadi?

Semua berpulang kepada nalar explorative kita, daya kreatif kita menyampang terus membengun optimisme yang harus selalu ada.

Dalam historigrasfi Indonesia tercatat berbagai kearifan sejarah yang telah lama hidup dalam pembendaraan budaya bangsa; misalnya dalam sejarah ekonomi, orang jawa lebih memilih harmonisasi hubungan hubungan sesama dengan mengalahkan nafsu kewedagan yang cenderung ingin memiliki sebanyak-banyaknya. Namun cita rasa ekonomi tersebut tiba-tiba berubah bahwa cara pandang demikian dianggapnya kurang produktif, kunodan mampu berakselereasi dengan zaman yang serba materi. Betapa kemudian kita mengalami diskontinuitas oleh uang lewat ungkapan”Ada uang abang sayang tidak ada uang abang dibuang”. Celaknya hal itu

dianggap wajar, logis karena kita telah berada dalam era baru meskipun ahistoris.

Mendewa-dewakan sejarah memang irasional, tetapi membuang sama sekali khasanah sejarah adalah suatu ketololan yang menjerumuskan. Mestinya, meskipun kita selalu menjumpai sesuatu yang baru walaupun dari penjelajahan alam vertikal sekalipun, haruslah dicari ruas sambung yang menghubungkan nilai-nilai lama dengan nilai-nilai baru yang datang kemudian (bukan sekedar fenomenanya), bahkan nilai barat dan nilai timur sehingga kita tidak selalu gagap menghadapi kejutan-kejutan budaya karena pola pikir yang hitam putih, barat atau timur, agamis atau sekuler, tradisional atau modern, Islam atau kristen.

Di alam yang serba terbuka ini mestinya tidak elok apabila bersikap apriori atau se-hauvinistik Dissraei yang lebih suka mengatakan right or wrong my country. Karena Asrul Sani telah lama meneriakkan “Kami adalah bersama ahli waris yang syah dari kebudayaan dunia”.

Sayang kita hanya mewarisi tradisi Ken Arok yang secara paksa memutus rantai sejarah karena ambisi pribadinya semata.

POTENSI PEREMPUAN DALAM PEMILU 2004

Oleh: Dra. Nur Azizah

Keberadaan pasal 65 UU Pemilu 2003 “ Setiap Partai Politik peserta Pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD tingkat Propinsi, DPRD tingkat kabupaten/Kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen, dapat diperkirakan tentu akan mengubah suasana pemilu 2004. Pasal ini akan dijadikan dasar hukum bagi perempuan pada umumnya, maupun para aktivis perempuan pada khususnya untuk menuntut hak dalam berpolitik. Impian dalam waktu dekat akan terjadi peningkatan jumlah perempuan dalam berbagai jabatan publik sehingga minimal akan mencapai 30 persen. Saat ini faktanya jumlah perempuan yang berkecimpung dalam jabatan tersebut masih jauh lebih rendah.

Jumlah perempuan di lembaga-lembaga Negara

Lembaga	Jumlah Perempuan		Jumlah Laki-Laki
Prosen jumlah Perempuan			
MPR	18	177	9,2 %
DPR	45	455	9 %
MA	7	40	18,8 %
BPK	0	7	0 %
DPA	2	43	4,4 %
KPU	2	9	18,1 %
Gubernur	0	30	0 %
Bupati/walikota	5	331	1,5 %

Data tahun 2001 dari berbagai sumber

Mewujudkan impian tersebut tidaklah mudah. Perempuan mempunyai sejumlah kelemahan dan sederetan ancaman. Peta kekuatan tersebut akan lebih mudah terlihat apabila kita menggunakan analisa SWOT dan berdasarkan analisa tersebut dapat dirancang strategi untuk memperkuat perempuan dalam pemilu 2004.

Strengtn /kekuatan

- Jumlah pemilih perempuan 52 % (lebih banyak dari jumlah pemilih laki-laki)
- Prestasi akademi perempuan pada umumnya lebih tinggi. Perempuan banyak yang berhasil menjadi juara kelas, meraih predikat Cum Laude di tingkat Sekolah dasar hingga Perguruan Tinggi.
- Perempuan lebih mudah terharu, lebih mudah peka terhadap penderitaan sehingga mempunyai potensi yang tinggi untuk menjadi pemimpin yang baik.
- Perempuan cenderung untuk kecenderungan untuk melakukan tindakan kekerasan yang lebih kecil dibanding laki-laki. Fakta memperlihatkan bahwa jumlah narapidana laki-laki jauh lebih besar di banding dengan perempuan.

Weaknees/Kelemahan :

- Sebagian besar perempuan tidak menyadari potensi dan kekuatannya.
- *Secara psikis :*
 1. Perempuan mudah sekali gamang, semakin tinggi prestasi/ karier semakin tinggi pula kekuatirannya, semakin merasa bersalah bahwa ia telah meninggalkan berbagai “Kewajiban utamanya”.
 2. Perempuan akan merasa sungkan apabila dianggap “menyaingi” atau lebih unggul dari suami.
 - Tidak semua perempuan menyepakati bahwa pada saat ini posisi wanita termarginalkan, ter subordinat dan dikenai berbagai stereotype/ pelabelan yang merugikan perempuan.

1. Sebagiaian perempuan menganggap bahwa peran perempuan dibidang domestik (memasak, merawat anak, memelihara kebersihan rumah) merupakan “kodrat” yang menjadikan hidupnya menjadi bermakna, sehingga peran-peran ini harus dikonserasi.
 2. Sebagiaian perempuan ikut menikmati popularitas dan fasilitas yang dimiliki suaminya sehingga tidak terdorong untuk mengubah keadaan.
- Sifat gerakan perempuan sadar gender masih cenderung elitis, sehingga masyarakat umum yang menganggap bahwa gerakan pembela hak-hak perempuan (feminis) hanya “milik” para aktifis saja.
 - Banyak perempuan yang menganggap bahwa politik adalah urusan laki-laki sehingga jika dia merembah ke urusan tersebut akan menyalahi kodratnya.
 - Sedikit perempuan yang menjadi pengurus teras partai politik.
 - Sedikit sekali perempuan yang duduk dalam tim penentu caleg.
 - Masalah Dana: untuk menjadi calon anggota DPR,DPD,DPRD diperlukan dana minimal untuk kampanye yang berkisar antara puluhan hingga ratusan juta rupiah.

Opportunity/peluang :

- Pasal 65 UU Pemilu 2003 : keterwakilan perempuan minimal 30 % dalam DPR,DPD,DPRD Provinsi da Kabupaten/ Kota.
- Pasal 27 UUD 1945 : Semua warganegara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung Hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
- Hampir semua partai politik akan berusaha merebut hati perempuan, merebut suara perempuan dalam pemilu.

- Pasal 13 UU No. 31 tentang Partai Politik : Kepengurusan parpol di setiap tingkatan dipilih secara demokratis melalui forum musyawarah parpol sesuai dengan AD-ART dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Threat/ Ancaman :

- Paratai politik mempunyai peran yang sangat besar dalam menentukan daftar calon DPR dan DPRD. Sangat mungkin perempuan hanya diletakkan di nomor urut besar yang kira-kira sulit untuk terpilih, atau diletakkan di daerah pemilihan yang kira-kira sulit memperoleh kursi.
- Pasal 65 UU Pemilu 2003 menyebutkan bahwa : “ setiap Partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR” Adanya kata -kata “Dapat” dapat diartikan bukan sebagai sebuah keharusan sehingga tidak ada konsekwensi hukumannya apabila tidak dipenuhi.
- Banyak laki-laki “patriarch” yang menganggap gerakan pembela perempuan sebagai ancaman sehingga mereka berusaha mempertahankan diri atau melawan gerakan ini dengan menggunakan berbagai dalih.
- Banyak perempuan yang juga berpikiran patriarchy sehingga mereka akan menjadi penentang utama terhadap perubahan.
- Sikap masyarakat yang apriori terhadap gerakan feminis : menganggap bahwa ide feminis adalah ide yang berasal dari barat (Inggris, Amerika). Tidak cocok dengan kebudayaan, kodrat dan kepribadian wanita Indonesia.

Dari paparan diatas tampak bahwa meski perempuan mempunyai kekuatan dan peluang yang cukup besar kelemahan dan ancaman yang menghadang juga sangat besar. Untuk itu perlu dirancang langkah-langkah strategi memperkuat posisi perempuan dalam pemilu 2004.

Strategi Perempuan menghadapi Pemilu 2004.

- Perempuan harus berusaha masuk dalam tim penentu urutan caleg dalam partainya masing-masing.
- Membuat data yang berisi nama-nama perempuan yang potensial untuk menduduki lembaga legislatif dan eksekutif.
- Perempuan harus merancang kampanye secara profesional. Organisasi-organisasi perempuan dapat membantu para caleg merancang strategi kampanye, mengekspose diri di media massa dan sebagainya.
- Meyakinkan laki-laki bahwa kebijakan pemerintah yang “pro perempuan” tidak berarti pasti merugikan laki-laki.
- Membuat para caleg merasa “berhutang” pada perempuan sehingga jika nanti mereka benar-benar terpilih mereka harus benar-benar membuat kebijakan yang “pro perempuan. Tidak ada jaminan bahwa perempuan yang lebih terpilih menjadi anggota egois jika memperjuangkan hak perempuan. Banyak pemimpin perempuan yang khawatir dianggap egois jika memperjuangkan hak perempuan . PM Inggris Margaret Thatcher adalah PM wanita yang tidak pernah menyentuh isu perempuan dan tidak merasa berhutang terhadap pemilih perempuan.
- Menyusun program kampanye “pro perempuan” yang diharapkan nanti akan menjadi kebijakan pemerintah , seperti :
 1. Program Kesejahteraan perempuan :
 - Memberi dana bantuan kepada para janda yang masih harus membesarkan anak-anaknya tanpa suami. Program ini yang berhasil merebut hati pemilih di Australia sehingga mereka mendukung Paul Keating, yang sering dianggap sebagai PM feminis.

- Meningkatkan anggaran pendidikan . Saat ini Tap MPR telah memerintahkan pemerintah untuk menganggarkan 20 % APBN untuk keperluan pendidikan. Tetapi pemerintah tidak pernah melaksanakan dan para anggota DPR tidak menegur maupun memberikan sanksi kepada pemerintah. Akibatnya pada saat ini biaya sekolah menjadi semakin mahal, bukannya semakin murah.
- Keharusan untuk membuat tempat penitipan anak balita yang murah dan mudah dilingkungan tempat kerja, sehingga para ibu yang masih mempunyai anak kecil dapat bekerja dengan tenang setelah menitipkan anaknya.
- Meyakinkan masyarakat bahwa peningkatan peranserta perempuan dalam kegiatan publik adalah upaya yang sangat mulia untuk menciptakan keadilan. Setiap orang (pemimpin, Kyai, guru, manusia biasa) yang peduli terhadap keadilan mestinya juga peduli terhadap nasib perempuan.
- Menyakinkan masyarakat, khususnya para laki-laki bahwa pada saat ini iklim dunia sudah berubah. Penentuan hak politik perempuan bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga terjadi di setiap pelosok dunia. Sikap defensif tidak akan menguntungkan . Misalnya, kekalahan presiden Bush Senior dalam pemilu Amerika tahun 1992 disebabkan karena ia tidak mau mengedepankan isu kampanye yang pro perempuan, sehingga mayoritas perempuan beralih untuk mendukung Clinton.
- Membentuk Lembaga Penyandang dana kampanye perempuan untuk para caleg. Ketersediaan dana merupakan syarat yang sangat penting dalam era demokrasi yang “memaksa” para caleg untuk kampanye secara fair, bukan untuk money politics.
- Membangun rasa percaya diri perempuan.-perempuan harus dididik untuk menentukan nasibnya sendiri. Kisah puteri Cinderella adalah

cerita anak-anak yang sangat bias jender. Seolah-olah nasib perempuan akan ditentukan oleh kehadiran pangeran yang akan membahagiakan dirinya. Sosialisasi peran gender di Indonesia berjalan sangat lambat. Dilapisan perguruan tinggipun banyak yang tidak memahami arti gender. Pemerintahan harus dilobby agar bersedia memasukkan materi tentang pemahaman jender dalam kurikulum sekolah sehingga masyarakat akan lebih menghargai hak-hak perempuan. Penghargaan terhadap hak-hak perempuan bukan hanya untuk kebaikan perempuan tetapi untuk kebaikan masyarakat semua.

Referensi:

- Undang-undang RI No. 31 Th. 2002 tentang Partai Politik
- UU RI No. 12 tentang Pemilihan Umum anggota DPR dan DPRD.
- Chusnul Mar'iyah, Persiapan Perempuan dalam Pemilu 2004, Makalah dalam Seminar Nasional Perempuan dan proses Politik Demokratik, PP Aisyiah, Yogyakarta, 2003.
- Mansour Fakih, Analisis gender, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1996.
- Naomi Worf, *Gegar Gender*, Pustaka Sementara, Yogyakarta, 1999.

BAB V

PENUTUP

Sejarah masa yang akan datang ditentukan oleh generasi sekarang. Karena proses sejarah yang terjadi pada masa sekarang ini merupakan pondasi untuk menentukan sejarah masa yang akan datang. Oleh karena itu agar kita tidak kehilangan identitas dan jati diri di masa depan diperlukan adanya pemahaman dan pelestarian nilai-nilai luhur sejarah bangsa yang sudah terbentuk dan mengakar kuat dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terpaan arus globalisasi yang semakin kuat dan tidak bisa dibendung.

Untuk itu diperlukan adanya penanaman nilai-nilai luhur budaya kepada generasi muda. Melalui sejarah kita dapat mempelajari peristiwa-peristiwa di masa lalu yang bermanfaat bagi kehidupan sekarang dan yang akan datang. Pendidikan sejarah sangat diperlukan bagi generasi muda untuk membentengi pengaruh dari luar yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia.

Pendidikan sejarah yang tepat dapat mengarahkan wawasan kebangsaan dan mempertebal jati diri dan identitas bangsa sehingga kelangsungan pembangunan memiliki arah yang jelas sesuai dengan jiwa dan pandangan hidup bangsa Indonesia.

Kiranya buku ini bermanfaat bagi generasi muda untuk mengetahui makna sejarah dan hubungannya dengan pembangunan bangsa. Kami juga mengharapkan saran dan kritikan dari semua pihak untuk perbaikan di masa yang akan datang.

LAMPIRAN



*Kesenian Pembukaan FKY 2004 di Plaza Monumen 1 Maret 1949
Museum Benteng Vredenburg Yogyakarta 6 Juni s.d 6 Juli 2004.*



*Suasana Pasar seni FKY 2004 yang dilaksanakan di
Museum Benteng Vredenburg Yogyakarta 6 Juni s.d 6 Juli 2004*



Kegiatan Temu Tokoh “Peranan Ilmu Sejarah Dalam Pembangunan Bangsa Menuju Integrasi Nasioanal” di Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta
Pembicara : Prof. DR. Muchan , SH. , Drs. H. Sugito, M.Si, Drs. Sudomo Sunaryo.



Ceramah dan Diskusi Pelestarian dan Pemanfaatan Benteng Vredeburg Yogyakarta sebagai BCB dan Museum.
Pemakalah : Prof. DR. Timbul Haryono M.Sc, DR. Daud Aris Tanudidjo. MA dan Drs. Tri Hartono.



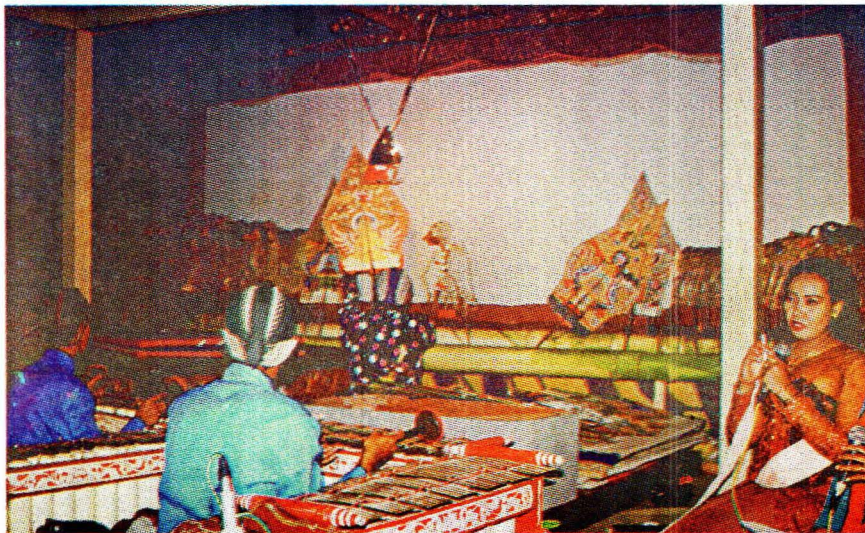
Kegiatan Seminar/Diskusi "Pendidikan Politik"
Pemakalah Drs. H. Dadang Yuliantara, Drs. Arei Sujito, Marhaban Fakhri di
Museum Perjuangan Yogyakarta (Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta Unit II)
16 Oktober 2003



Seminar Sehari Kerjasama Museum Benteng Vredeburg Dengan Balai Kajian Sejarah
dan Nilai Tradisional Yogyakarta "Peranan Wanita Dulu, Kini dan Esok"
Pemakalah : Dra. Budi Wahyuti, MA.MM, Prof. DR. Mary Astuti.



Kegiatan Ceramah Sosialisasi Museum Benteng Vredeburg



*Kegiatan Promosi Pariwisata/ Sosialisasi
Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta lewat
Pertunjukan Wayang Dupara dan Wayang Purwa semalam suntuk.*

Peranan Museum Dalam Pendidikan Sejarah

Peranan Museum Dalam Pendidikan Sejarah

BUKU INFORMASI MUSEUM PERANAN MUSEUM DALAM PE

Perpustakaan
Jenderal Keb

069.0
GUN
b

ISBN 979 - 3547 - 03 - 0

JARAH